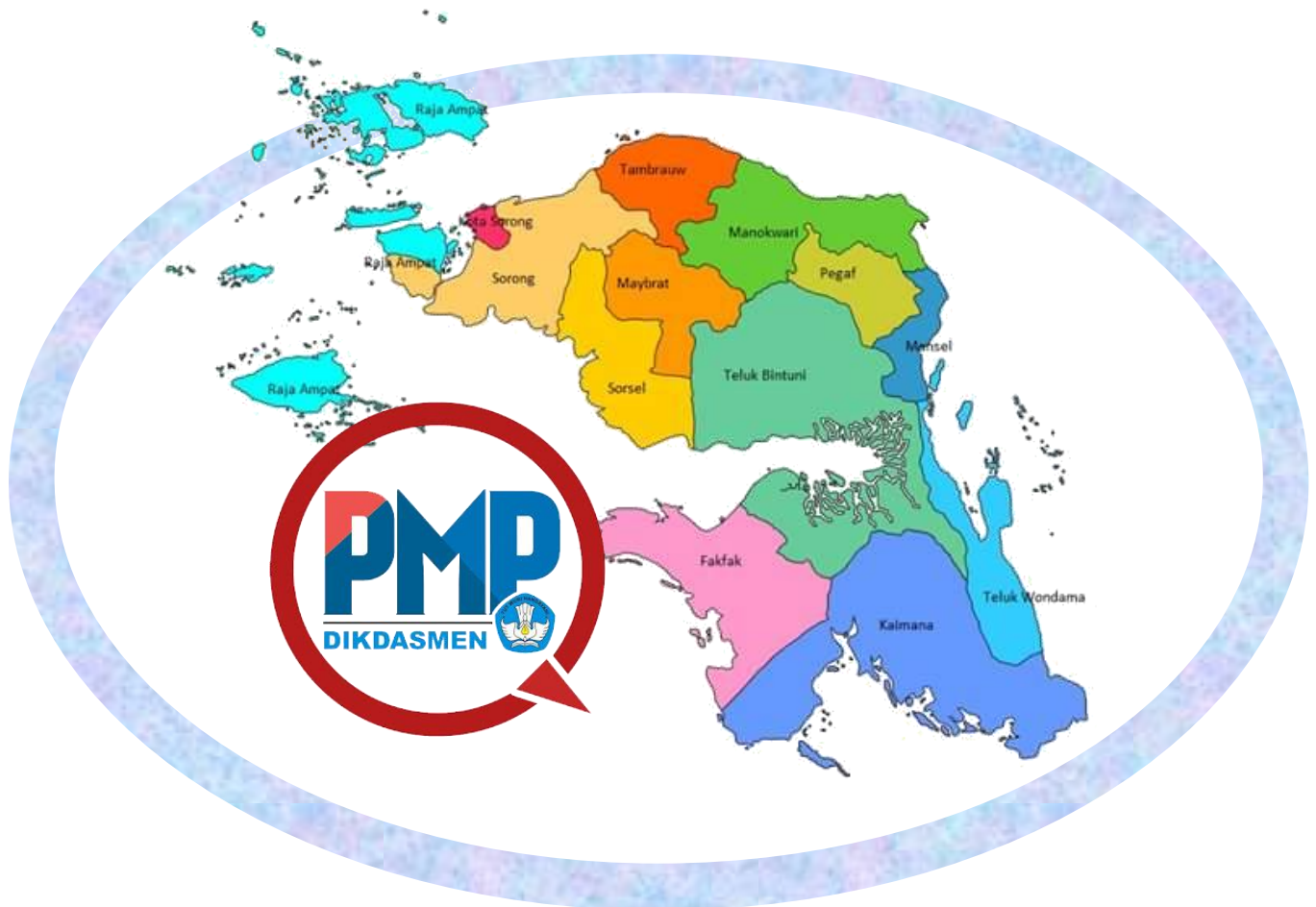


PROFIL MUTU

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PAPUA BARAT TAHUN 2016



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PAPUA BARAT
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga LPMP Papua Barat dapat meluncurkan Profil Mutu Pendidikan di Provinsi Papua Barat tahun 2016. Profil Data Mutu Pendidikan bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam hal mengidentifikasi berbagai macam perkembangan pendidikan disertai sejumlah persoalan yang secara riil berdasarkan analisa kebutuhan yang berkaitan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 mengamanatkan setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu PTK pada pendidikan dasar dan menengah maka kehadiran data PTK yang akurat dan mutakhir menjadi sangat penting. Analisis dan penyajian data Profil Mutu Pendidikan Papua Barat diharapkan dapat membantu para pengelola dan pemangku kepentingan untuk memahami dalam memanfaatkan informasi dengan cara yang benar sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Atas tersusunnya laporan Profil Mutu Pendidikan Papua Barat tahun 2016, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kami berdoa Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menghasilkan program peningkatan mutu Pendidikan yang profesional dan bermartabat di Papua Barat.

Manokwari, 2017
Kepala Seksi SIPM LPMP Papua Barat



Yustus Awoitauw, S.Si
NIP. 197001072002121002

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA BARAT

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Seiring kemajuan di dunia pendidikan yang disertai perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel, LPMP Papua Barat juga berupaya memberikan informasi pendidikan di wilayah Provinsi Papua Barat melalui media Profil Mutu Pendidikan.

Sejalan dengan Visi dan Misi LPMP Papua Barat, memberikan pelayanan prima kepada setiap kalangan yang memerlukan informasi pendidikan.

Profil Mutu Pendidikan Papua Barat ini merupakan salah satu bukti akuntabilitas LPMP Papua Barat kepada publik dalam rangka mewujudkan good governance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap bahwa apa yang telah kita upayakan tersebut merupakan langkah maju bagi dunia pendidikan khususnya di Papua Barat.

Akhirnya, marilah kita jadikan Profil Mutu Pendidikan ini sebagai media komunikasi dalam upaya membangun peradaban bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu, dan mampu bersaing dalam kancah pergaulan dunia internasional.

Manokwari, 2017

Kepala LPMP Papua Barat

Drs. Adrian Howay, MM

NIR 19641011199203001



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	vi

Gambaran Umum : Provinsi Papua Barat 1

Kondisi Geografis Provinsi Papua Barat	1
Kondisi Demografi Provinsi Papua Barat	4

Gambaran Umum : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat 7

Gambaran Umum LPMP Papua Barat	7
Struktur Organisasi dan Pegawai	9
Visi, Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi LPMP Papua Barat	14

Profil Mutu : Data Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 16

Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Barat ..	16
---	----

Penjaminan Mutu Pendidikan : Pemetaan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2016 37

Latar Belakang Pemetaan Mutu Pendidikan	37
Rincian Masalah Kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan di Papua Barat	40
Pemetaan Mutu Pendidikan	41
Kesimpulan dan Saran	57

**Penjaminan Mutu Pendidikan : Pengembangan Sekolah Model
Provinsi Papua Barat Tahun 2016 62**

Pengembangan Sekolah Model Papua Barat Tahun 2016 65

**Implementasi Kurikulum: Implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi
Papua Barat Tahun 2016 72**

Latar Belakang Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 72

Perkembangan Sekolah dan Guru Sasaran Pelaksana Kurikulum
2013 di Provinsi Papua Barat 73

**Raport Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Barat
Tahun 2016 82**

PROVINSI PAPUA BARAT

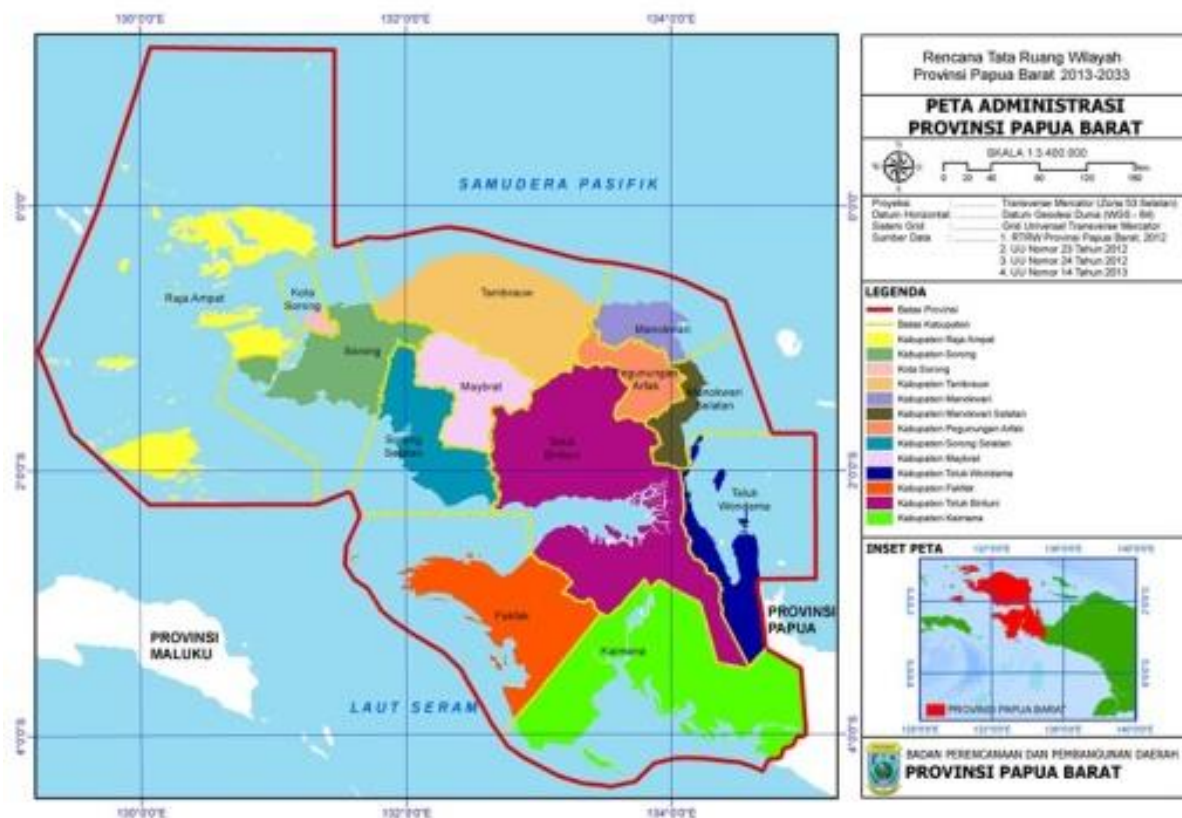
Kondisi Geografis Provinsi Papua Barat

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat terletak antara 0° – 4° Lintang Selatan dan 124° – 132° Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 120.777,02 kilometer persegi. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Papua Barat sebagaimana berikut:

- Batas Utara : Laut Pasifik
- Batas Barat : Laut Seram Provinsi Maluku
- Batas Selatan : Laut Banda Provinsi Maluku
- Batas Timur : Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat secara resmi berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999. Pada awal berdirinya, wilayah Provinsi Papua Barat terdiri atas kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Fakfak. Dalam perjalanannya, telah mengalami beberapa kali pemekaran kabupaten. Mulai dari pemekaran beberapa kabupaten baru, yakni

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Raja Ampat. Kemudian pemekaran dari Kabupaten Manokwari, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan adalah pemekaran kabupaten yang dialami sampai akhir tahun 2016.



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Papua Barat

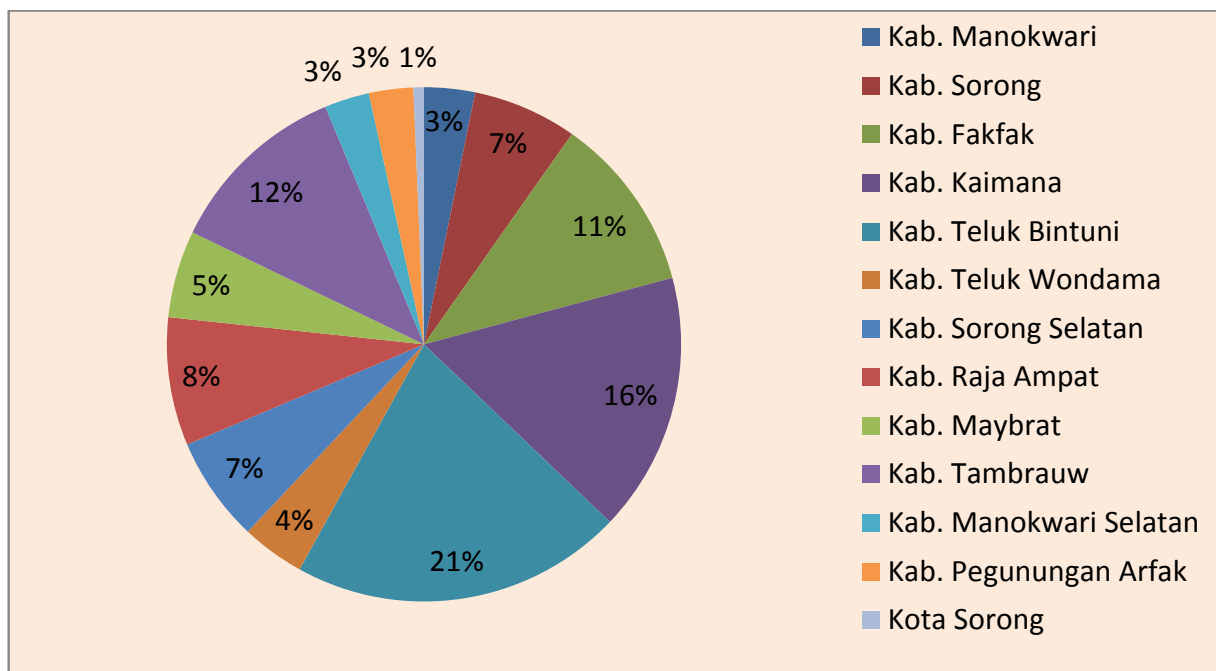
Adapun prosentase wilayah daratan di masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel dan ilustrasi pada halaman berikut.

Tabel.1
Luas Daratan tiap Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Prosentase (%)	Keterangan
1.	Kab. Manokwari	3.186,28	3	
2.	Kab. Sorong	6.544,23	7	
3.	Kab. Fakfak	11.036,48	11	
4.	Kab. Kaimana	16.241,84	16	
5.	Kab. Teluk Bintuni	20.840,83	21	
6.	Kab. Teluk Wondama	3.959,53	4	
7.	Kab. Sorong Selatan	6.594,31	7	
8.	Kab. Raja Ampat	8.034,44	8	
9.	Kab. Maybrat	5.461,69	5	
10.	Kab. Tambrauw	11.529,18	12	
11.	Kab. Manokwari Selatan	2.812,44	3	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	2.773,74	3	
13.	Kota Sorong	656,64	1	
Luas Daratan Total		99.671,63		

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2016.

Gambar 2
Grafik Perbandingan Prosentase Wilayah Daratan
Tiap Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Kondisi Demografi Provinsi Papua Barat

Penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebanyak 871.510 jiwa. Adapun persebaran penduduk per-kabupaten di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Persebaran Penduduk Per-Kabupaten di Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
1.	Kab. Manokwari	158.326	
2.	Kab. Sorong	80.695	
3.	Kab. Fakfak	73.468	
4.	Kab. Kaimana	54.165	
5.	Kab. Teluk Bintuni	59.196	
6.	Kab. Teluk Wondama	29.791	
7.	Kab. Sorong Selatan	43.036	
8.	Kab. Raja Ampat	45.923	
9.	Kab. Maybrat	37.529	
10.	Kab. Tambrauw	13.615	
11.	Kab. Manokwari Selatan	21.907	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	28.271	
13.	Kota Sorong	125.588	
Jumlah		871.510	

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2016.

Penduduk yang tinggal di Provinsi Papua Barat sebagian besar berusia produktif. Adapun perbandingan penduduk berdasarkan usia di Provinsi Papua Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3
Penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah		Total
		laki-laki	perempuan	
1.	0 – 4	49.971	47.808	97.779
2.	5 – 9	47.855	45.034	92.889
3.	10 – 14	44.941	42.387	87.328
4.	15 – 19	42.895	39.910	82.805
5.	20 – 24	44.428	40.299	84.727
6.	25 – 29	45.369	40.718	86.587
7.	30 – 34	43.655	38.831	82.486
8.	35 – 39	36.981	31.819	68.800
9.	40 – 44	30.114	25.422	55.536
10.	45 – 49	24.165	20.290	44.455
11.	50 – 54	18.148	15.216	33.364
12.	55 – 59	12.821	10.384	23.205
13.	60 – 64	8.258	6.426	14.684
14.	65 +	9.170	7.695	16.865
Jumlah		458.271	412.239	871.510

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penduduk di Provinsi Papua Barat didominasi oleh kelompok anak-anak dan remaja. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar sebagai modal dasar pembangunan di Provinsi Papua Barat. Namun hal ini juga merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan di Provinsi Papua Barat, bagaimana cara menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk membangun Provinsi Papua Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.



Gambar 3. Generasi Muda Papua dan Papua Barat

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PAPUA BARAT

Gambaran Umum LPMP Papua Barat

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi. LPMP dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015). LPMP Papua Barat hadir untuk mengawal implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka menjamin terwujudnya mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua Barat.

LPMP Papua Barat berkedudukan di Manokwari, Ibukota dari Provinsi Papua Barat. Secara geografis lokasi kantor LPMP Papua Barat berada di Jl. Tugu Jepang Pemancar Radio Matoa, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Jarak antara kantor LPMP Papua Barat ke kantor gubernur Provinsi Papua Barat sekitar 20 kilometer.

Adapun fungsi LPMP adalah melakukan pemetaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, supervisi, dan memberikan fasilitasi mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah; pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu

pendidikan; dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP (Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP). Sehingga penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah program utama dari LPMP untuk dilaksanakan di wilayah kerjanya.

Sasaran penjaminan mutu pendidikan oleh LPMP Papua Barat adalah seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah serta dinas pendidikan di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dengan perencanaan yang matang, maka LPMP Papua Barat perlu melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas pendidikan, baik di tingkat Provinsi Papua Barat maupun tingkat kabupaten/kota.



Gambar 4.
Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan LPMP meliputi implementasi standar, kriteria, norma dan prosedur yang telah ditetapkan pusat; dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Wilayah kerja dari LPMP Papua Barat meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, yang terdiri atas 13 kabupaten/kota. Koordinasi dan kerja sama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat dan dinas-dinas pendidikan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota.

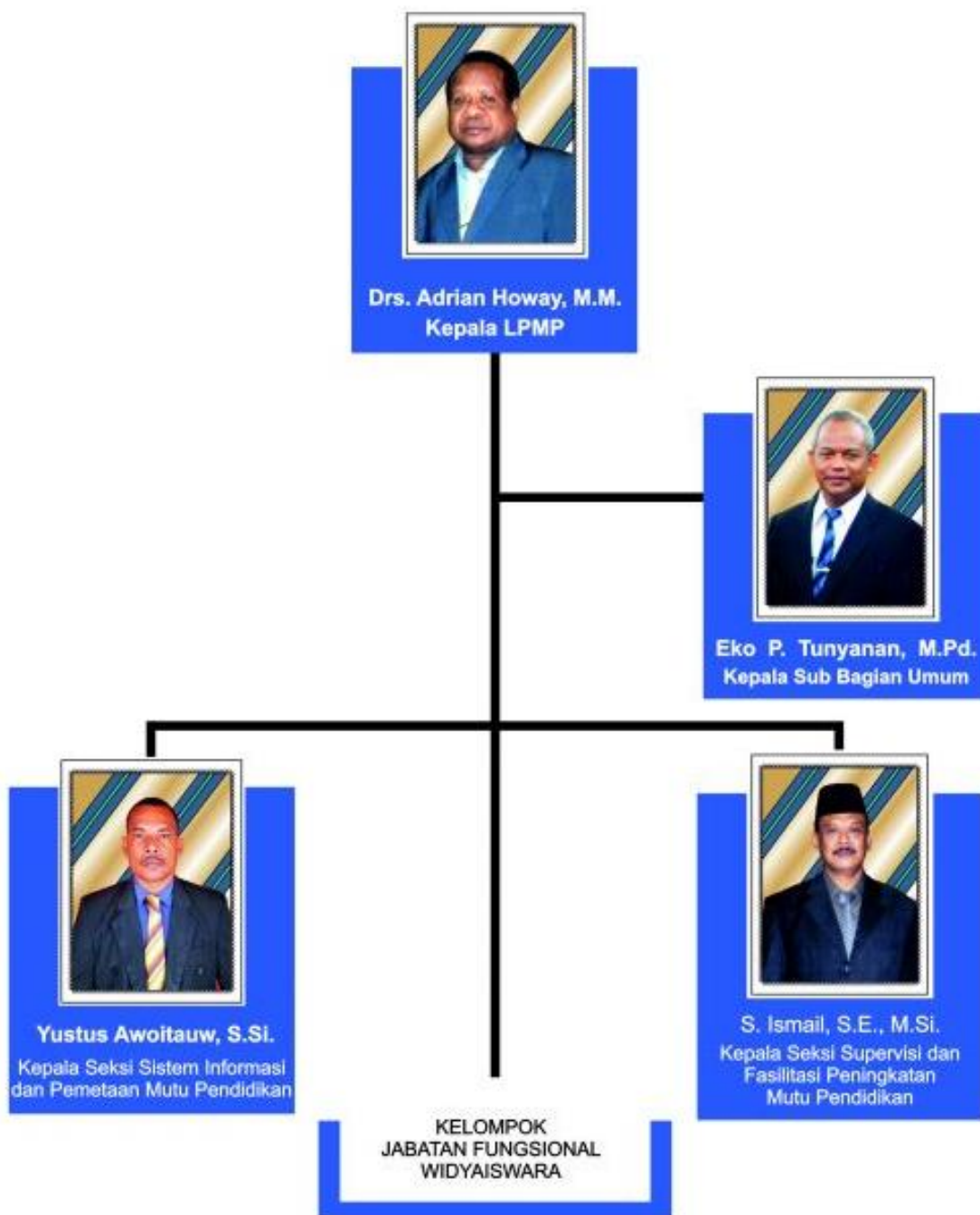
Struktur Organisasi dan Pegawai

Struktur organisasi di LPMP Papua Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala dengan satu subbagian umum dan dibantu 2 (dua) seksi yaitu seksi sistem informasi dan pemetaan mutu, serta seksi supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, serta kelompok jabatan fungsional (widyaaiswara). Struktur tersebut sama dengan LPMP Sulawesi Barat dan LPMP Kepulauan Riau. Pejabat kepala LPMP Papua Barat menduduki jabatan eselon IIIa. Adapun gambar struktur organisasi LPMP Papua Barat sebagaimana pada gambar berikut.



STRUKTUR ORGANISASI LPMP PAPUA BARAT

(Permendikbud No. 14 Tahun 2015)



Gambar 5. Struktur Organisasi LPMP Papua Barat

Jumlah pegawai yang bekerja di LPMP Papua Barat sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 64 orang. Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil sebanyak 39 orang dan PPNPNS (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 25 orang. Pegawai-pegawai tersebut terbagi dalam 3 (tiga) seksi/sub bagian, yakni di Sub Bagian Umum, Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, serta di Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu. Adapun pimpinan dan pembagian tugas bagi pegawai di LPMP Papua Barat sebagaimana tabel-tabel berikut.

Tabel 4
Pejabat Struktural LPMP Papua Barat

No.	Nama dan Gelar	Gol.	Jabatan Struktural	Spesialisasi Pendidikan
1	Drs. Adrian Howay, MM.	IV/b	Kepala LPMP	S2 Manajemen S1 Administrasi Negara
2	Eko P. Tunyanan, M.Pd	IV/a	Kasubag Umum	S2 Pendidikan S1 BK
3	Soleman Ismail, SE, M.Si	III/d	Kasi SFPMP	S2 Manajemen SDM S1 Ekonomi
4	Yustus Awoitauw, S.Si.	III/d	Kasi SIPMP	S1 Sistem Informasi
5	Drs. Ponco F Sudaryanto, M.Si.	IV/a	Koordinator WI	S2 Psikometri S1 Bhs. & Sastra Indonesia

Tabel 5
Pimpinan dan Staf Sub-Bagian Umum LPMP Papua Barat

No.	Nama	Gol	Jabatan Struktural	Pendidikan
1	Eko P. Tunyanan, M.Pd	IV/a	Kasubag Umum	S2 Pendidikan S1 BK
2	Sarce Pallangan, S.T, M.Ed	III/d	Fungsional umum	S2 Pendidikan
3	Nurirja, S.H.	III/d	Fungsional umum	S1 Hukum Pidana
4	Eva Ch. R. Simanjuntak, S.Kom.	III/b	Fungsional umum	S1 Komunikasi
5	Markus Sainyakit, S.E.	III/a	Pendahara	S1 Ekonomi
6	Ahmad Akbarudin, S.Pd.	III/a	Fungsional umum	S1 Teknologi Pendidikan
7	Noer Fitriyanti, S.S.	III/a	Fungsional umum	S1 Sastra Inggris
8	Eko Setiaji, S.Pd.	III/a	Fungsional umum	S1 Matematika
9	Nur Afrijal, SE	III/a	Fungsional umum	S1 Ekonomi
10	Maharani Yustianingsih, S.Si	III/a	Fungsional umum	S1 Matematika
11	Muh. Yusuf Tallama, S.IP	II/c	Fungsional umum	S1 Ilmu Pemerintahan
13	Barkah S. Jayahartana, S.Kom.	-	-	S1 Teknik Informatika
14	Herdiana Samkakai, S.K.M.	-	-	S1 Kesehatan Masyarakat
15	Rizcky Iriawan Mongan, S.E.	-	-	S1 Ekonomi/Akuntansi
16	Daud Mlasmene, S.I.Kom.	-	-	S1 Komunikasi
17	Dian Nofianti	-	-	SMA
18	Parton Sinaga	-	-	SMA
19	Tirasa M.S. Torano	-	-	SMA
20	Nur Cahyo Setyanto	-	-	SMA

Tabel 6
Pimpinan dan Staf
Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

No.	Nama	Gol	Jabatan Struktural	Pendidikan Terakhir
1	Soleman Ismail, S.E. M.M.	III/d	Kasi SFPMP	S2 Ekonomi S1 Ekonomi
2	Luci Evita, S.Pd.	III/d	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Bhs Inggris
3	Sukanto, S.Pd.	III/d	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Fisika
4	Yulianus Saireri Seo, M.Pd.	III/c	Fungsional Umum	S2 Pendidikan S1 Pendidikan Geografi
5	Agustina Duwith, S.Pd.	III/c	Fungsional Umum	S1 PKn
6	Wawan Rahyudi, S.Si.	III/c	Fungsional Umum	S1 Fisika
7	Bram Warmaya Lubis, S.Pd.	III/a	Fungsional Umum	S1 PKn

No.	Nama	Gol	Jabatan Struktural	Pendidikan Terakhir
8	Ria Natalia Dianti, S.Pd.	III/a	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Kimia
9	Nur Romli Hidayat, S.Pd.	III/a	Fungsional Umum	S1 Teknologi Pendidikan
10	Efrida Fadla, S.Pd.	III/a	Fungsional Umum	S1 Pend. Matematika
11	Marsina Titirloloby, S.P.	-	-	S 1 Pertanian
12	Drs. F. Ponco Sudaryanto, M.Si	IV/a	Widyaiswara Madya	S2 Psikometri
13	Tuning Supriyadi, M.Pd.	III/c	Widyaiswara Muda	S2 Penilaian dan Evaluasi
14	Santy Mukti Mardhika, M.Pd	III/b	Widyaiswara Pertama	S2 Pend. Sains
15	Basir La Ily, S.Pd.	III/b	Widyaiswara Pertama	S1 Pend. Kimia

Tabel 7
Pimpinan dan Staff
Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan

No.	Nama	Gol	Jabatan Struktural	Pendidikan
1	Yustus Awoitauw, S.Si.	III/d	Kasi SIPMP	S1 Sistem Informasi
2	Sukarno, S.Pd.	III/d	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Fisika
3	Slamet Riyadi, S.Pd.	III/d	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Matematika
4	Medy Moody Lumintang, S.H.	III/c	Fungsional Umum	S1 Hukum Pidana
5	Viktor Kisnawan, S.Sos.	III/a	Fungsional Umum	S1 Ilmu Sosial
6	Meiyasa Anggraini, S.Si.	III/a	Fungsional Umum	S1 Matematika
7	Nanang Basir Umkabu, S.T.	III/a	Fungsional Umum	S1 Teknik Informatika
8	Eris Sitinjak, S.Pd.	III/a	Fungsional Umum	S1 Pendidikan Matematika
9	Mitravianus Ratu Samen, S.	III/a	Fungsional Umum	S1 Teknik Informatika
10	Maya R. Syafaat, Amd.Kom.	-	-	D3 Manajemen Informatika

Visi, Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi LPMP Papua Barat

➤ Visi

“Menjadi Motivator Budaya Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah”

➤ Misi

1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melaksanakan supervisi pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
4. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan kerjasama di bidang Penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Melaksanakan penataan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

➤ Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi LPMP dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar pendidikan nasional;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.



Gambar 6. Pegawai LPMP Papua Barat

PROFIL MUTU :

DATA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

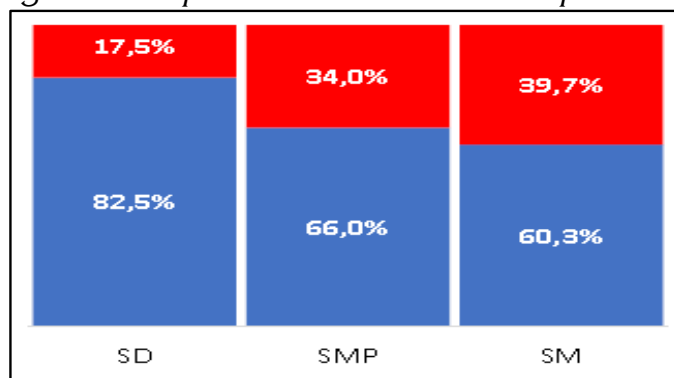
Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Barat

☞ Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Papua Barat

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Pada tahun 2016, APM untuk Provinsi Papua Barat sebagaimana dilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 7.
Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat, Kemdikbud 2016.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa APM untuk sekolah dasar (SD) sebesar 82,5%, sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 66,0% dan untuk sekolah menengah (SMA dan SMK) sebesar 60,3%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak seusia SD yang bersekolah sesuai antara usia dengan jenjang SD lebih banyak dibandingkan dengan jenjang yang lain.

☞ Satuan Pendidikan

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah sekolah yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Provinsi Papua Barat sampai akhir tahun 2016 sebanyak 1.474 sekolah. Data tersebut hanya terbatas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenjang pendidikan yang ada di bawah Ditjen Dikdasmen hanya meliputi jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Adapun jumlah dan gambaran data sekolah perjenjang sebagaimana tabel dan ilustrasi berikut.

Tabel 8
Data Sekolah Penyelenggara Pendidikan Dasar dan Menengah
di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	1.012	
2.	SMP	285	
3.	SMA	120	
4.	SMK	52	
5.	SLB	5	
Jumlah		1.474	

Sumber : Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.



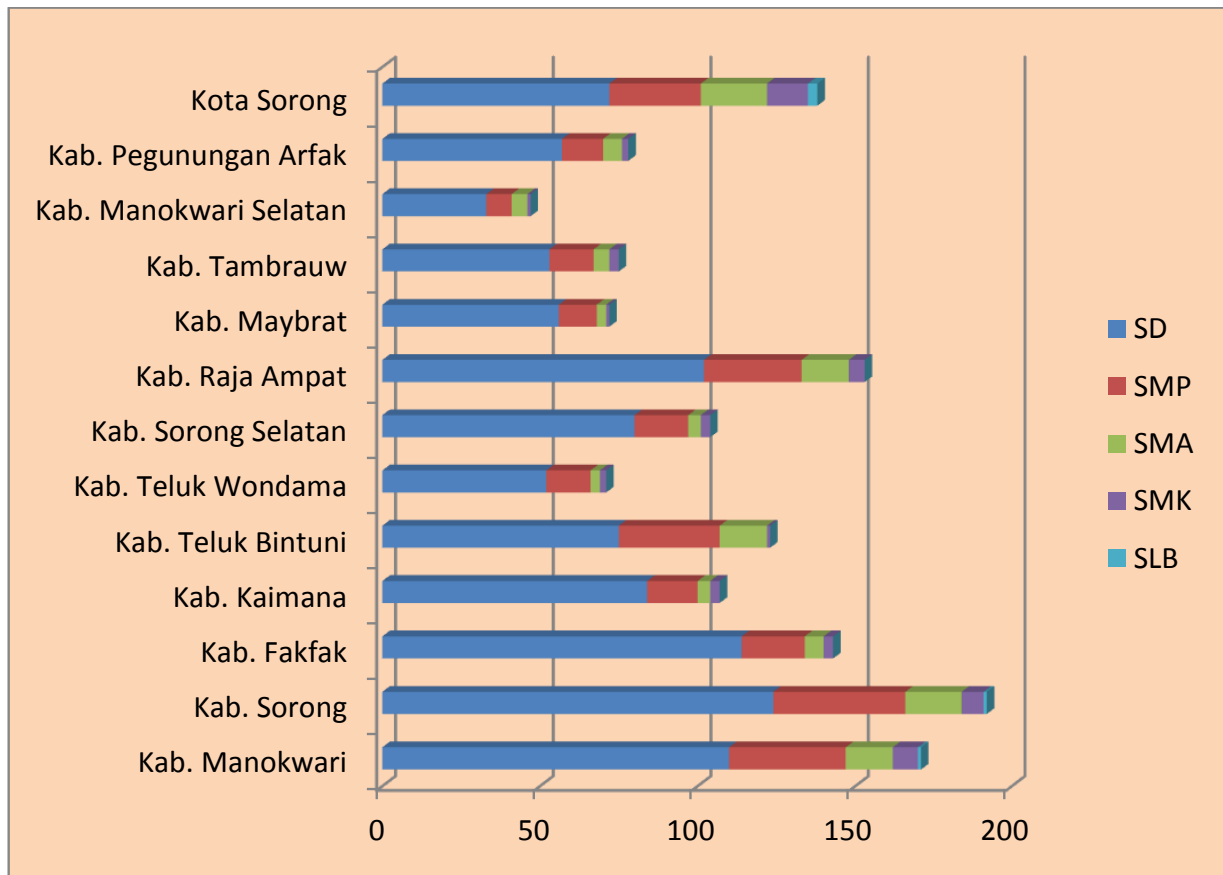
Persebaran sekolah di Provinsi Papua Barat bervariasi, sekolah masih banyak terdapat di kabupaten-kabupaten yang sudah ada sejak lama. Sedangkan untuk daerah pemekaran kabupaten baru, jumlah satuan pendidikan relatif lebih sedikit. Sekolah paling banyak terdapat di Kabupaten Sorong (192 sekolah), disusul di Kabupaten Manokwari (171 sekolah) dan sekolah paling sedikit berada di kabupaten manokwari Selatan (47 sekolah). Secara lengkap persebaran jumlah sekolah di tiap jenjang dan tiap kabupaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9
Persebaran Sekolah Perjenjang di Tiap Kabupaten
Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah					Jumlah	Ket.
		SD	SMP	SMA	SMK	SLB		
1.	Kab. Manokwari	110	37	15	8	1	171	
2.	Kab. Sorong	124	42	18	7	1	192	
3.	Kab. Fakfak	114	20	6	3	0	143	
4.	Kab. Kaimana	84	16	4	3	0	107	
5.	Kab. Teluk Bintuni	75	32	15	1	0	123	
6.	Kab. Teluk Wondama	52	14	3	2	0	71	
7.	Kab. Sorong Selatan	80	17	4	3	0	104	
8.	Kab. Raja Ampat	102	31	15	5	0	153	
9.	Kab. Maybrat	56	12	3	1	0	72	
10.	Kab. Tambrau	53	14	5	3	0	75	
11.	Kab. Manokwari Selatan	33	8	5	1	0	47	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	57	13	6	2	0	78	
13.	Kota Sorong	72	29	21	13	3	138	
Jumlah Perjenjang		1012	285	120	52	5	1474	

Sumber : Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Gambar 8.
Persebaran Sekolah Perjenjang di seluruh kabupaten
Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Sumber : Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Akreditasi Sekolah

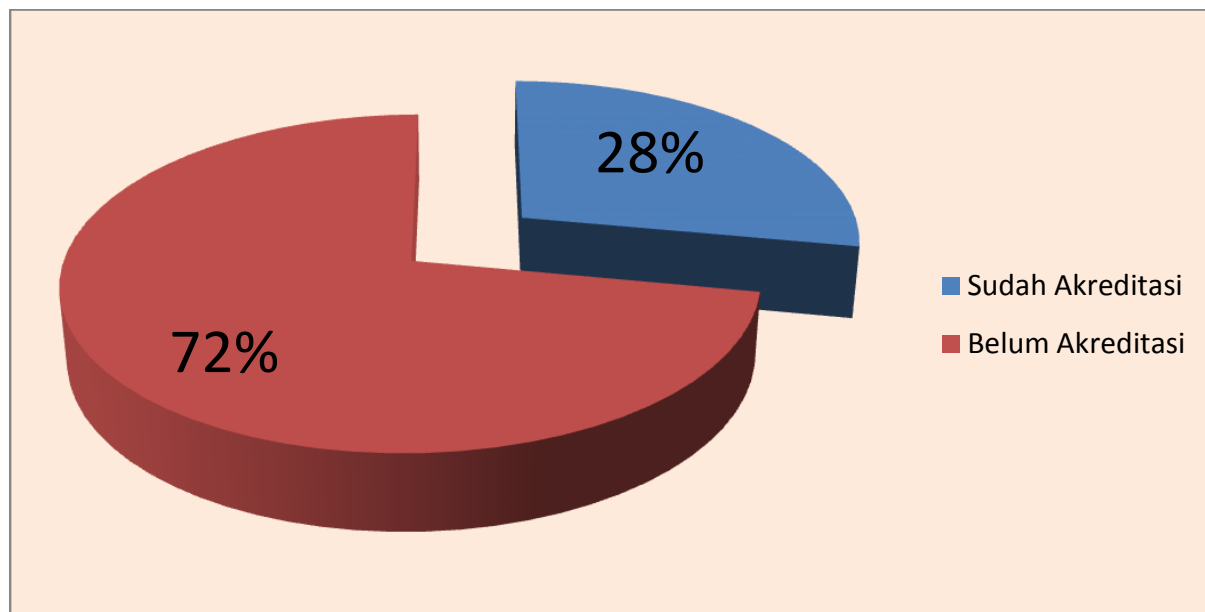
Sebagian besar sekolah yang berada di Provinsi Papua Barat belum terakreditasi. Bahkan sekolah-sekolah yang sudah terakreditasipun masih banyak yang menyandang predikat akreditasi B dan C. Sekolah-sekolah di daerah kabupaten yang sudah terbentuk kebanyakan sudah terakreditasi, sedangkan di kabupaten-kabupaten pemekaran masih banyak yang belum terakreditasi. Hal ini Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar mengenai akreditasi sekolah berikut ini.

Tabel 10
Status Akreditasi Sekolah per-jenjang di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Akreditasi Jenjang SD				Akreditasi Jenjang SMP				Akreditasi Jenjang SMA				Akreditasi Jenjang SMK				Keterangan
		A	B	C	Belum/ Konf. *)	A	B	C	Belum/ Konf. *)	A	B	C	Belum/ Konf. *)	A	B	C	Belum/ Konf. *)	
1	Kab. Manokwari	4	18	10	78	4	10	3	20	3	2	1	9	0	3	0	5	*) Perlu konfirmasi
2	Kab. Sorong	1	14	6	103	4	14	2	22	2	1	1	14	1	1	0	5	
3	Kab. Fakfak	4	14	10	86	5	4	2	9	0	2	1	3	0	0	0	3	
4	Kab. Kaimana	2	8	15	59	2	8	0	6	0	0	1	3	1	1	0	1	
5	Kab. Teluk Bintuni	2	4	12	57	1	8	10	13	0	1	4	10	0	1	0	0	
6	Kab. Teluk Wondama	0	4	3	45	0	2	1	11	0	0	0	3	0	0	1	1	
7	Kab. Sorong Selatan	0	12	10	58	0	6	1	10	0	0	0	4	0	1	0	2	
8	Kab. Raja Ampat	1	7	15	79	2	3	11	15	0	2	1	12	0	1	0	4	
9	Kab. Maybrat	0	3	5	48	0	3	2	7	0	2	0	1	0	0	0	1	
10	Kab. Tambrauw	0	1	12	40	0	1	2	11	0	0	0	5	0	0	0	3	
11	Kab. Manokwari Selatan	2	2	2	27	0	2	2	4	0	2	0	3	0	0	0	1	
12	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	6	51	0	0	0	13	0	0	0	6	0	0	0	2	
13	Kota Sorong	0	18	2	52	5	5	7	12	3	3	1	14	2	1	2	8	
Jumlah		16	105	108	783	23	66	43	153	8	15	10	87	4	9	3	36	

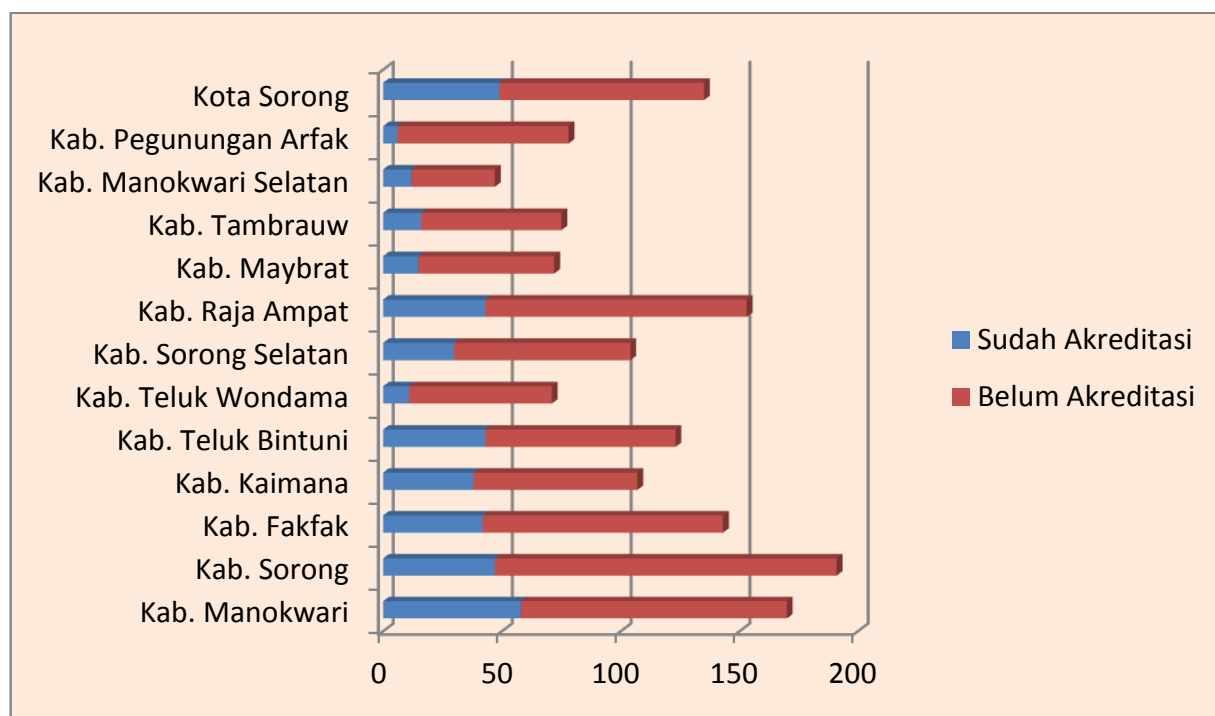
Data diolah dari jendela data Kemdikbud 2016

Gambar 9.
Status Akreditasi Seluruh Sekolah
di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Data diolah dari jendela data Kemdikbud, 2016

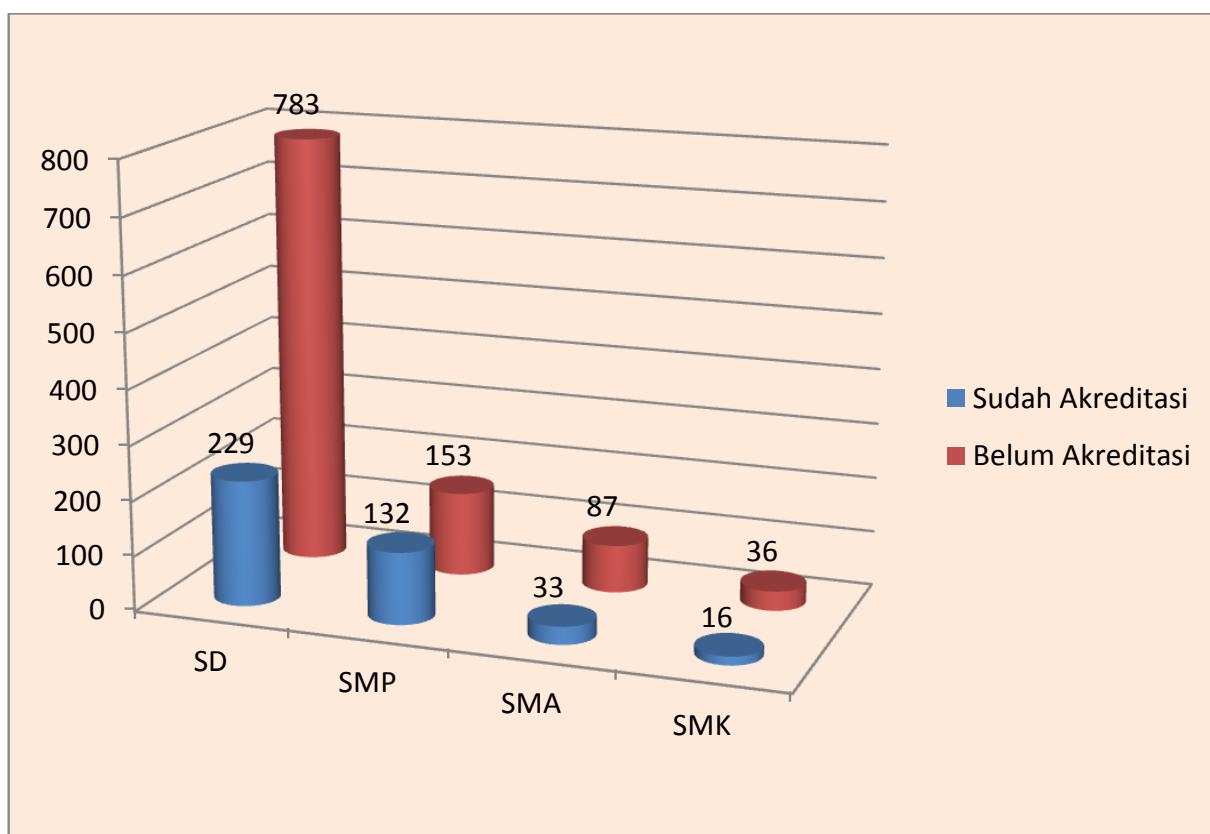
Gambar 10.
Grafik Status Akreditasi Sekolah Per-kabupaten/kota
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Data diolah dari jendela data Kemdikbud, 2016

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa masih banyak sekolah yang belum terakreditasi di Provinsi Papua Barat (72%), sedangkan sekolah yang sudah terakreditasi hanya mencapai 28%. Adapun predikat akreditasi sekolah yang diperoleh masih sedikit yang mencapai predikat A (sebagaimana tabel diatas). Sedangkan gambaran akreditasi sekolah di Provinsi Papua Barat per-jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut.

*Gambar 11.
Grafik Status Akreditasi Sekolah Per-jenjang
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016*



Data diolah dari jendela data Kemdikbud, 2016

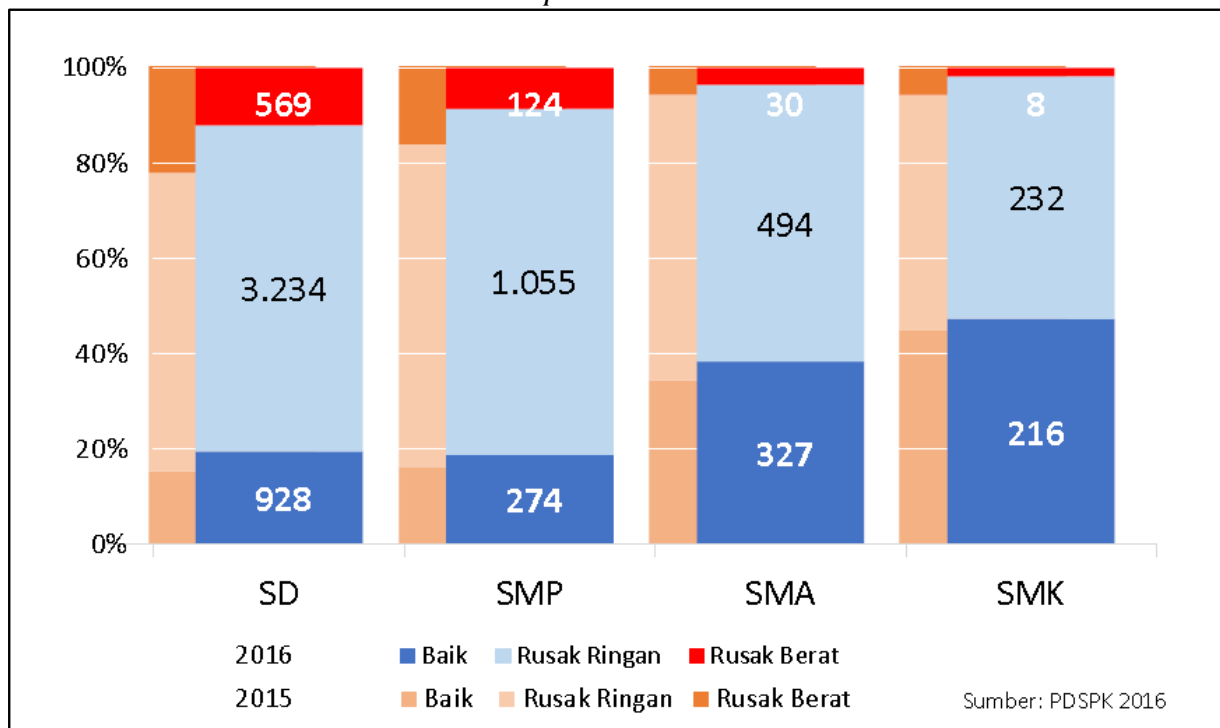
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jenjang sekolah SD yang belum terakreditasi yaitu berjumlah 783 sekolah atau sekitar 77% dari seluruh jumlah SD yang ada di Provinsi Papua Barat. Pada jenjang SMP di

Provinsi Papua Barat sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak 132 sekolah atau sekitar 46% dari jumlah seluruh SMP yang ada. Pada jenjang SMA terdapat 33 sekolah atau sekitar 28% dari seluruh SMA yang ada di Provinsi Papua Barat. Demikian juga untuk jenjang SMK, baru ada 16 sekolah atau sekitar 31% yang sudah terakreditasi dari seluruh SMK yang ada di Provinsi Papua Barat.

☞ Sarana Ruang Kelas Sekolah

Kondisi ruang kelas di satuan pendidikan untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebagaimana data di Data Pokok Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digambarkan sebagaimana ilustrasi berikut.

Gambar 12.
Kondisi Ruang Kelas Satuan Pendidikan
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat, 2016.

Guru dan Tenaga Kependidikan

Sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan adalah guru. Guru yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran di tingkat sekolah. Guru di Provinsi Papua Barat masih sangat kurang

Adapun jumlah guru yang ada di Provinsi Papua Barat sebagaimana data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai akhir tahun 2016 ada sebanyak 14.155 orang guru yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat. Data tersebut merupakan data guru yang mengajar di lingkungan pendidikan di bawah pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Persebaran guru perjenjang di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

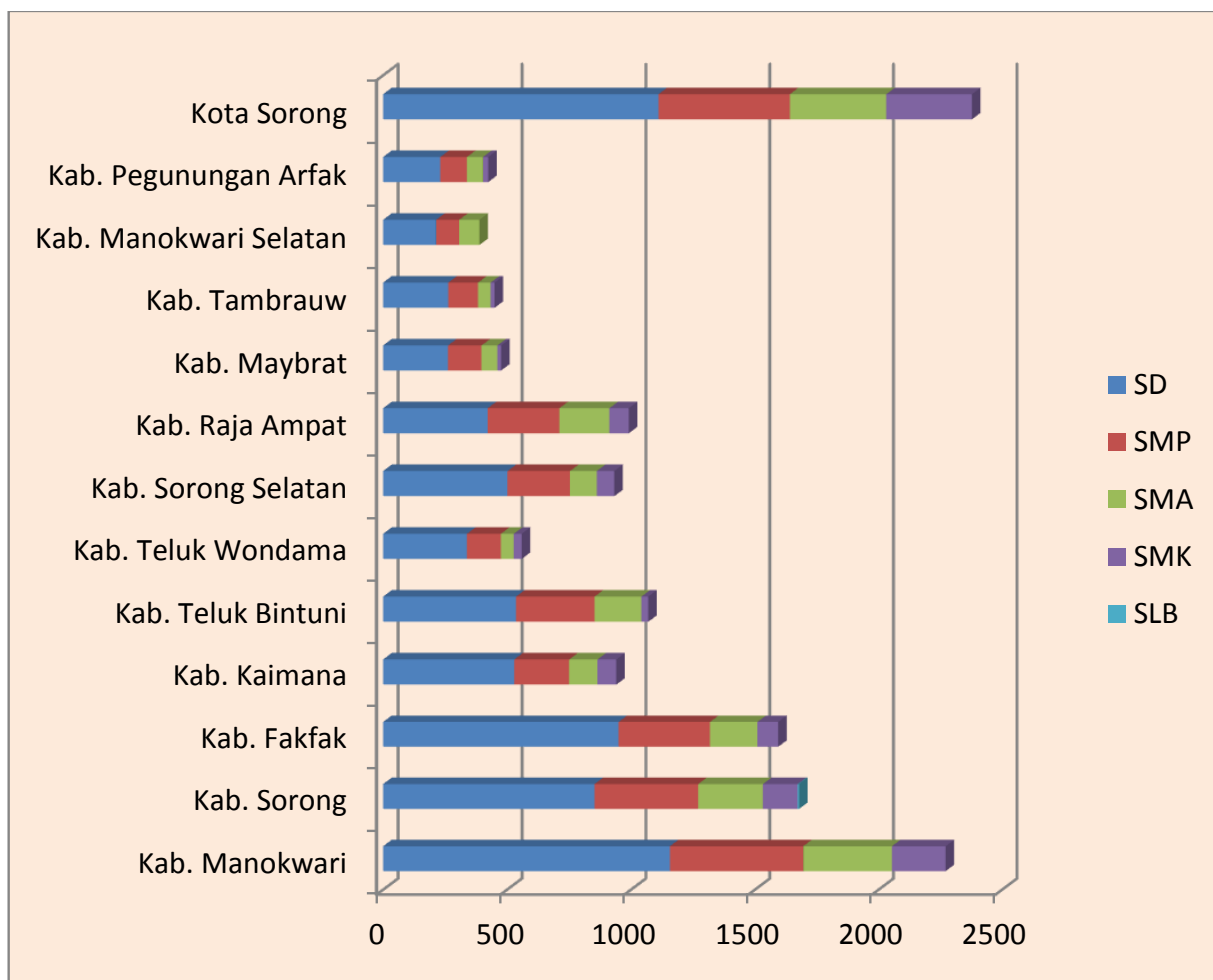
Tabel 11
Guru Pendidikan Dasar dan Menengah perjenjang tiap kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah					Jumlah	Ket.
		SD	SMP	SMA	SMK	SLB		
1.	Kab. Manokwari	1.157	538	359	218		2.272	
2.	Kab. Sorong	853	418	261	141	5	1.678	
3.	Kab. Fakfak	950	369	191	84		1.594	
4.	Kab. Kaimana	529	222	114	76		941	
5.	Kab. Teluk Bintuni	536	317	189	28		1.070	
6.	Kab. Teluk Wondama	338	137	52	32		559	
7.	Kab. Sorong Selatan	502	252	108	71		933	
8.	Kab. Raja Ampat	422	289	202	78		991	
9.	Kab. Maybrat	262	135	64	15		476	
10.	Kab. Tambrau	263	120	51	16		450	
11.	Kab. Manokwari Selatan	214	93	82			389	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	231	107	65	21		424	
13.	Kota Sorong	1.111	530	390	347		2.378	
Jumlah Perjenjang		7.368	3.527	2.128	368	5	14.155	

Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah banyak terdapat di 4 (empat) kabupaten yang sudah lama terbentuk, yaitu Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kab. Fakfak dan Kota Sorong. Kondisinya berbeda dengan jumlah guru yang ada di kabupaten pemekaran. Guru belum merata untuk di seluruh Provinsi Papua Barat, lebih banyak menumpuk di daerah yang ramai atau perkotaan. Untuk lebih jelas perbedaannya dapat kita lihat di gambar grafik berikut.

Gambar 13.
Grafik Guru Pendidikan Dasar dan Menengah per-kabupaten
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



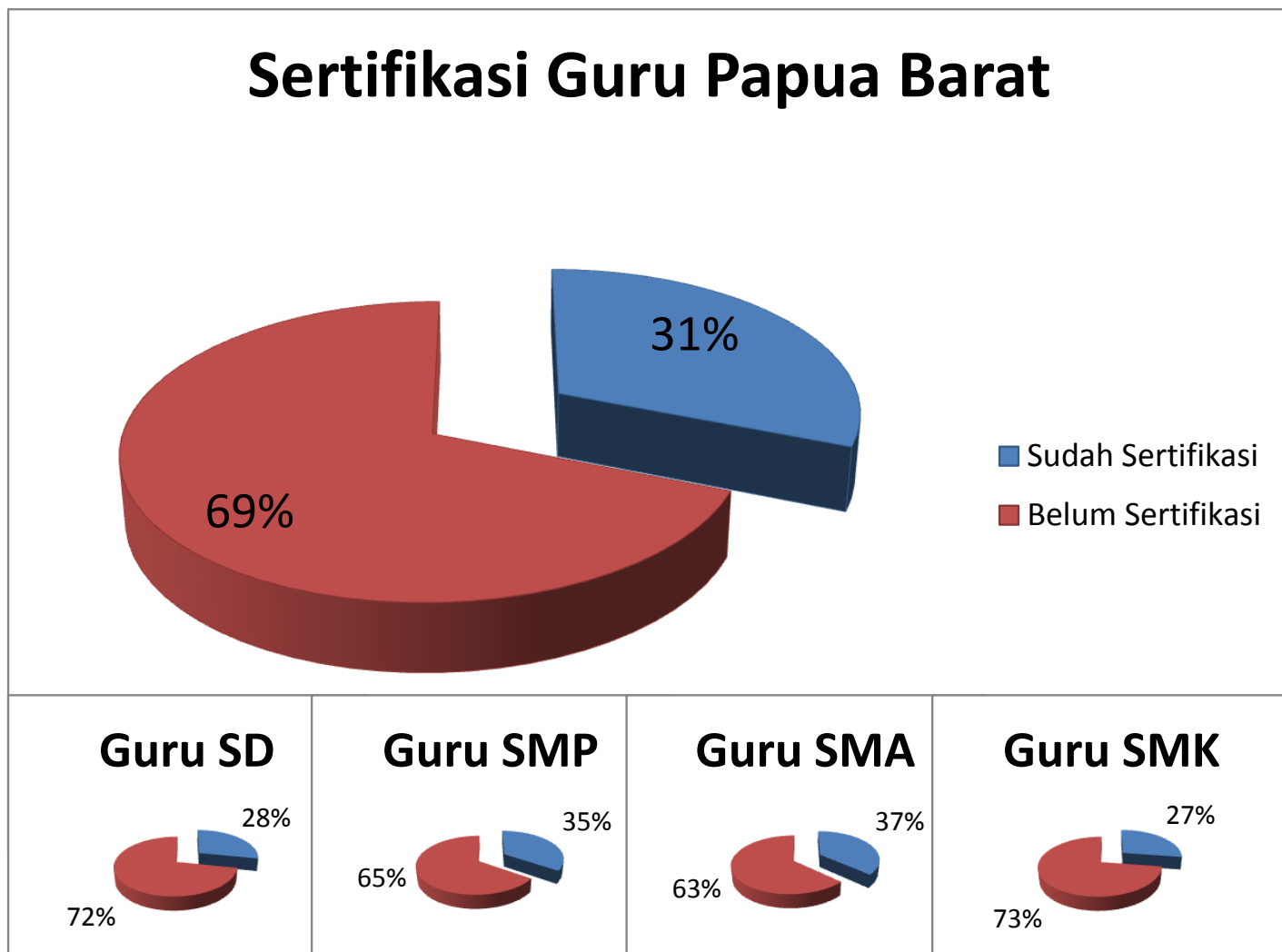
Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Dari gambaran di atas terlihat dengan jelas terkonsentrasinya guru hanya di kabupaten-kabupaten yang lebih dahulu terbentuk, sementara di daerah pemekaran masih mengeluhkan kekurangan guru. Seperti halnya di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak jumlah guru masih sedikit, bahkan guru yang berstatus PNS sangat minim. Pemerintah Daerah banyak mengangkat guru kontrak/honor daerah untuk memenuhi kebutuhan guru. Belum lagi daerah pemekaran yang rata-rata daerahnya susah dijangkau karena kondisi geografis yang sulit.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai guru yang profesional seorang guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur berdasarkan undang-undang. Seorang guru harus memiliki 4 (empat) kompetensi sebagai guru profesional. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional didapat melalui pendidikan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai guru profesional. Salah satu syarat untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru harus bersertifikat pendidik (sertifikasi guru).

Kondisi guru pendidikan dasar dan menengah yang sudah bersertifikasi sebagai guru di Provinsi Papua Barat juga masih jauh dari ideal. Masih banyak daerah yang banyak memiliki guru belum bersertifikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik kondisi sertifikasi guru di Provinsi Papua Barat berikut ini.

Gambar 14.
Grafik Prosentase Guru Bersertifikasi Perjenjang Pendidikan
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Berdasarkan grafik di atas, guru di Provinsi Papua yang sudah bersertifikat pendidik hanya berkisar 31% dari total guru yang mengajar. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, Guru SMA memiliki prosentase yang terbesar guru bersertifikat pendidik (37% dari seluruh guru SMA), disusul dengan Guru SMP, Guru SD dan yang memiliki prosentase terkecil adalah Guru SMK (27%).

Tabel 12
Jumlah Guru Bersertifikasi Perjenjang Pendidikan
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kab/Kota	Guru SD		Guru SMP		Guru SMA		Guru SMK		Jumlah	Keterangan
		Sdh Sert.	Blm Sert.	Sdh Sert.	Blm Sert.	Sdh Sert.	Blm Sert.	Sdh Sert.	Blm Sert.		
1.	Kab. Manokwari	405	752	231	307	176	183	84	134	2.272	
2.	Kab. Sorong	438	415	197	221	115	146	28	113	1.678	
3.	Kab. Fakfak	265	685	128	241	82	109	27	57	1.594	
4.	Kab. Kaimana	162	367	81	141	33	81	14	62	941	
5.	Kab. Teluk Bintuni	62	474	67	250	35	154	7	21	1.070	
6.	Kab. Teluk Wondama	32	306	16	121	12	40	1	31	559	
7.	Kab. Sorong Selatan	84	418	55	197	33	75	11	60	933	
8.	Kab. Raja Ampat	64	358	88	201	62	140	14	64	991	
9.	Kab. Maybrat	85	177	45	90	19	45	4	11	476	
10.	Kab. Tambora	31	232	17	103	5	46	3	13	450	
11.	Kab. Manokwari Selatan	33	181	32	61	32	50			389	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	25	206	11	96	6	59		21	424	
13.	Kota Sorong	392	719	252	278	172	218	116	231	2.378	
Jumlah		2.078	5.290	1.220	2.307	782	1.346	309	818	14.155	

Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa masih banyak guru mengajar di Provinsi Papua Barat yang belum bersertifikat pendidik. Guru SD yang belum memiliki sertifikat pendidik sejumlah 5.290 guru atau sebanyak 72% dari jumlah guru SD di Provinsi Papua Barat. Adapun jumlah guru SMP yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 2.307 orang guru atau sebanyak 65% dari seluruh guru SMP yang mengajar di Provinsi Papua Barat. Prosentase terkecil guru belum memiliki sertifikat pendidik berada di guru jenjang SMA yaitu 63% dari seluruh guru SMA yang mengajar di Provinsi Papua Barat. Adapun jumlah guru SMA yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 1.346 orang guru. Jumlah guru yang paling sedikit adalah yang mengajar di jenjang SMK, sebanding dengan jumlah SMK yang masih sedikit di Provinsi Papua Barat. Guru SMK yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 818 orang guru atau berkisar 73% dari seluruh guru SMK yang mengajar di Provinsi Papua Barat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap guru yang mengajar harus memiliki sertifikat pendidik untuk dapat diakui sebagai pendidik yang profesional dan berhak menerima tunjangan profesi sebagai guru. Upaya pemerintah dalam memenuhi salah satu syarat menjadi guru profesional yaitu dengan program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru mulai dilaksanakan sejak tahun 2006. Sertifikasi guru dilaksanakan dengan beberapa pola. Bagi guru-guru banyak memiliki penghargaan dan prestasi dapat menempuh pola Portofolio. Pola yang lain yaitu mengikuti program diklat PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) atau menempuh jalur PPG (Pendidikan Profesi Guru).

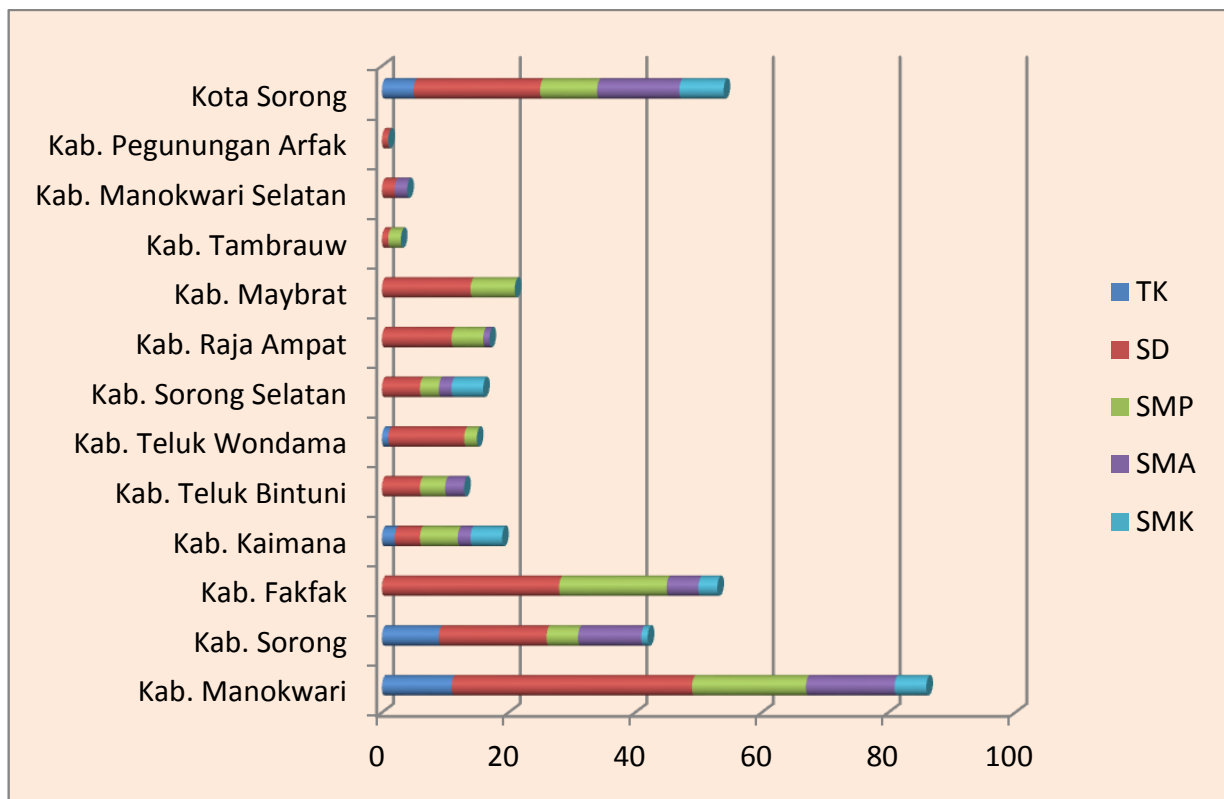
Pada tahun 2016 sertifikasi guru di Provinsi Papua Barat seluruhnya dilakukan dengan pola PLPG. Walaupun pada awalnya direncanakan sebagian melalui pola PPGj (Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan), namun untuk tahun 2016 diputuskan semuanya menempuh pola PLPG. Adapun jumlah guru di Provinsi Papua Barat yang mengikuti program sertifikasi guru pada tahun 2016 sebanyak 344 orang guru. Guru yang mengikuti program sertifikasi guru pola PLPG untuk tahun 2016 di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13
Peserta Sertifikasi Guru Pola PLPG Provinsi Papua Barat
Tahun 2016

No	Kab/Kota	Peserta Sertifikasi Guru					Jumlah	Ket
		TK	SD	SMP	SMA	SMK		
1.	Kab. Manokwari	11	38	18	14	5	86	
2.	Kab. Sorong	9	17	5	10	1	42	
3.	Kab. Fakfak	0	28	17	5	3	53	
4.	Kab. Kaimana	2	4	6	2	5	19	
5.	Kab. Teluk Bintuni	0	6	4	3	0	13	
6.	Kab. Teluk Wondama	1	12	2	0	0	15	
7.	Kab. Sorong Selatan	0	6	3	2	5	16	
8.	Kab. Raja Ampat	0	11	5	1	0	17	
9.	Kab. Maybrat	0	14	7	0	0	21	
10.	Kab. Tambrauw	0	1	2	0	0	3	
11.	Kab. Manokwari Selatan	0	2	0	2	0	4	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	0	1	0	0	0	1	
13.	Kota Sorong	5	20	9	13	7	54	
Jumlah		28	160	78	52	26	344	

Sumber: Data diolah dari sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg, Tahun 2016

Gambar 15.
Grafik Peserta Sertifikasi Guru Provinsi Papua Barat
Tahun 2016



Sumber: Data diolah dari sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg, Tahun 2016

Berdasarkan paparan data dan ilustrasi grafik di atas, terlihat bahwa persebaran peserta sertifikasi guru tahun 2016 untuk Provinsi Papua Barat tidak merata. Ada beberapa daerah yang memiliki peserta sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena untuk tahun 2016, seleksi sebagai peserta sertifikasi guru sudah lebih diperketat. Guru yang berhak untuk mengikuti sertifikasi guru hanya guru yang pada akhir tahun 2015 mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG). Bagi guru yang telah menjadi guru sebelum akhir Desember 2005 dapat langsung menjadi peserta sertifikasi guru dengan pola PLPG, sedangkan guru yang mulai jadi guru setelah akhir Desember 2005, untuk dapat menjadi peserta sertifikasi guru pola PLPG harus memiliki nilai UKG di atas 60. Peserta sertifikasi guru pola PLPG

tahun 2016 ditetapkan berdasarkan kuota dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk Provinsi Papua Barat sebanyak 344 peserta.

Bidang studi sertifikasi guru bagi guru-guru peserta dari Provinsi Papua Barat pun beragam, walaupun didominasi oleh guru SD. Untuk guru SD dan beberapa mata pelajaran sertifikasi guru pola PLPG dilaksanakan di Rayon 131 Universitas Cenderawasih Jayapura. Mata pelajaran yang lain dilaksanakan di beberapa universitas di luar Papua dan Papua Barat. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 14
Perguruan Tinggi Penyelenggara PLPG bagi Peserta Sertifikasi Guru
dari Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Penyelenggara PLPG	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Rayon 131 Universitas Cenderawasih	304	
2.	Rayon 124 Universitas Negeri Makassar	37	
3.	Rayon 109 Universitas Negeri Jakarta	2	
4.	Rayon 113 Universitas Sebelas Maret	1	
Jumlah		344	

Sumber: Data diolah dari sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg, Tahun 2016

Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah

Jumlah peserta didik pendidikan dasar dan menengah sampai dengan akhir tahun 2016 di Provinsi Papua Barat berdasarkan data Dapodik ada 218.063 peserta didik. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15
Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

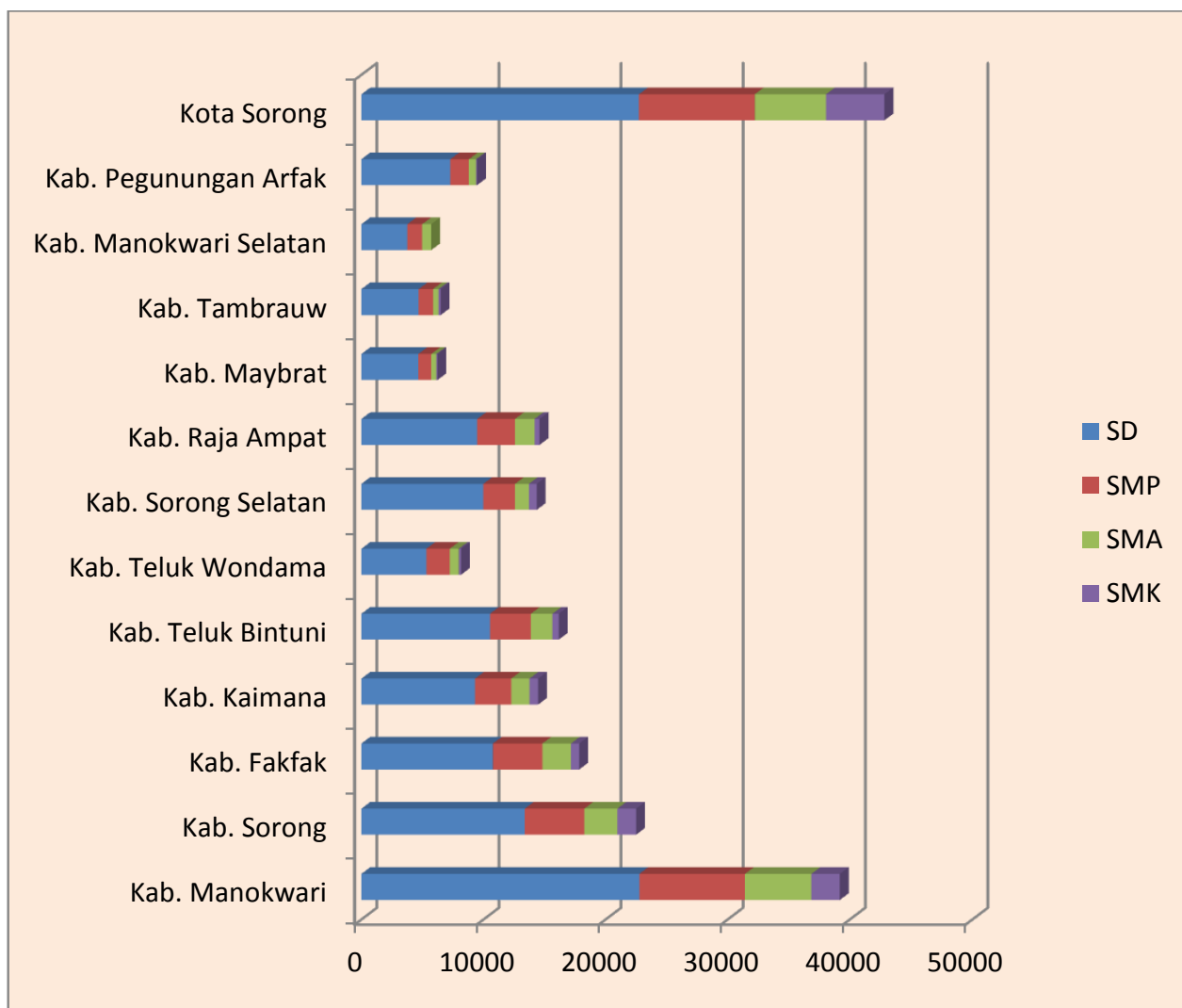
No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Jumlah	Ket.
		SD	SMP	SMA	SMK		
1.	Kab. Manokwari	22.765	8.659	5.439	2.330	39.193	
2.	Kab. Sorong	13.379	4.875	2.711	1.537	22.502	
3.	Kab. Fakfak	10.770	4.051	2.346	670	17.837	
4.	Kab. Kaimana	9.309	2.961	1.497	715	14.482	
5.	Kab. Teluk Bintuni	10.532	3.355	1.766	514	16.167	
6.	Kab. Teluk Wondama	5.316	1.917	743	185	8.161	
7.	Kab. Sorong Selatan	9.990	2.596	1.138	645	14.369	
8.	Kab. Raja Ampat	9.490	3.099	1.597	413	14.599	
9.	Kab. Maybrat	4.664	1.058	422	91	6.235	
10.	Kab. Tambrau	4.695	1.174	454	170	6.493	
11.	Kab. Manokwari Selatan	3.767	1.212	742		5.721	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	7.286	1.518	589	80	9.473	
13.	Kota Sorong	22.735	9.487	5.834	4.775	42.831	
Jumlah		134.698	45.962	25.278	12.125	218.063	

Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Data pada tabel diatas menggambarkan kondisi peserta didik pendidikan dasar dan menengah yang ada di Provinsi Papua Barat. Terlihat bahwa jumlah peserta didik paling banyak berada di Kota Sorong dan disusul dari Kabupaten Manokwari. Sedangkan peserta didik yang paling sedikit ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sulitnya akses dan

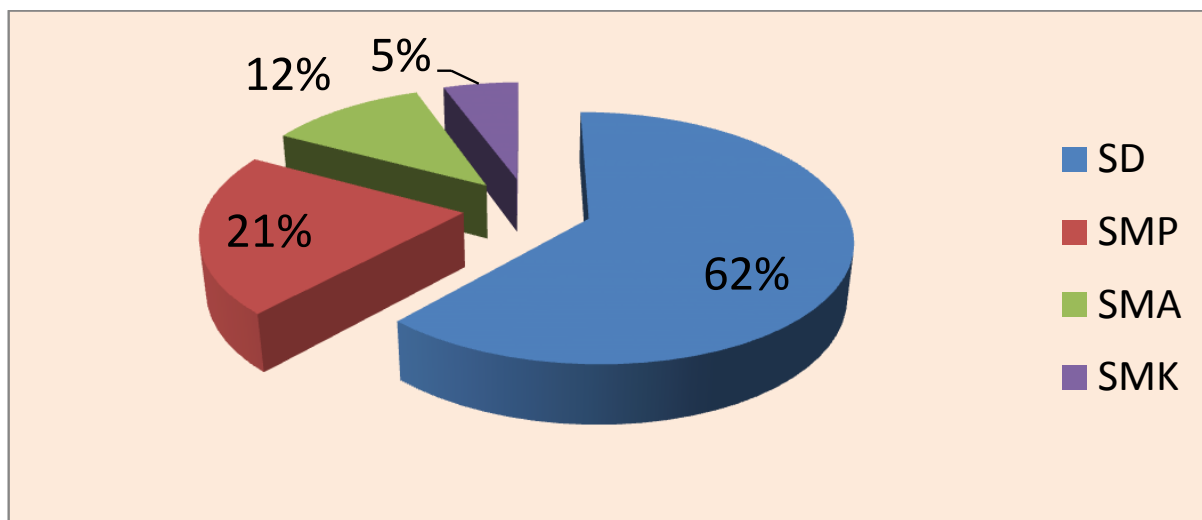
kondisi geografis juga ikut menentukan jumlah peserta didik yang bersekolah di Provinsi Papua Barat. Peserta didik kebanyakan ada di wilayah kabupaten/kota yang sudah lama ada, dan sedikit di daerah pemekaran kabupaten baru. Untuk lebih jelas melihat persebaran dan perbandingan jumlah peserta didik per jenjang di tiap kabupaten dapat dilihat pada ilustrasi grafik berikut.

Gambar 16.
Grafik Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah
Per-jenjang dan Per-kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Gambar 17.
Grafik Perbandingan Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah
Per-jenjang di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Sumber : Data diolah dari Dapodik Kemdikbud, 2016

Rasio Pendidikan di Provinsi Papua Barat

Rasio antara jumlah rombongan belajar dan jumlah guru dengan jumlah peserta didik di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16
Rasio Jumlah Rombongan Belajar dan Guru Terhadap Jumlah Peserta Didik di
Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Rasio	Jenjang				Ket
		SD	SMP	SMA	SMK	
1.	Rombel : Peserta Didik	1 : 20	1 : 25	1 : 23	1 : 21	
2.	Guru : Peserta Didik	1 : 21	1 : 15	1 : 12	1 : 11	

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat, Kemdikbud 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata rasio antara rombongan belajar dengan peserta didik di Provinsi Papua Barat masih belum melebihi batas yang telah ditetapkan. Sedangkan rata-rata rasio antara guru dengan peserta didik juga masih di bawah batas yang telah ditetapkan.

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

Latar Belakang Pemetaan Mutu Pendidikan

Sudah cukup lama kita melakukan pembangunan pendidikan dengan fokus pada perluasan akses. Beberapa kemajuan telah kita capai terkait perluasan akses, khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya fokus utama sudah harus bergeser pada peningkatan mutu sambil terus membenahi akses, khususnya untuk daerah-daerah yang akses pendidikannya masih bermasalah.

Membangun pendidikan berorientasi mutu bagi bangsa Indonesia, selain merupakan amanat konstitusi, juga menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi tuntutan global yang mensyaratkan tampil dan berperannya manusia-manusia berkualitas serta mampu menunjukkan eksistensi dan integrasinya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di kancah internasional. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga mesti berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman.

Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk memenuhinya?

Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Sesungguhnya kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini telah terprogramkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kebijakan ini tercantum secara eksplisit. Target peningkatan mutu pendidikan dalam RPJMN 2015-2019 diukur dengan proporsi sekolah yang dapat mencapai akreditasi minimal B dan presentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya. Target-targetnya adalah sebagai berikut:

- Persentase sekolah terakreditasi minimal B Tahun 2015-2019: SD: 75%, SMP: 70%, SMA: 85% dan Paket keahlian SMK :65%
- Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitas-nya berdasarkan SNP sebesar 95%

Peningkatan mutu pendidikan tidak akan banyak berarti jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas sekolah, sedangkan pemerintah pusat dan daerah

bertugas memfasilitasi peningkatan mutu sekolah. Beberapa peraturan pemerintah sebagai turunannya juga mengamanatkan hal yang sama yaitu satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan baik tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi maupun pusat.

Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan di sekolah akan memastikan bahwa pengelolaan sekolah, proses pembelajaran dan program-program lainnya dijalankan dengan standar mutu tertentu.

Pertanyaannya, apakah sekolah telah melakukannya?

Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar sekolah baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah belum melaksanakan penjaminan mutu baik untuk pengelolaan maupun untuk pembelajaran. Belum dilaksanakannya penjaminan mutu pendidikan ini disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman/ kesadaran sekolah tentang pentingnya mutu pendidikan yang sedang mereka jalankan. Mutu pendidikan ini mencakup:

- Mutu pengelolaan sekolah
- Mutu pembelajaran yang dilaksanakan
- Mutu proses pembentukan karakter peserta didik

Peningkatan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara

utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Rincian Masalah Kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan di Papua Barat

Secara umum, permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat ketika mengadakan kegiatan pemetaan dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Faktor Internal (di daerah):

- Kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau di beberapa tempat terutama di daerah kabupaten pemekaran.
- Minimnya transportasi dan mahalnya biaya transportasi untuk mencapai satuan pendidikan yang terletak di daerah pedalaman.
- Akses informasi dan komunikasi yang masih terbatas, terutama di beberapa daerah pemekaran.
- Pembiayaan yang terbatas, sehingga pendanaan harus benar-benar disesuaikan dengan prioritas kebutuhan.
- Bentuk koordinasi dan kerjasama yang belum optimal antara LPMP Papua Barat dengan Dinas Kabupaten Kota dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama Pengawas dan juga Operator di satuan pendidikan yang belum merata dan optimal dalam melakukan kegiatan pemetaan.

- Waktu pelaksanaan proses pemetaan dari awal sampai akhir yang sedikit terlambat karena fokus kegiatan menunggu berakhirnya kegiatan kurikulum secara Nasional.

2. Faktor Eksternal (dari Pusat):

- Lambatnya publikasi Aplikasi yang baru dari Pusat.
- Lambatnya proses update aplikasi dalam mengatasi berbagai permasalahan pemrosesan pengiriman data di daerah.
- Pendanaan yang terbatas, karena pemotongan anggaran di Pusat, sehingga target dan sasaran pemetaan diubah dan disesuaikan ulang dengan kegiatan, proses dan target sasaran pemetaan.

Pemetaan Mutu Pendidikan

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan yang diukur dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan ini terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) antara lain :

- 1.) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- 2.) Standar Isi
- 3.) Standar Proses
- 4.) Standar Penilaian Pendidikan
- 5.) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- 6.) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 7.) Standar Pengelolaan Pendidikan
- 8.) Standar Pembiayaan

Dari keseluruhan 8 SNP, baru 5 SNP yang datanya terpetakan yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian Pendidikan, dan (5) Standar Pengelolaan Pendidikan. Sedangkan 3 SNP lainnya; yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Sarana dan Prasarana (SarPras) Pendidikan dan Standar Pembiayaan masih diproses data mutunya karena sumber datanya berasal dari data DAPODIK.

Tiap-tiap standar yang dipetakan, mewakili indikator-indikator dan subindikator – subindikator yang tersurat dalam butir-butir instrumen yang ditanyakan kepada responden. Berbagai pertanyaan yang ada dalam instrumen pemetaan merupakan jabaran dari standar mutu pendidikan berdasarkan Standar Mutu pendidikan yang telah diatur oleh perundangan yang berlaku.

Data yang dihimpun dari tiap satuan pendidikan, dilakukan melalui pengisian Instrumen pendataan pemetaan mutu (Evaluasi Diri Sekolah) yang diisi oleh 5 jenis responden yang terkait dengan Sekolah antara lain;

- a. Responden Kepala Sekolah
- b. Responden PTK (Guru)
- c. Responden Siswa
- d. Responden Pengawas
- e. Responden Komite Sekolah

Pada jenjang SD, data diperoleh dari sampel data responden sebanyak 6 guru yang diambil dari 1 orang perwakilan guru per jenjang

kelas 1 s.d. 6 sedangkan responden siswa kelas 4-6 sebanyak 30 siswa. Pada jenjang SMP, jumlah responden Guru diperoleh dari perwakilan guru per bidang studi dan responden siswa sebanyak 30 siswa. Sedangkan pada tingkat SMA dan SMK, data responden Guru yang diambil sebanyak guru yang mewakili tiap satu bidang studi, serta responden siswa yang diambil sampelnya sebanyak 30 siswa per sekolah.

2. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Rangkaian Proses Pemetaan

Berbagai proses yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir proses pemetaan baik di Pusat maupun di daerah yang melibatkan SDM LPMP Papua Barat dan Dinas Pendidikan di daerah dapat digambarkan seperti berikut ini:

1) Pelatihan Fasilitator Nasional

Kegiatan Pelatihan Fasilitator Nasional (FasNas) yang dilakukan secara Nasional oleh Satgas Pusat PMP Dikasmen, dihadiri oleh perwakilan 34 LPMP dari seluruh Provinsi di Indonesia. Pelatihan Fasnas ini diikuti oleh 4 (empat) orang dari LPMP Papua Barat. Fasnas dibekali informasi dan pelatihan dari Satuan Tugas PMP Dikdasmen. Kegiatan Fasnas dilaksanakan di Hotel Amarosa Grande, Bekasi – Jawa Barat pada tgl. 30 Mei 2016 s.d. 1 Juni 2016. Tugas Fasnas adalah untuk memberikan informasi dan melatih Fasilitator Daerah (Fasda) agar dapat melatih di daerah.

2) Pelatihan Fasilitator Daerah

Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda) dilakukan pada di lingkungan

LPMP Papua Barat dengan melibatkan 11 pegawai LPMP Papua Barat yang dibekali dan diberikan pelatihan untuk menjadi Fasda. Pelatihan dilaksanakan di kantor LPMP Papua Barat tgl. 19 – 20 Agustus 2016.



Gambar 18. Pelatihan Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu

3) Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan

Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu satuan pendidikan di Papua Barat, dilaksanakan di 2 (dua) titik; yakni di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari dilakukan pada tgl. 6 – 8 Oktober 2016 di Hotel Mariat Sorong dan tgl. 5 - 7 Oktober 2016 di Hotel Billy Jaya Manokwari; Pelatihan ini dihadiri oleh total 104 Pengawas dan 26 operator sekolah se-Papua Barat.



Gambar 19. Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan di Manokwari



Gambar 20. Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan di Kota Sorong

4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemetaan

Proses Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh LPMP Papua Barat untuk mengevaluasi kegiatan pemetaan di dinas pendidikan Kabupaten/Kota oleh Pengawas. Kegiatan ini melibatkan 26 petugas LPMP Papua Barat yang tinjauan langsung ke beberapa

satuan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota di Papua Barat. Kegiatan Monev ini dilaksanakan pada 9 - 12 November 2016.

5) Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan.

Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan dilakukan oleh petugas LPMP Papua Barat sejumlah 13 orang yang mengunjungi ke Dinas Kabupaten/Kota se-Papua Barat dengan membawa dan menyajikan data kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 s.d. 11 Februari 2017.

3. Aplikasi PMP dan Laman PMP Dikdasmen

Aplikasi PMP yang digunakan di setiap satuan pendidikan oleh operator sekolah adalah aplikasi “pendamping” dari aplikasi DAPODIK. Karena data Aplikasi PMP diambil/disadur dari Data Dapodik. Operator Dapodik sekaligus menjadi Operator PMP di sekolah.



Gambar Tampilan Aplikasi Dapodik



Gambar Tampilan Aplikasi PMP

Gambar 21. Tampilan Aplikasi Dapodik dan PMP

Data Dokumen Instrumen Pemetaan yang telah diisi oleh responden dan telah diperiksa oleh Tim PMP Sekolah dan Pengawas, diisikan ke aplikasi oleh operator sekolah/petugas pemetaan. Di beberapa sekolah yang sudah memiliki laboratorium komputer yang memadai, pengisian data instrumen dilakukan langsung ke aplikasi PMP oleh responden dengan menggunakan jaringan lokal (LAN/Wireless LAN).

SD NEGERI 1 JANTURAN
Kirim Data PMP Terakhir : 25 Oct 2016 09:01:19

Beranda / Pengiriman / Prop. D.I. Yogyakarta / Kab. Kulon Progo / Kec. Pengasih / SD NEGERI 1 JANTURAN

Kelengkapan Responden

No	Jenis	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1
2.	Peserta Didik	30
3.	Guru	6
4.	Komite	3
5.	Pengawas	1
Total		41

*Data diatas adalah jumlah responden yang sudah mengisi kuesioner

Status Pengiriman Data

Belum Kirim : Belum pernah kirim data

Diterima Server : Data masuk ke server

Sedang Diproses : Data PMP sedang diproses dalam antrian

Ulangan : Data PMP dikirim berulang kali, yang diproses hanya data pengiriman terakhir

Semua jenis responden sudah mengisi kuesioner PMP. Terima kasih.

Profil Sekolah | Log Pengiriman

Kepengawasan

Sekolah ini diawasi oleh :

Nama : Kamari
NIP : 196203161982011002
NUPTK : 9648740641200012

Basic Info

NPSN : 20403130
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SD
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 125/KPTS/1941

Kontak

Alamat : Pengasih Kp, RT/RW 37/19, Dsn. Jombakan, Ds./Kel. Tavangsari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta
Kode Pos : 55652
Telepon : (0274)647233
Fax : -
Email : sdn1janturan@yahoo.co.id
Website :

[Lihat profil Dapodik selengkapnya >](#)

Gambar 22. Tampilan Laman web PMP Progres Pengiriman

Data yang telah selesai diisi dengan lengkap dapat dikirim ke server Pusat dan dapat dimonitoring hasilnya di laman web PMP pusat (laman: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres>). Hasil pengiriman yang sukses/tidak sukses diterima oleh server akan ditandai dan diketahui oleh operator sekolah bahwa data yang dikirim sukses/tidak sukses dikirim.

4. Sasaran Pemetaan

Pada tahun 2016, sasaran target pemetaan mutu pendidikan sebanyak 50% dari jumlah sekolah di Papua Barat. Sekolah Sasaran pemetaan di Provinsi Papua Barat sebanyak **689** sekolah dari Total **1.479** sekolah. Itu berarti pemetaan yang dilakukan baru mencapai **46,59%** dari total jumlah sekolah di Papua Barat.

- **Jenjang SD**

Jumlah sekolah sasaran pemetaan jenjang SD di Papua Barat adalah sebanyak **410** sekolah dari total jumlah **1.019** sekolah jenjang SD di Papua Barat.

- **Jenjang SMP**

Jumlah sekolah jenjang sasaran pemetaan adalah sebanyak **163** sekolah dari total jumlah **287** sekolah jenjang SMP di Papua Barat

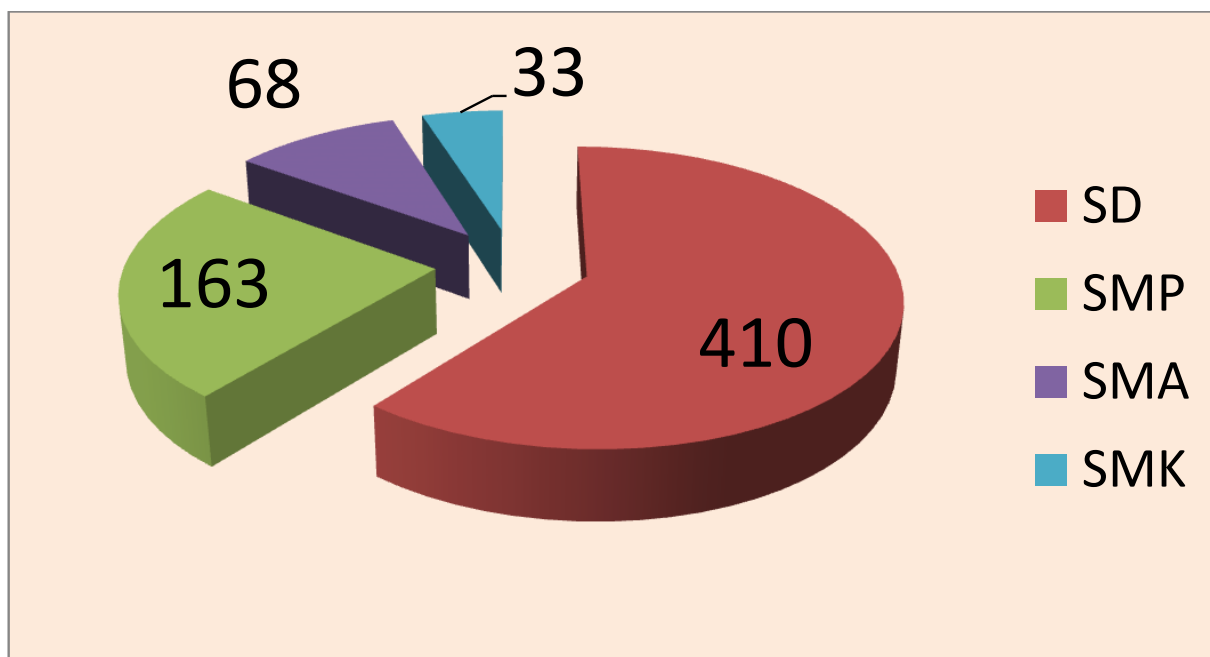
- **Jenjang SMA**

Jumlah sekolah sasaran pemetaan Jenjang SMA di Papua Barat adalah sebanyak **68** sekolah dari total jumlah **120** sekolah jenjang SMA di Papua Barat.

- **Jenjang SMK**

Jumlah sekolah sasaran pemetaan Jenjang SMK di Papua Barat adalah sebanyak **33** sekolah dari total jumlah **52** sekolah jenjang SMK di Papua Barat.

Gambar 23
Perbandingan Sekolah Sasaran Pemetaan Berdasarkan Jenjang di Provinsi
Papua Barat Tahun 2016



5. Proses Pengisian Data

Proses pengisian data instrumen oleh responden di sekolah dilakukan dalam dua tahapan pengisian, yaitu;

1. Pengisian dokumen instrumen pendataan yang kemudian diverifikasi dan diperiksa oleh Tim Penjaminan Mutu Sekolah.
Data yang telah diverifikasi/periksa oleh Tim PMP Sekolah akan divalidasi oleh Pengawas Sekolah. Untuk kemudian diserahkan kepada operator sekolah untuk diinput ke dalam Aplikasi PMP.
2. Pengisian data ke dalam aplikasi PMP oleh operator Sekolah atau bisa dilakukan oleh responden langsung ke dalam aplikasi PMP dengan pantauan dari Tim Penjaminan Mutu Sekolah dan atau Pengawas Sekolah.

6. Proses Pengiriman Data

Proses pengiriman data ini sebenarnya terbagi dalam dua bagian penting yakni;

- (1) Proses pengiriman Data dari Aplikasi PMP Sekolah.
- (2) Proses Penerimaan Data oleh server Pusat

Data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi PMP secara offline, dapat dikirim ke server pusat jika data yang diisikan telah lengkap. Pengiriman data melalui aplikasi dilakukan secara *online* dengan menggunakan koneksi Internet. Pengiriman data tidak serta merta berhasil dilakukan jika belum ada tanda berhasil kirim di tampilan aplikasi PMP Sekolah. Data yang telah berhasil masuk antrian di server PMP Pusat maka data tersebut telah berhasil dikirim dari sisi Aplikasi PMP Sekolah. Data yang sudah terkirim pun belum tentu dapat diterima oleh server pusat pada saat itu juga, tapi terjadi antrian data di server pusat karena banyaknya jumlah data yang masuk ke server pusat. Karena banyaknya data yang masuk ke server pusat, maka rata-rata data baru bisa dikonfirmasi setelah 2-3 hari di laman pmp pusat (<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>).

7. Validitas Data

Masalah validitas data menjadi sebuah masalah yang penting dalam pemetaan mutu pendidikan, dimana peran pengawas sangat penting sebagai ujung tombak pemetaan mutu di satuan pendidikan. Data pemetaan (instrumen) yang tidak diisikan oleh responden pengawas di satuan pendidikan berakibat pada tidak validnya data yang dikirim ke

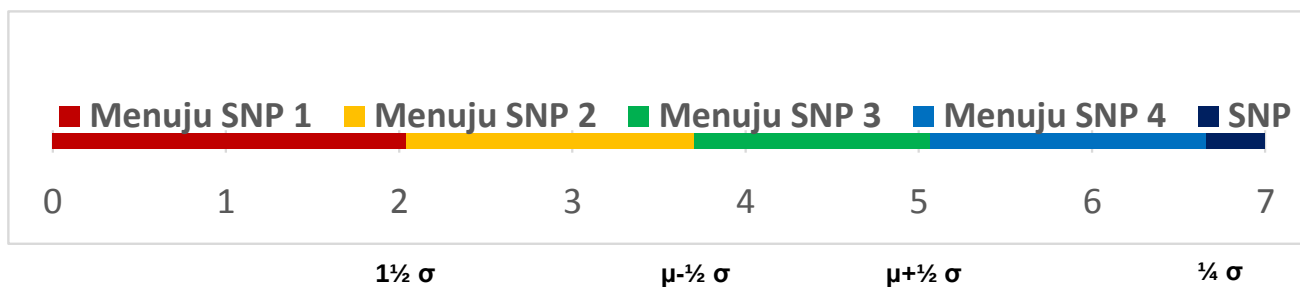
pusat. Hal ini menyebabkan tidak terprosesnya proses analisis data peta mutu di pusat karena data dianggap kurang valid. Jadi, meskipun 4 jenis responden mengisi instrumen pemetaan dengan jumlah responden yang lengkap (yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite), tapi jika responden pengawas tidak mengisi instrumen maka data mutu sekolah tersebut dianggap tidak valid, sehingga proses pemetaannya tidak dilakukan di Pusat.

8. Analisis Data Peta Mutu

Proses analisis data mutu dilakukan di pusat oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Penjaminan Mutu Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) dengan sebuah mekanisme khusus dan terprogram. Data Instrumen pemetaan diolah menjadi nilai sub indikator dan indikator, yang akhirnya menjadi nilai standar dari delapan standar nasional pendidikan. Hasil data olahan tersebut kemudian disajikan oleh LPMP menjadi data yang dapat tersaji di hadapan para pemangku kepentingan di daerah.

9. Hasil Peta Mutu

Hasil Peta Mutu pendidikan menggambarkan kondisi mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan di level satuan pendidikan (sekolah), tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional. Nilai Mutu disusun dengan pendekatan Skala Likert dengan rentang nilai seperti yang tergambar berikut ini :



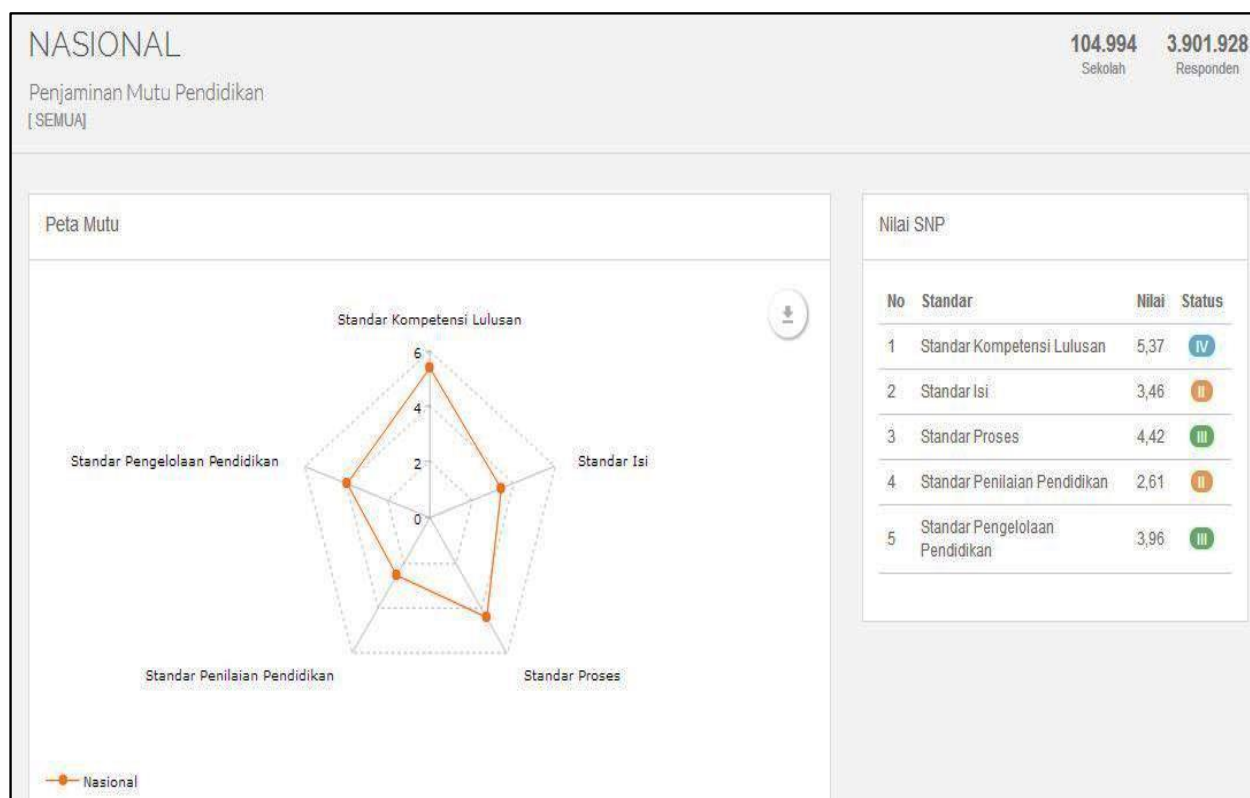
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0,00	2,04
Menuju SNP 2	2,04	3,70
Menuju SNP 3	3,70	5,06
Menuju SNP 4	5,06	6,66
SNP	6,66	7,00

Rentang kategori capaian SNP ditetapkan dengan menggunakan fungsi standar deviasi

Gambar 24. Rentang Nilai Kategori Pencapaian SNP Berdsarakan Skala Likert

☞ Sekilas Data SNP secara Nasional

Sebelum melihat data peta mutu SNP Provinsi Papua Barat, berikut gambaran peta mutu 5 SNP secara nasional;



Gambar 25. Peta Mutu Standar Nasional Pendidikan tingkat Nasional.

Dari data pada gambar di atas, diketahui bahwa jumlah sekolah yang berhasil terpetakan sebanyak **104.994** sekolah dengan jumlah responden sebanyak **3.901.928** responden se-Indonesia. Jumlah yang terpetakan ini masih jauh dari jumlah total sekolah yang ada yakni **216.235** Sekolah (sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>) dengan jumlah sekolah yang mengirim data mutu pemetaan sekolah ke pusat sebesar

166.308 sekolah. Itu berarti masih ada sejumlah **61.314** sekolah yang belum selesai proses pemetaannya hingga saat ini.

Gambaran Peta Mutu Nasional terlihat dari tabel berikut ini;

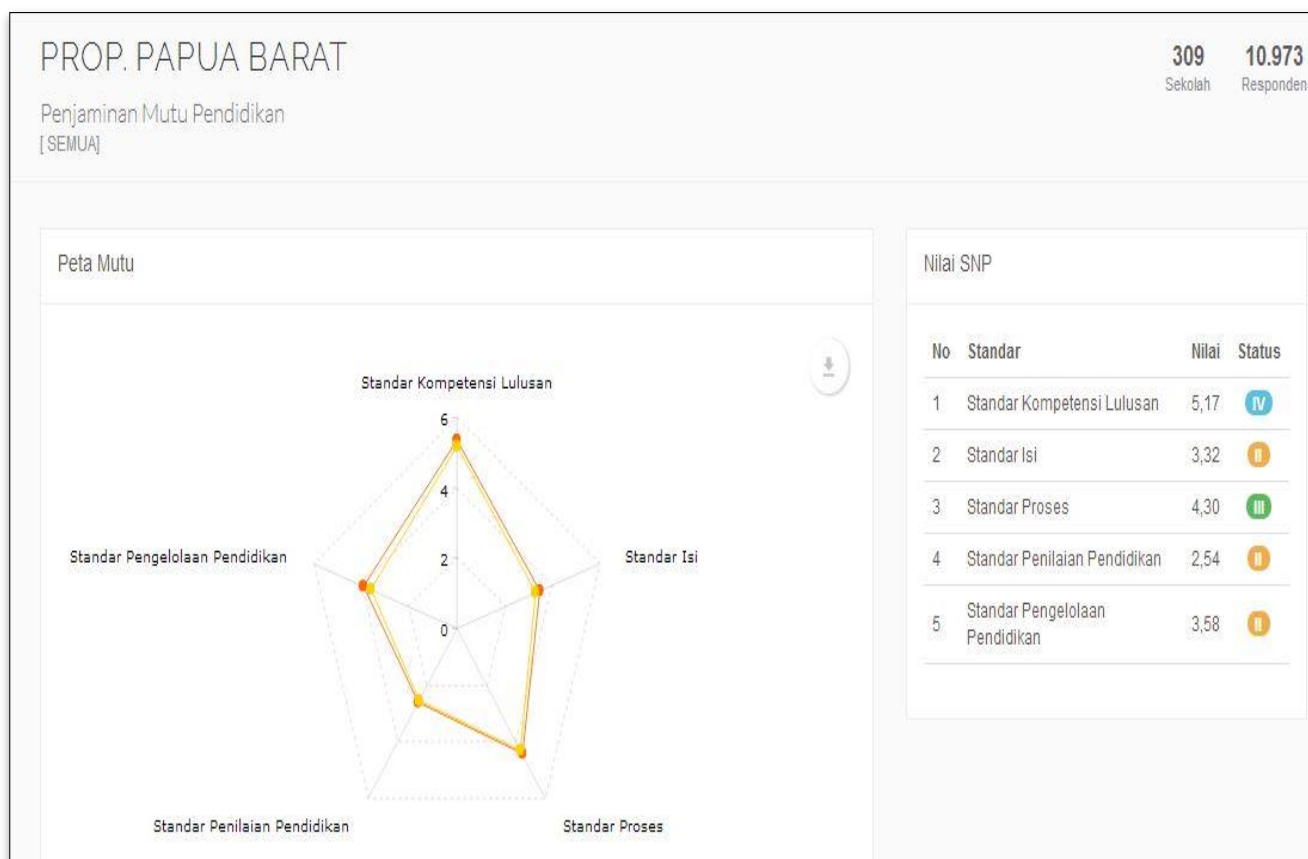
Tabel 17. Nilai 5 Standar Nasional Pendidikan Nasional

No	Standar	Nilai	Status (Level)
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,37	IV
2	Standar Isi	3,46	II
3	Standar Proses	4,42	III
4	Standar Penilaian Pendidikan	2,61	II
5	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,96	III

☞ **Data Peta Mutu SNP Papua Barat**

Dari sejumlah **689** sekolah sasaran dari total **1479** sekolah di Papua Barat (*Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>*) yang diambil sampel data mutunya, hanya **309** sekolah saja yang baru berhasil terpetakan mutunya dengan melibatkan **10.973** responden. Itu berarti di Papua Barat, masih ada **380** sekolah lagi yang sudah mengirim data mutu-nya ke Pusat tapi masih belum terpetakan (masih dalam proses pengolahan data).

Gambaran peta mutu Provinsi Papua Barat seperti yang dilihat pada gambar berikut ini;



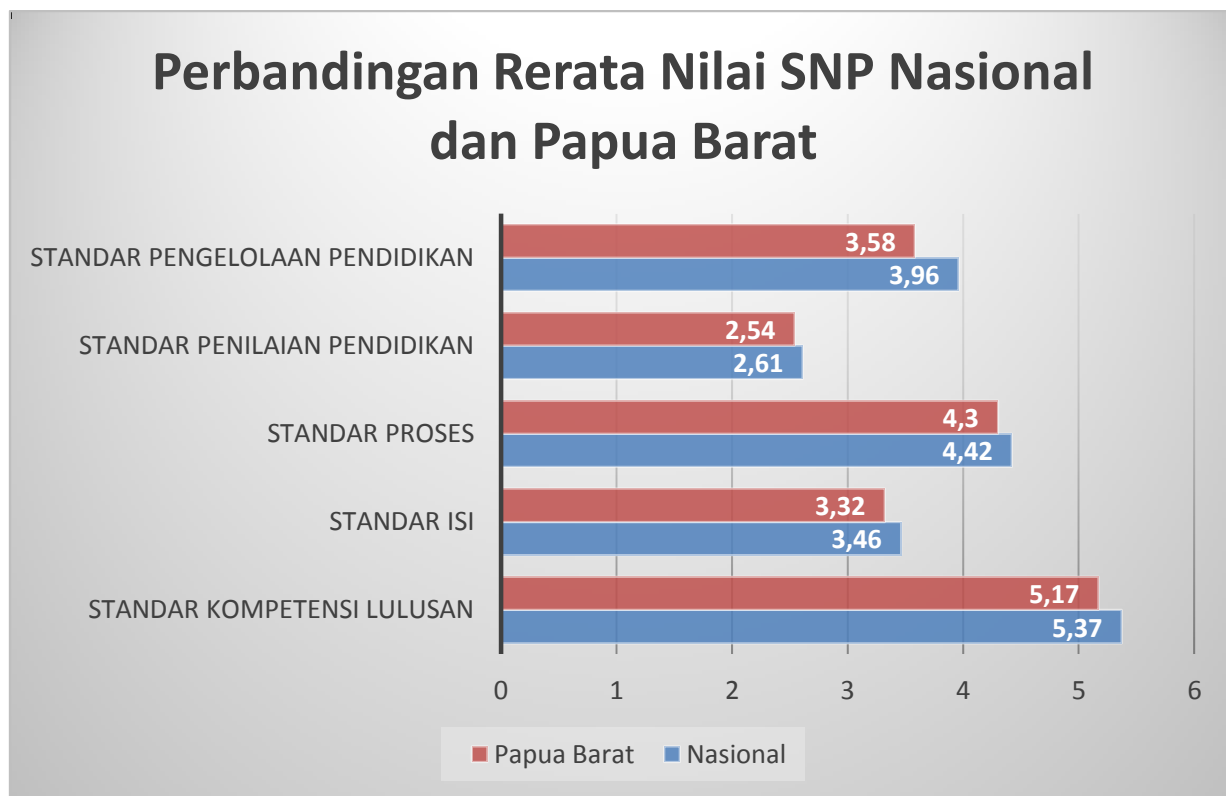
Gambar 26. Peta Mutu 5 Standar Nasional Pendidikan Provinsi Papua Barat

Dari data peta mutu yang baru dapat memetakan 5 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Papua Barat, didapatkan data dan informasi mengenai rata-rata jumlah nilai SNP untuk sekolah-sekolah di Papua Barat yakni;

Tabel 18. Nilai 5 Standar Nasional Pendidikan Papua Barat

No	Standar	Nilai	Status (Level)
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,17	IV
2	Standar Isi	3,32	II
3	Standar Proses	4,30	III
4	Standar Penilaian Pendidikan	2,54	II
5	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,58	II

Dari data mutu SNP Nasional dan Papua Barat terlihat bahwa secara umum, rata-rata capaian nilai mutu ke-5 SNP baik Nasional maupun Papua Barat belum mencapai standar Nasional Pendidikan yang diinginkan yaitu di angka 6,66 (SNP).



Gambar 27. Perbandingan Rerata Nilai SNP Nasional dan Papua Barat.

Data rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan secara Nasional menunjukkan bahwa diantara Standar Nasional Pendidikan yang mendekati Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan, yaitu di angka 5,37. Sedangkan nilai SNP yang paling rendah adalah Standar Penilaian Pendidikan, yaitu di angka 2,61 yang masuk kategori level II. Angka-angka di atas adalah angka rata-rata dari Standar Nasional Pendidikan jenjang SD – SMP – SMA – dan SMK.

Untuk Data rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Papua Barat juga terlihat bahwa nilai Standar Kompetensi Kelulusan merupakan nilai Standar yang paling tinggi di banding 4 (empat) standar lainnya yaitu 5,17, meskipun nilai SNP-nya belum mencapai nilai Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Nilai SNP dari Standar Penilaian Pendidikan masih rendah di angka 2,54. Rendahnya nilai SNP pada standar penilaian ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di Papua Barat agar fokus peningkatan mutu lebih mudah dilakukan dan terprogram dengan sasaran yang terbaik. Secara umum, rata-rata nilai SNP Papua Barat dari ke-5 Standar masih dibawah nilai rata-rata SNP secara Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan di Papua Barat harus terus fokus dan berusaha meningkatkan Standar Nasional Pendidikan sehingga paling tidak nilai SNP-nya sama dengan rata-rata atau di atas nilai rata-rata SNP secara Nasional.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Masih rendahnya rata-rata nilai SNP di Provinsi Papua Barat dibandingkan secara Nasional bisa terjadi karena banyak faktor. Hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya nilai SNP Papua Barat ini bisa menjadi bahan kajian bagi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah yang nantinya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam usaha mencari solusi dan jalan terbaik untuk meningkatkan standar mutu pendidikan di masing-masing daerah kabupaten/kota di Papua Barat,

sehingga nilai rata-rata SNP dapat ditingkatkan dan diharapkan nanti dapat mencapai Nilai Standar Nasional Pendidikan.

Perlunya Pemerintah Daerah memperhatikan data capaian SNP ini agar memudahkan pemangku kepentingan di daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam rangka tata kelola pendidikan yang lebih baik di daerah kabupaten/kota masing-masing .

Bagi LPMP Papua Barat, dengan gambaran Peta Mutu ini, maka LPMP dapat menyusun program dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun pemangku kepentingan di daerah kabupaten/kota, untuk sama-sama melakukan usaha dan program kerja yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Papua Barat.

2. Saran

Dalam upaya memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan upaya-upaya yang sifatnya strategis terhadap proses kegiatan pelaksanaan pemetaan pendidikan di daerah, maka berikut ini adalah beberapa saran dan masukan kepada Dinas Pendidikan terkait, LPMP Papua Barat dan Pusat (Ditjen Dikdasmen/Satgas PMP).

Dinas Pendidikan Provinsi:

- Bersama LPMP Papua Barat agar menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih baik ke depan dalam melakukan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di Papua Barat.
- Saling melibatkan secara pro aktif baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun LPMP Papua Barat dalam program-program

strategis yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua Barat.

- Membentuk Tim Penjaminan Mutu Daerah di Provinsi Papua Barat dengan unsur Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP Papua Barat.
- Melakukan pengawasan terus-menerus terhadap program-program penjaminan mutu yang telah dan akan dilakukan ke depan.

☞ **Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;**

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara LPMP Papua Barat dalam bidang penjaminan Mutu Pendidikan.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawas sebagai ujung tombak penjaminan mutu di daerah dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- Membentuk tim penjaminan mutu daerah tingkat Kabupaten/Kota yang solid dan membangun sinergitas dalam proses peningkatan mutu pendidikan dengan Tim PMP Sekolah di tiap Kabupaten/Kota masing-masing.
- Memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya melahirkan program kerja dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu serta penjaminan mutu pendidikan.
- Untuk sekolah yang dengan akses geografis yang cukup sulit (karena keterbatasan transportasi, dll.) dukungan dari

pemerintah daerah sangat diharapkan, sehingga program pemetaan tetap dapat berjalan dengan baik.

- Sosialisasi oleh Pengawas ke Sekolah Sasaran lebih ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan proses penginputan data, verifikasi dan validasi data sampai dengan progres pengiriman.

☞ **LPMP Papua Barat**

- Melakukan konsolidasi dan kerjasama yang lebih baik dalam program penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Sebagai perpanjangan tangan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di daerah, LPMP perlu berperan lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah kabupaten/kota.
- Terkait dengan karakteristik geografis dan demografis yang “unik” di Papua Barat, maka LPMP perlu memberikan masukan yang “rinci” dan “solusif” kepada Ditjen Dikdasmen Kemdikbud dalam rangka tercapainya program penjaminan mutu yang staretegis dan lebih baik.

☞ **Satgas PMP Pusat/Ditjen Dikdasmen Kemdikbud**

- menyediakan aplikasi PMP yang *up to date* dan sesuai dengan aplikasi Dapodik terbaru.

- memperbaiki “bug” yang terjadi di aplikasi PMP sebelumnya yang menyebabkan data instrumen pemetaan tidak dapat diinput dengan baik.
- Untuk daerah-daerah pemekaran di Papua Barat, proses pengiriman data ke Pusat agar “lebih longgar” karena akses jaringan internet di daerah pemekaran masih sangat minim.
- Membuka jalur khusus sebagai “pintu lain” (email) untuk pengiriran “*back up data*” selain pengiriman data melalui Aplikasi PMP, bagi operator sekolah di daerah yang sulit jaringan komunikasi dan geografis-nya. Hal ini dikarenakan waktu dan biaya yang digunakan untuk upload data ke Pusat sangat besar.
- Terkait dengan anggaran, perlu diperhatikan daerah dengan akses geografis serta akses komunikasi yang sulit. Sehingga pelaksanaan Pemetaan mutu pendidikan dapat tetap dilaksanakan dengan baik.

PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Aturan tersebut telah diperbarui lagi dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan sudah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. LPMP adalah lembaga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah. Ujung dari pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berada di satuan pendidikan. Pemerintah daerah juga harus melakukan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun berupa dukungan. Di tingkat pemerintah daerah pun wajib memiliki tim penjaminan mutu pendidikan tingkat daerah.

Dalam rangka kegiatan penjaminan mutu pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, pada tahun 2016 mulai melaksanakan 2 (dua) agenda utama. Agenda kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat pusat adalah 1) Pemetaan mutu pendidikan dan 2) Pengembangan sekolah model.

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.

Kriteria bagi suatu satuan pendidikan untuk ditetapkan menjadi sekolah model ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Sebagaimana dicantumkan dalam juknis pengembangan sekolah model yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, kriteria untuk menjadi sekolah model adalah sebagaimana berikut.

- 1) Sekolah belum memenuhi SNP
- 2) Seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model
- 3) Adanya dukungan dari pemerintah daerah

Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah model akan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu bagi sekolahnya. Kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan. Segala kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri dikatakan sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kegiatan yang dilaksanakan sekolah model dalam upaya penjaminan mutu pendidikan ada beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah pemetaan mutu (melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah/EDS atau instrumen pemetaan yang lain), perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, analisis mutu pendidikan untuk menaikkan standar mutu pendidikan. Seluruh rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan dapat berjalan dengan dukungan seluruh warga sekolah dan dari pemangku kepentingan pendidikan yang lain.

Dalam rangka memenuhi kedelapan standar tersebut, tidak semuanya bisa dipenuhi oleh satuan pendidikan sendiri. Satuan

pendidikan melaksanakan kegiatan SPMI di sekolahnya, sedangkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan ikut membantu dan mendukung dalam upaya pencapaian standar nasional pendidikan. Pemangku kepentingan pendidikan di luar satuan pendidikan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pelaksana dari kegiatan SPME berasal dari instansi di luar satuan pendidikan, misalnya LPMP, BAP SM/BAN SM, Tim PMP Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan lain-lain. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting bagi satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar nasional tersebut. Standar-standar nasional yang berhubungan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan merupakan hal yang berat untuk dipenuhi sendiri oleh satuan pendidikan.

Sekolah model tahun 2016 di Provinsi Papua Barat ditetapkan sebanyak 52 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut terbagi pada masing-masing jenjang pendidikan, yaitu jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA dan jenjang SMK. Adapun jumlah masing-masing sekolah di tiap kabupaten adalah satu sekolah per jenjang atau sebanyak 4 sekolah di masing-masing kabupaten/kota (daftar terlampir).

Pengembangan Sekolah Model Papua Barat Tahun 2016

1. Pelatihan bagi Fasilitator Nasional Pengembangan Sekolah Model

Secara nasional pelatihan fasilitator nasional bagi pengembangan sekolah model dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 Juni 2016 di Hotel Atria, Tangerang Banten. Dalam kegiatan pelatihan

tersebut, masing-masing LPMP dari tiap provinsi mengirimkan 4 (empat) orang calon fasilitator pengembangan sekolah model yang memenuhi syarat. Setelah kegiatan selesai, para fasilitator nasional mempunyai kewajiban untuk melatih fasilitator daerah di provinsi masing-masing. Empat orang calon fasilitator yang dikirim untuk mengikuti pelatihan fasilitator nasional dari LPMP Papua Barat kesemuanya lulus dan berhak untuk melatih calon fasilitator daerah pengembangan sekolah model. Adapun daftar fasilitator nasional pengembangan sekolah model dari LPMP Papua Barat tahun 2016 sebagaimana tabel berikut.

*Tabel 19. Fasilitator Nasional
Pengembangan Sekolah Model di Papua Barat Tahun 2016*

No	Nama Fasilitator	Jabatan	Keterangan
1.	Sukarno, S.Pd	Pengolah Data Sistem Informasi	
2.	Luci Evita, S.Pd	Penyusun Program Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	
3.	Sukanto, S.Pd	Pengolah Data Program Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	
4.	Victor Krisnawan, S.Sos	Analisis Data Mutu Pendidikan	

2. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Pelatihan bagi Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model

Penjaminan mutu pendidikan di daerah dilaksanakan oleh LPMP, dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di daerah, diadakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh LPMP, dengan pesertanya adalah para pengawas/kepala sekolah dari seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Kegiatan pelatihan fasilitator daerah untuk pengembangan SPMI bagi sekolah model dilaksanakan di Manokwari pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016. Jumlah peserta pada kegiatan pelatihan ini sebanyak 22 orang (daftar terlampir).

Kegiatan lanjutan setelah pelatihan SPMI bagi fasilitator daerah, adalah Pelatihan Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model dilatih oleh fasilitator nasional dari LPMP. Fasilitator daerah yang direkrut berasal dari unsur pengawas, kepala sekolah/guru serta staf dari dinas pendidikan. Kegiatan pelatihan fasilitator daerah untuk pengembangan sekolah model ini dilaksanakan di Manokwari pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2016. Jumlah fasilitator yang berhasil dilatih pada kegiatan ini ada sebanyak 31 orang yang terdiri dari unsur pengawas, kepala sekolah/guru dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan dari LPMP Papua Barat.



Gambar 28. Pelatihan Fasilitator Daerah Sekolah Model



Gambar 29. Fasilitator SPMI untuk Sekolah Model

3. Bimbingan Teknis bagi Sekolah-sekolah Model di Kabupaten/Kota

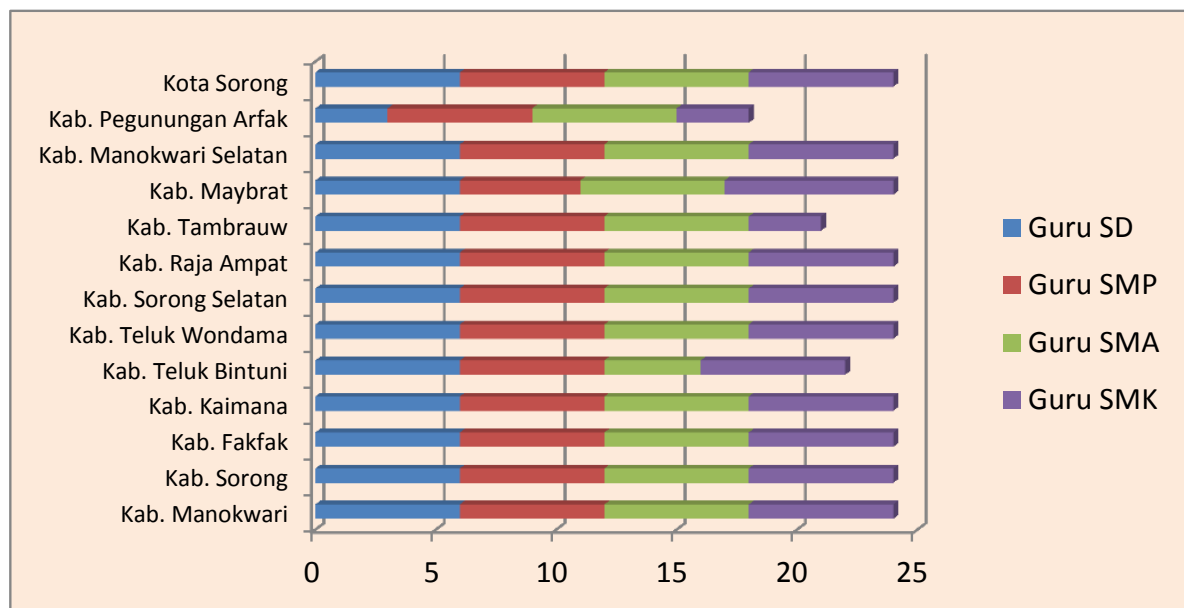
Bimbingan teknis pengembangan sekolah model dilaksanakan pada tiap-tiap kabupaten di Provinsi Papua Barat. Narasumber dan fasilitator yang melatih adalah fasilitator daerah yang telah dilatih pada kegiatan sebelumnya. Bimtek pengembangan sekolah model di Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota antara tanggal 17 – 22 Oktober 2016. Peserta yang dilatih adalah kepala sekolah dan guru-guru yang akan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di sekolah model yang telah ditentukan. Adapun jumlah peserta yang berhasil dilatih dalam kegiatan Bimtek Sekolah Model ini sebanyak 301 orang, dengan melibatkan fasilitator daerah sekolah model dan SPMI sebanyak 42 orang, sebagaimana digambarkan dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 20
Rekapitulasi Peserta Bimtek Pengembangan Sekolah Model
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Guru Sekolah				Jumlah Peserta	Jml. Fasda	Ket.
		SD	SMP	SMA	SMK			
1.	Kab. Manokwari	6	6	6	6	24	4	
2.	Kab. Sorong	6	6	6	6	24	4	
3.	Kab. Fakfak	6	6	6	6	24	3	
4.	Kab. Kaimana	6	6	6	6	24	4	
5.	Kab. Teluk Bintuni	6	6	4	6	22	2	
6.	Kab. Teluk Wondama	6	6	6	6	24	1	
7.	Kab. Sorong Selatan	6	6	6	6	24	3	
8.	Kab. Raja Ampat	6	6	6	6	24	3	
9.	Kab. Maybrat	6	6	6	3	21	3	
10.	Kab. Tambrauw	6	5	6	7	24	3	
11.	Kab. Manokwari Selatan	6	6	6	6	24	4	
12.	Kab. Pegunungan Arfak	3	6	6	3	18	3	
13.	Kota Sorong	6	6	6	6	24	5	
Jumlah		75	77	76	73	301	42	

Sumber : Data Pengembangan Sekolah Model Papua Barat, 2016

Gambar 30
Grafik Peserta Bimtek Pengembangan Sekolah Model Tiap Kabupaten
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2016



Pada saat berakhirnya kegiatan Bintek Pengembangan Sekolah Model di kabupaten/ kota, juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman antara LPMP Papua Barat dengan sekolah model yang telah ditetapkan. Pada pengembangan sekolah model di Provinsi Papua Barat tahun 2016, masing-masing sekolah model menerima dana bantuan pemerintah. Dana dimaksud dipergunakan oleh sekolah model untuk menjalankan kegiatan mempersiapkan sekolah model untuk mulai memenuhi standar nasional pendidikan yang masih kurang.

Selama pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan sekolah model mengacu pada panduan juknis yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Dimana juknis tersebut mengatur kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan, peruntukan dan penggunaan dana, serta pelaporan yang wajib dilakukan oleh sekolah model.



Gambar 31. Bimbingan Teknis Bagi Sekolah Model di Kabupaten Tambrauw



Gambar 32. Bimbingan Teknis Bagi Sekolah Model di Kabupaten Raja Ampat

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

Latar Belakang Pelaksanaan Implementasi Kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 telah mengeluarkan kebijakan penataan implementasi Kurikulum 2013 melalui Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Berdasarkan kebijakan tersebut implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2014/2015 semester kedua sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019.

Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013, pada tahun anggaran 2016 diberikan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis dan pendampingan Kurikulum 2013. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan bagi guru sasaran dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan Bimbingan Teknis Instruktur Nasional, Bimbingan Teknis Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Guru Sasaran.

Bimbingan Teknis Instruktur Nasional dan Instruktur Provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK dan untuk Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota serta Guru Sasaran dilaksanakan oleh LPMP.

Tujuan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua peserta dalam rangka meningkatkan wawasan dan *updating* sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebijakan terkini.

Perkembangan Sekolah dan Guru Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat

Data perkembangan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21
Perkembangan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SD
di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015 6 %	2016 19 %	Total 25 %
1	Kab. Fak-Fak	114	16	22	38
2	Kab. Kaimana	85	8	15	23
3	Kab. Manokwari	114	5	22	27
4	Kab. Manokwari Selatan	39	-	8	8
5	Kab. Maybrat	59	1	13	14
6	Kab. Pegunungan Arfak	55	1	10	11
7	Kab. Raja Ampat	104	-	14	14
8	Kab. Sorong	123	4	29	33
9	Kab. Sorong Selatan	80	5	16	21
10	Kab. Tambrauw	50	-	10	10
11	Kab. Teluk Bintuni	75	1	14	15
12	Kab. Teluk Wondama	49	1	10	11
13	Kota Sorong	72	6	17	23
	Total	1.019	45	200	248

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 22. Perkembangan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SMP di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015 6 %	2016 19 %	Total 25 %
1	Kab. Fak-Fak	19	2	3	5
2	Kab. Kaimana	16	1	4	5
3	Kab. Manokwari	32	2	5	7
4	Kab. Manokwari Selatan	8	-	3	3
5	Kab. Maybrat	11	-	2	2
6	Kab. Pegunungan Arfak	11	-	1	1
7	Kab. Raja Ampat	30	-	3	3
8	Kab. Sorong	34	3	6	9
9	Kab. Sorong Selatan	18	-	4	4
10	Kab. Tambrau	12	-	3	3
11	Kab. Teluk Bintuni	32	1	4	4
12	Kab. Teluk Wondama	11	-	2	2
13	Kota Sorong	28	2	4	6
	Total	262	17	44	54

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 23. Perkembangan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SMA di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015 6 %	2016 19 %	Total 25 %
1	Kab. Fak-Fak	6	-	3	3
2	Kab. Kaimana	4	-	1	1
3	Kab. Manokwari	15	1	5	6
4	Kab. Manokwari Selatan	5	-	1	1
5	Kab. Maybrat	3	-	1	1
6	Kab. Pegunungan Arfak	3	-	1	1
7	Kab. Raja Ampat	15	-	3	3
8	Kab. Sorong	18	1	3	4
9	Kab. Sorong Selatan	4	-	1	1
10	Kab. Tambrau	4	-	1	1
11	Kab. Teluk Bintuni	15	1	1	2
12	Kab. Teluk Wondama	3	-	1	1
13	Kota Sorong	19	2	7	9
	Total	114	5	29	34

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 24. Perkembangan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SMK di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015 6 %	2016 19 %	Total 25 %
1	Kab. Fak-Fak	3	1	0	1
2	Kab. Kaimana	3	-	1	1
3	Kab. Manokwari	8	2	0	2
4	Kab. Manokwari Selatan	1	-	1	1
5	Kab. Maybrat	1	-	1	1
6	Kab. Pegunungan Arfak	1	-	1	1
7	Kab. Raja Ampat	2	-	1	1
8	Kab. Sorong	7	-	2	2
9	Kab. Sorong Selatan	3	-	1	1
10	Kab. Tambrau	3	-	1	1
11	Kab. Teluk Bintuni	1	-	1	1
12	Kab. Teluk Wondama	2	-	1	1
13	Kota Sorong	13	1	4	5
	Total	48	4	15	19

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Berdasarkan data-data pada tabel di atas, kita ketahui bahwa sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun 2015 sebanyak 6% dari total sekolah yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah SD yang ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat sebanyak 45 (empat puluh lima) sekolah, kemudian ditambah lagi sebanyak 200 (dua ratus) sekolah pada tahun 2016. Total SD pelaksana Kurikulum 2013 pada akhir tahun 2016 sebanyak 245 sekolah atau 25% dari seluruh SD yang ada di Provinsi Papua Barat.

Sekolah pelaksana Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah. Pada tahun 2016 ditambah lagi sebanyak 44 (empat puluh empat) sekolah sebagai pelaksana Kurikulum 2013. Pada akhir tahun

2016 ada sebanyak 61 (enam puluh satu) sekolah jenjang SMP yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013 atau sekitar 25% dari seluruh SMP yang ada di Provinsi Papua Barat.

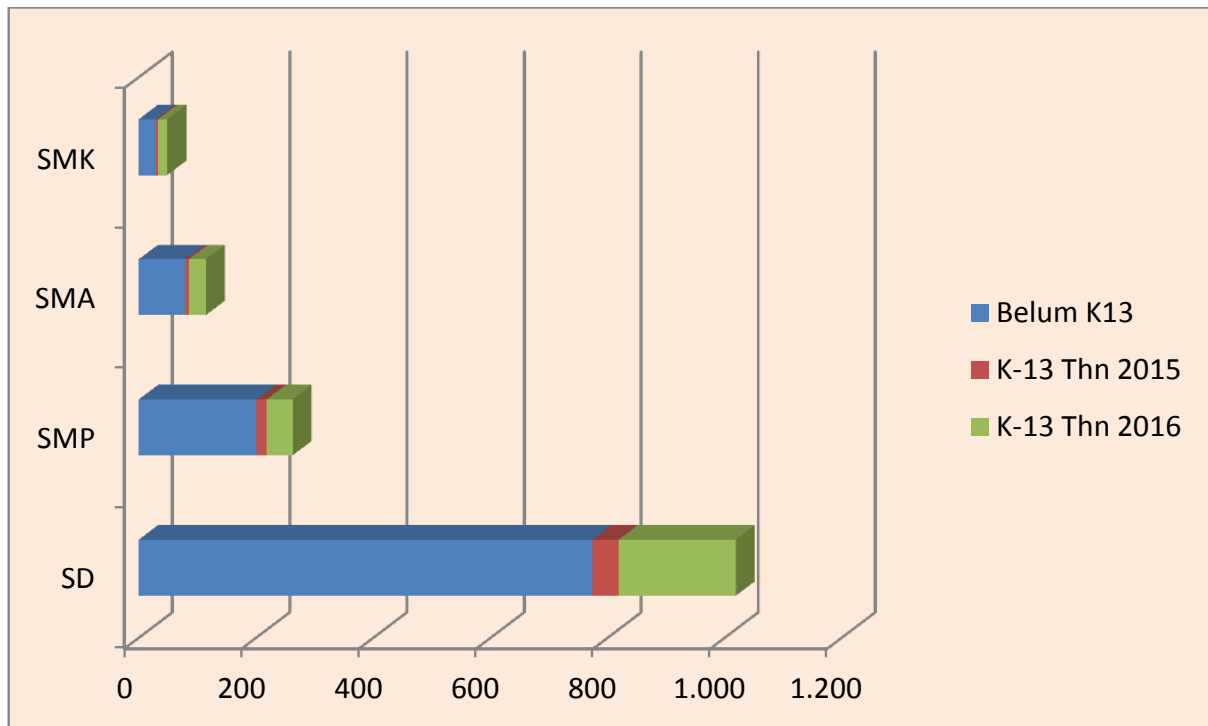
Pada jenjang SMA, sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun 2015 sebanyak 5 (lima) sekolah. Pada tahun 2016 ditambah lagi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sekolah sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) SMA yang ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum 2013 atau sekitar 25% dari jumlah SMA yang ada di Provinsi Papua Barat.

Jenjang SMK di Provinsi Papua Barat jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jenjang sekolah yang lain. Adapun SMK yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) sekolah. Pada tahun 2016 ditambah lagi sebanyak 15 (lima belas) sekolah sebagai pelaksana Kurikulum 2013. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 ada sebanyak 19 (sembilan belas) SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Target sekolah pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 35% untuk seluruh jenjang pendidikan. Jenjang SD direncanakan sebanyak 364 sekolah yang akan menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang baru. Jenjang SMP direncanakan sebanyak 100 sekolah yang akan menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013. Jenjang SMA direncanakan sebanyak 44 sekolah yang akan menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang baru. Sedangkan jenjang SMK direncanakan sebanyak 17 sekolah yang akan menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang baru di tahun 2017.

Ilustrasi yang menggambarkan perkembangan sekolah yang menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 antara tahun 2015 sampai akhir tahun 2016 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 31
Grafik Perkembangan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
Di Provinsi Papua Barat akhir tahun 2016



Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Berdasarkan gambaran grafik di atas, terlihat dengan jelas bahwa masih banyak sekolah di Provinsi Papua Barat yang belum menjadi sekolah pelaksana Kurikulum 2013. LPMP Papua Barat secara bertahap akan menuntaskan pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat, sehingga pada tahun 2019 diharapkan seluruh sekolah di Provinsi Papua Barat sudah melaksanakan Kurikulum 2013.

Guru sasaran dari sekolah pelaksana Kurikulum yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Papua Barat sebagaimana tabel-tabel berikut.

Tabel 25.
Jumlah Guru Sasaran Kurikulum 2013 jenjang SD Tahun 2016
di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015	2016	Ket
1	Kab. Fak-Fak	114	51	23	
2	Kab. Kaimana	85	9	68	
3	Kab. Manokwari	114	23	105	
4	Kab. Mnokwari Selatan	39	-	45	
5	Kab. Maybrat	59	4	54	
6	Kab. Pegunungan Arfak	55	-	47	
7	Kab. Raja Ampat	104	-	46	
8	Kab. Sorong	123	14	106	
9	Kab. Sorong Selatan	80	5	72	
10	Kab. Tambrauw	50	-	51	
11	Kab. Teluk Bintuni	75	-	63	
12	Kab. Teluk Wondama	49	-	53	
13	Kota Sorong	72	55	80	
	Total	1.019	161	813	

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 26.
Jumlah Guru Sasaran Kurikulum 2013 jenjang SMP di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015	2016	Ket
1	Kab. Fak-Fak	19	17	44	
2	Kab. Kaimana	16	14	52	
3	Kab. Manokwari	32	8	63	
4	Kab. Mnokwari Selatan	8	-	36	
5	Kab. Maybrat	11	8	26	
6	Kab. Pegunungan Arfak	11	-	11	
7	Kab. Raja Ampat	30	17	33	
8	Kab. Sorong	34	32	65	
9	Kab. Sorong Selatan	18	-	48	
10	Kab. Tambrauw	12	-	32	
11	Kab. Teluk Bintuni	32	10	23	
12	Kab. Teluk Wondama	11	-	29	
13	Kota Sorong	28	59	66	
	Total	262	165	528	

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 27.
Jumlah Guru Sasaran Kurikulum 2013 jenjang SMA di Provinsi Papua Barat

No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015	2016	Ket
1	Kab. Fak-Fak	6	21	68	
2	Kab. Kaimana	4	-	18	
3	Kab. Manokwari	15	28	100	
4	Kab. Mnokwari Selatan	5	-	12	
5	Kab. Maybrat	3	-	11	
6	Kab. Pegunungan Arfak	3	-	11	
7	Kab. Raja Ampat	15	-	46	
8	Kab. Sorong	18	8	74	
9	Kab. Sorong Selatan	4	-	17	
10	Kab. Tambrauw	4	-	17	
11	Kab. Teluk Bintuni	15	-	20	
12	Kab. Teluk Wondama	3	-	20	
13	Kota Sorong	19	35	141	
	Total	114	92	555	

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Tabel 28.

Jumlah Guru Sasaran Kurikulum 2013 jenjang SMK di Provinsi Papua Barat

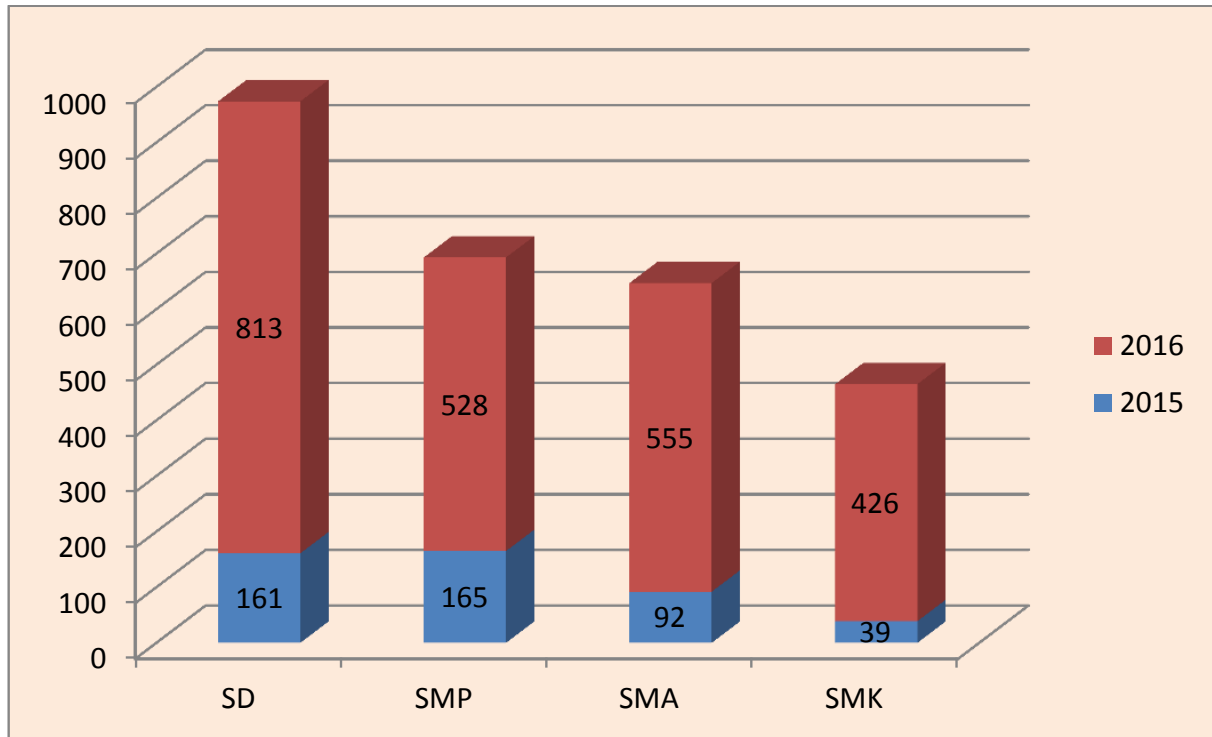
No	Kab/Kota	Total Sekolah	2015	2016	Ket
1	Kab. Fak-Fak	3	8	17	
2	Kab. Kaimana	3	-	10	
3	Kab. Manokwari	8	18	-	
4	Kab. Mankwari Selatan	1	-	13	
5	Kab. Maybrat	1	-	11	
6	Kab. Pegunungan Arfak	1	-	5	
7	Kab. Raja Ampat	2	-	29	
8	Kab. Sorong	7	-	47	
9	Kab. Sorong Selatan	3	-	23	
10	Kab. Tambrauw	3	-	9	
11	Kab. Teluk Bintuni	1	-	13	
12	Kab. Teluk Wondama	2	-	13	
13	Kota Sorong	13	13	56	
	Total	48	39	426	

Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

Berdasarkan data pada tabel di atas, di Provinsi Papua Barat sampai dengan akhir tahun 2016 sudah ada sebanyak 974 orang guru SD yang sudah pernah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013. Pada jenjang SMP, guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 sampai akhir tahun 2016 ada sebanyak 693 orang guru. Sedangkan pada jenjang SMA ada sebanyak 647 orang guru SMA yang sudah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013. Pada jenjang SMK ada sebanyak 465 orang guru yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013.

Ilustrasi dari jumlah guru sasaran yang pernah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 sampai dengan akhir tahun 2016 sebagaimana grafik berikut.

Gambar 32
Jumlah Guru Sasaran Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
2015 – 2016 di Provinsi Papua Barat



Sumber : Data SFPMP LPMP Papua Barat, 2016.

RF POR MU

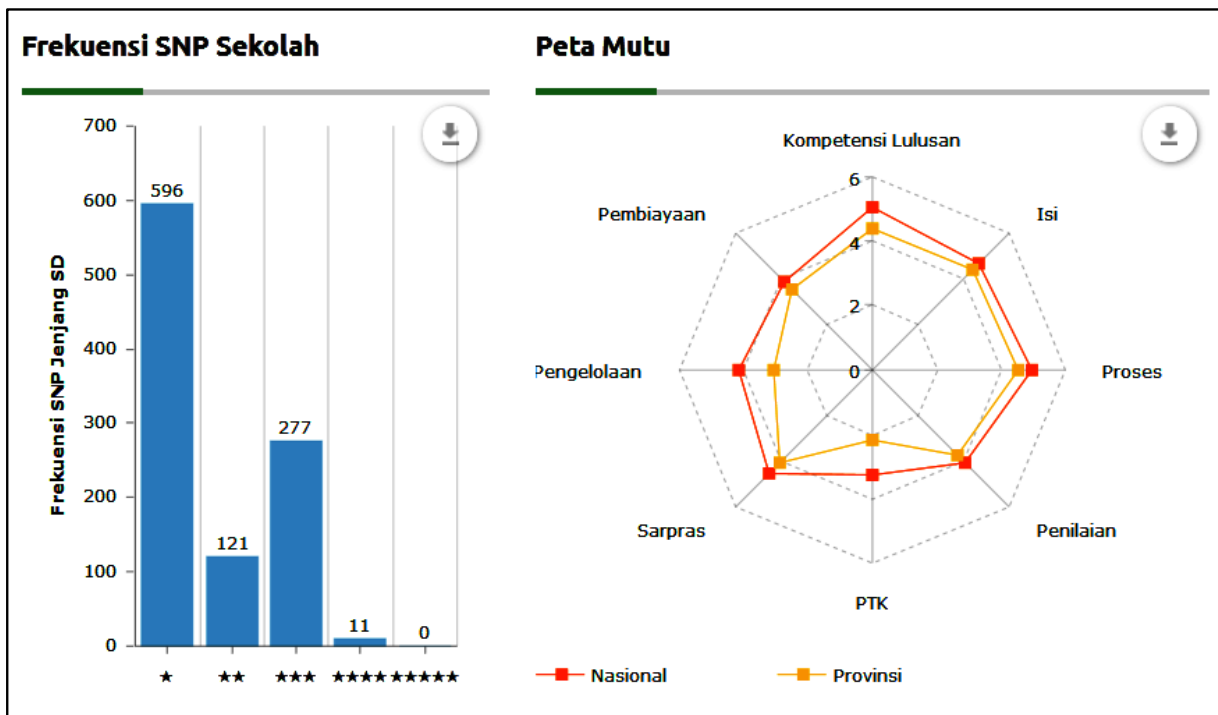
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2016**



LPMP PAPUA BARAT

Raport Mutu

Jenjang SD Provinsi Papua Barat

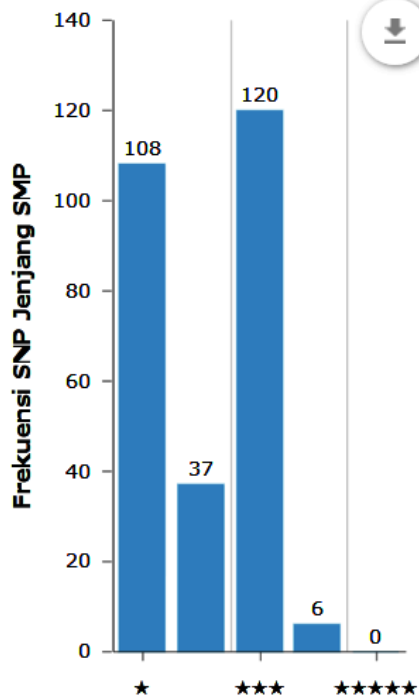


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.38	★★★★
2.	Standar Isi	4.45	★★★★
3.	Standar Proses	4.53	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.71	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.16	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.09	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.06	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.56	★★

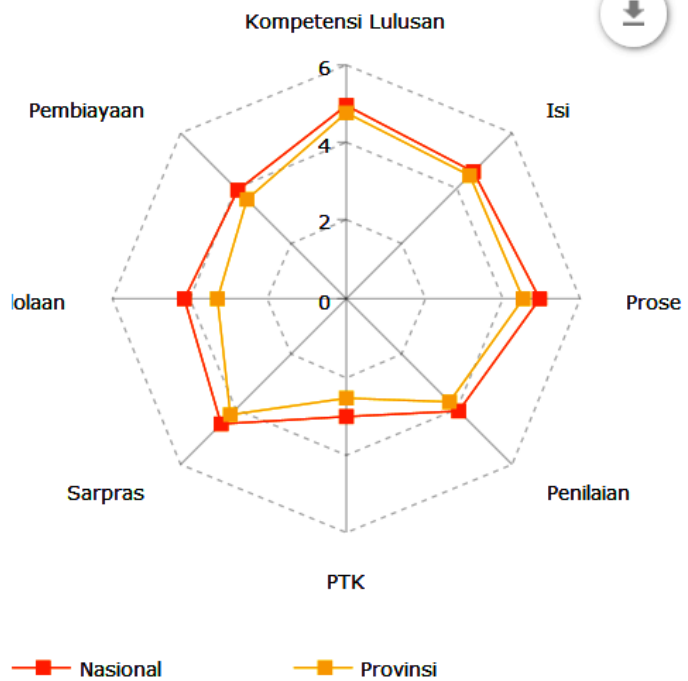
Raport Mutu

Jenjang SMP Provinsi Papua Barat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

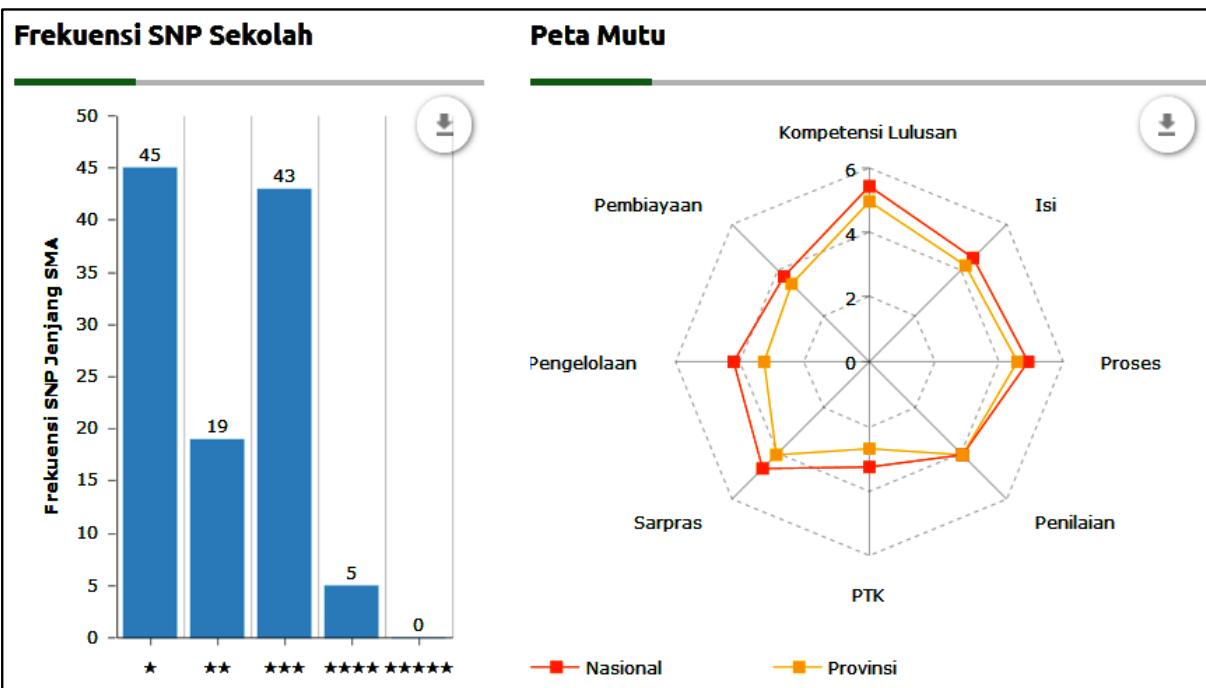
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.75	★★★★
2.	Standar Isi	4.49	★★★★
3.	Standar Proses	4.51	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.76	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.52	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.25	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.28	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.58	★★

Raport Mutu

Jenjang SMA Provinsi Papua Barat

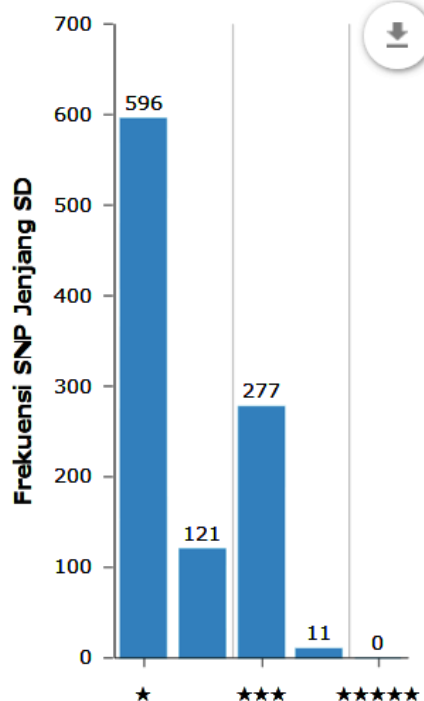


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
		SUB INDIKATOR	
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.98	★★★★
2.	Standar Isi	4.27	★★★★
3.	Standar Proses	4.57	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.06	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.67	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.07	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.25	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.43	★★

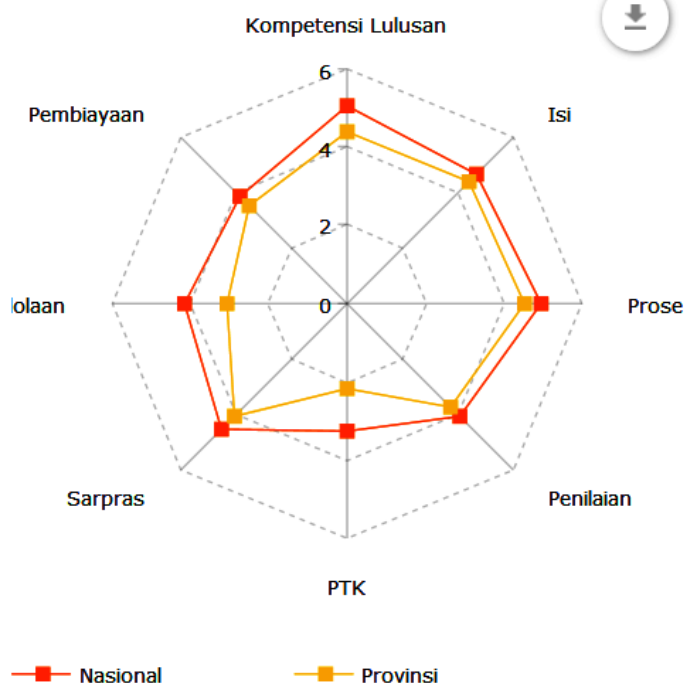
Raport Mutu

Jenjang SMK Provinsi Papua Barat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

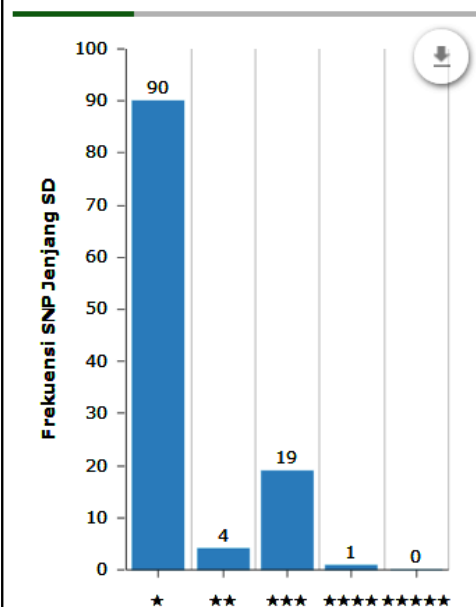
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.38	★★★★
2.	Standar Isi	4.45	★★★★
3.	Standar Proses	4.53	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.71	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.16	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.09	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.06	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.56	★★

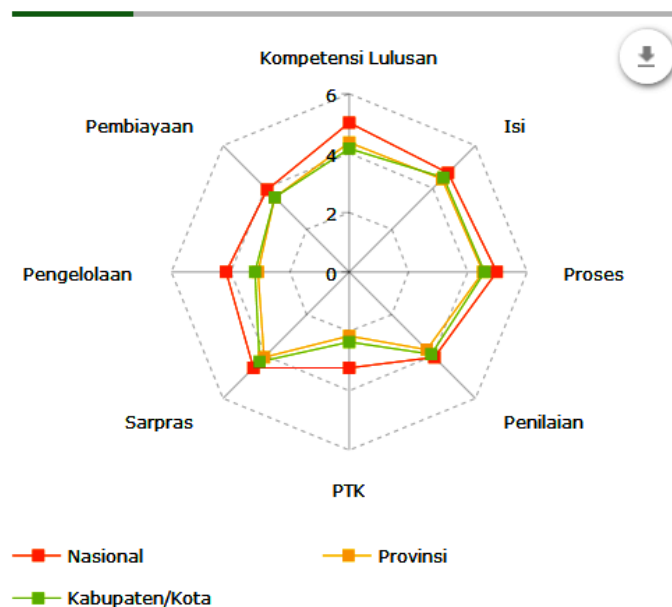
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Fakfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

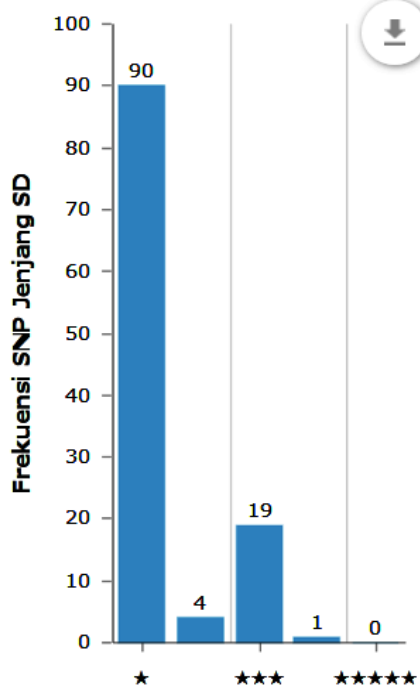
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.17	★★★★
2.	Standar Isi	4.5	★★★★
3.	Standar Proses	4.57	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.93	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.37	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.3	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.16	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.56	★★

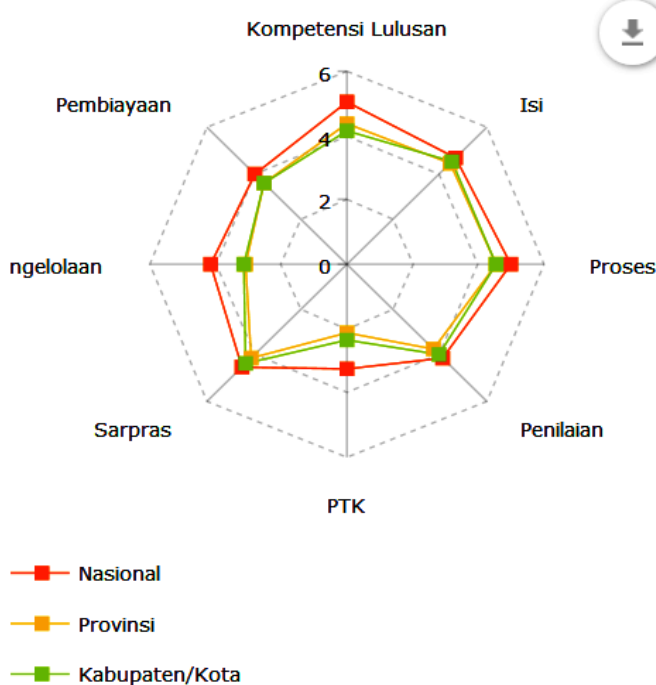
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Fakfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

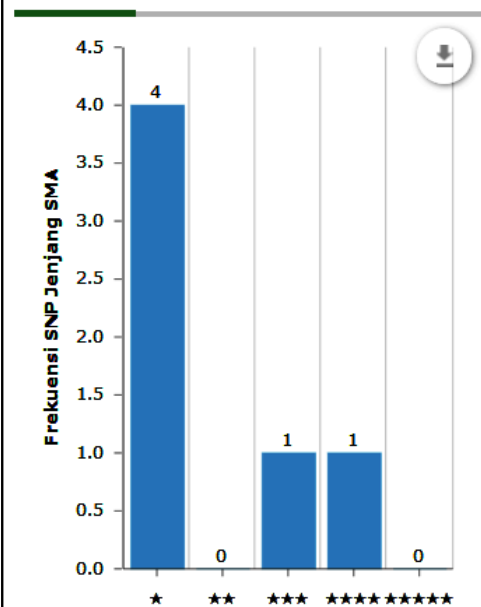
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.17	★★★★
2.	Standar Isi	4.5	★★★★
3.	Standar Proses	4.57	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.93	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.37	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.3	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.16	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.56	★★

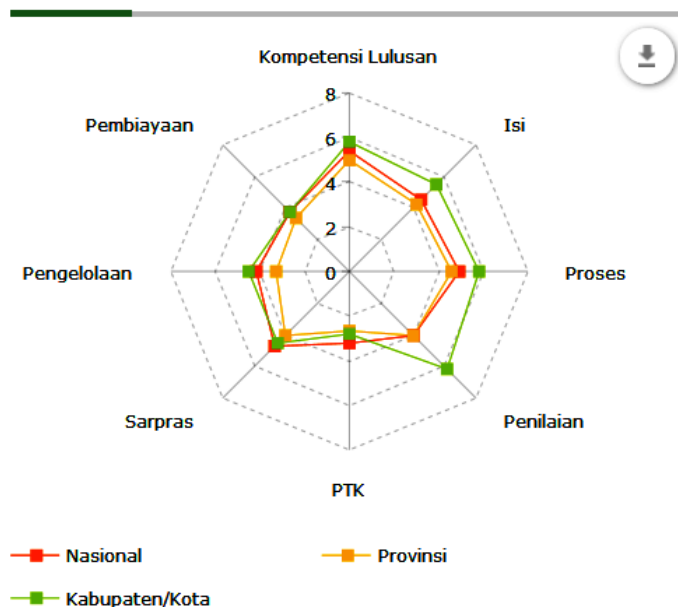
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Fakfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

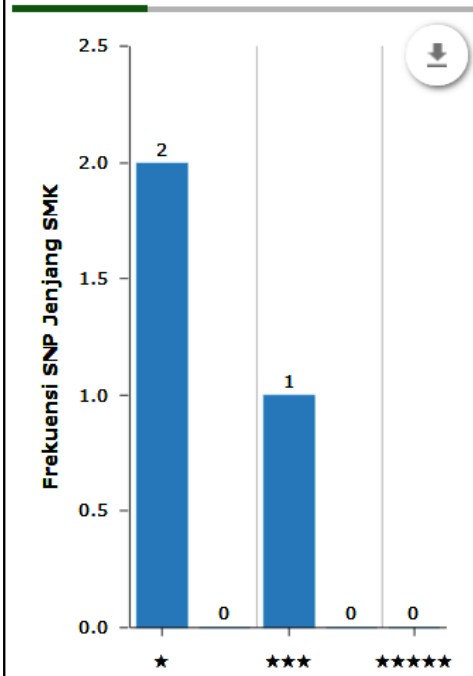
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.79	★★★★★
2.	Standar Isi	5.51	★★★★★
3.	Standar Proses	5.79	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6.2	★★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.8	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.55	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.48	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.74	★★★

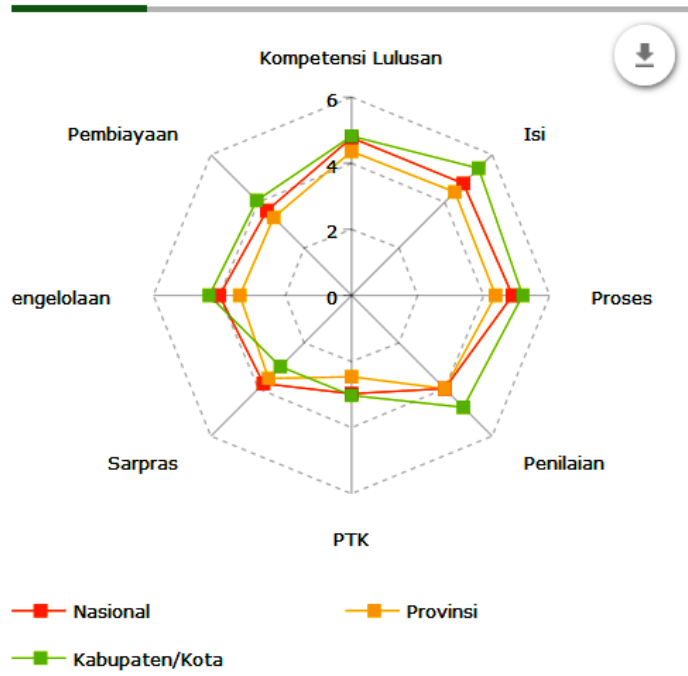
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Fakfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

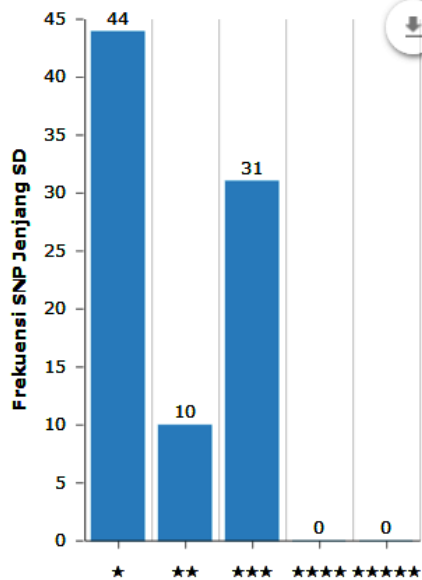
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.8	★★★★
2.	Standar Isi	5.42	★★★★★
3.	Standar Proses	5.16	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.8	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.01	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.09	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.29	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	4.03	★★★★

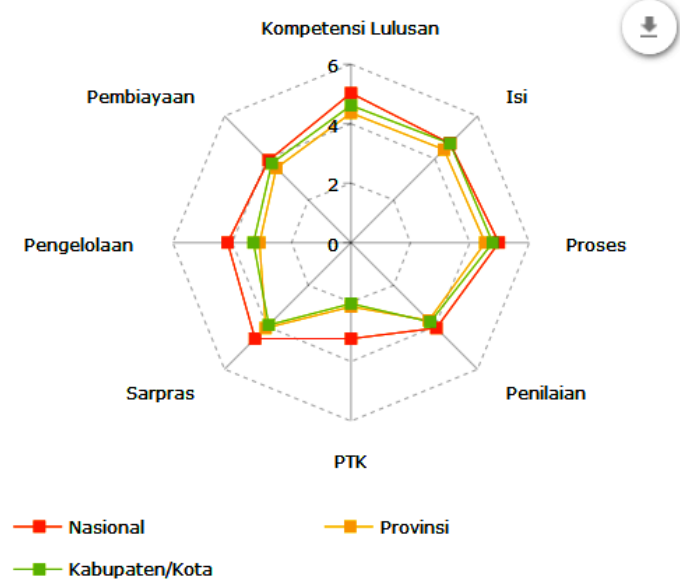
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Kaimana

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

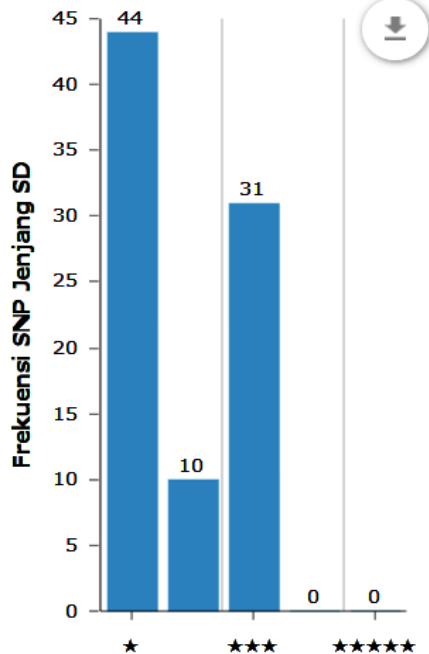
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.61	★★★★
2.	Standar Isi	4.74	★★★★
3.	Standar Proses	4.79	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.78	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.03	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.93	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.26	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.74	★★★★

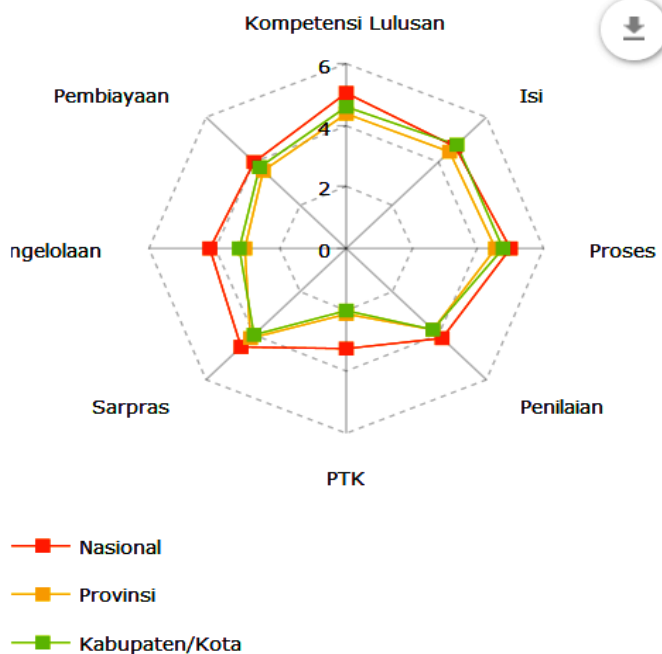
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Kaimana

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

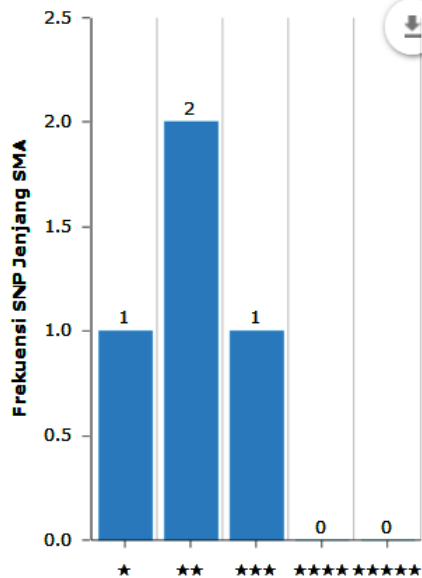
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.61	★★★★
2.	Standar Isi	4.74	★★★★
3.	Standar Proses	4.79	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.78	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.03	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.93	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.26	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.74	★★★★

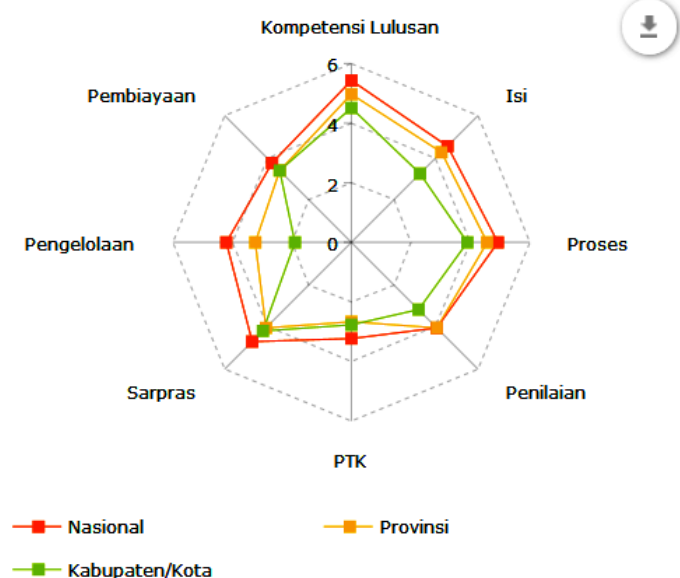
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Kaimana

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

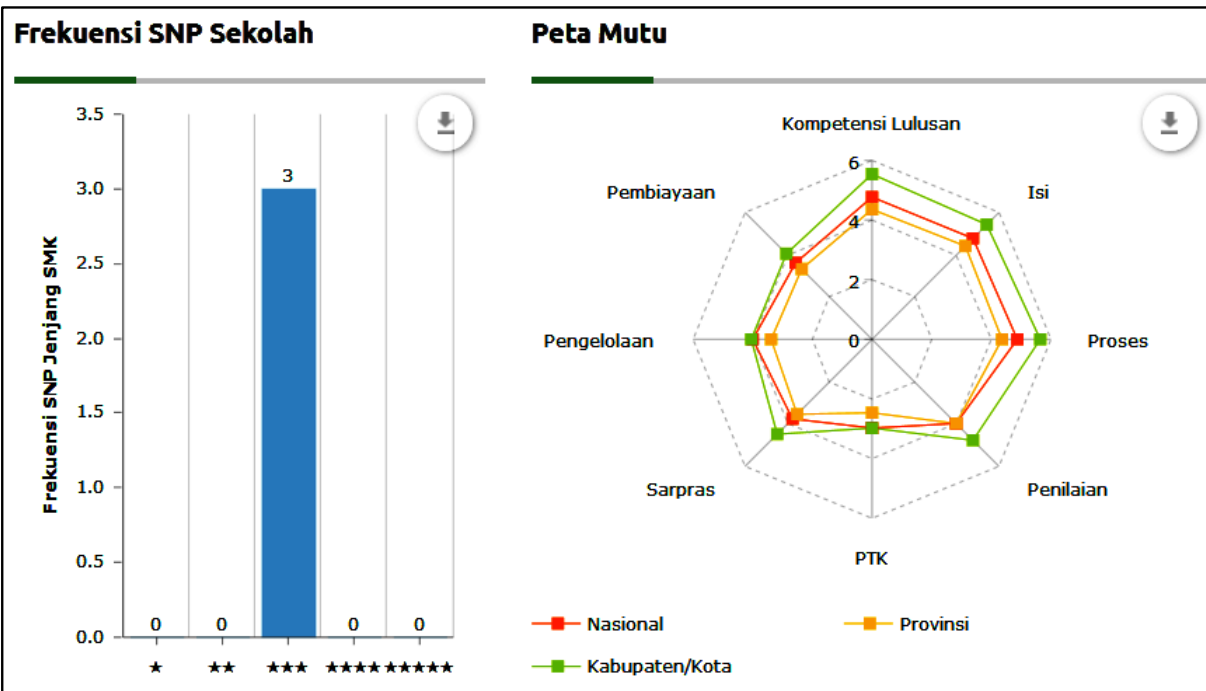
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.51	★★★★
2.	Standar Isi	3.27	★★
3.	Standar Proses	3.87	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.24	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.79	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.19	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	1.88	★
8.	Standar Pembiayaan	3.38	★★

Raport Mutu

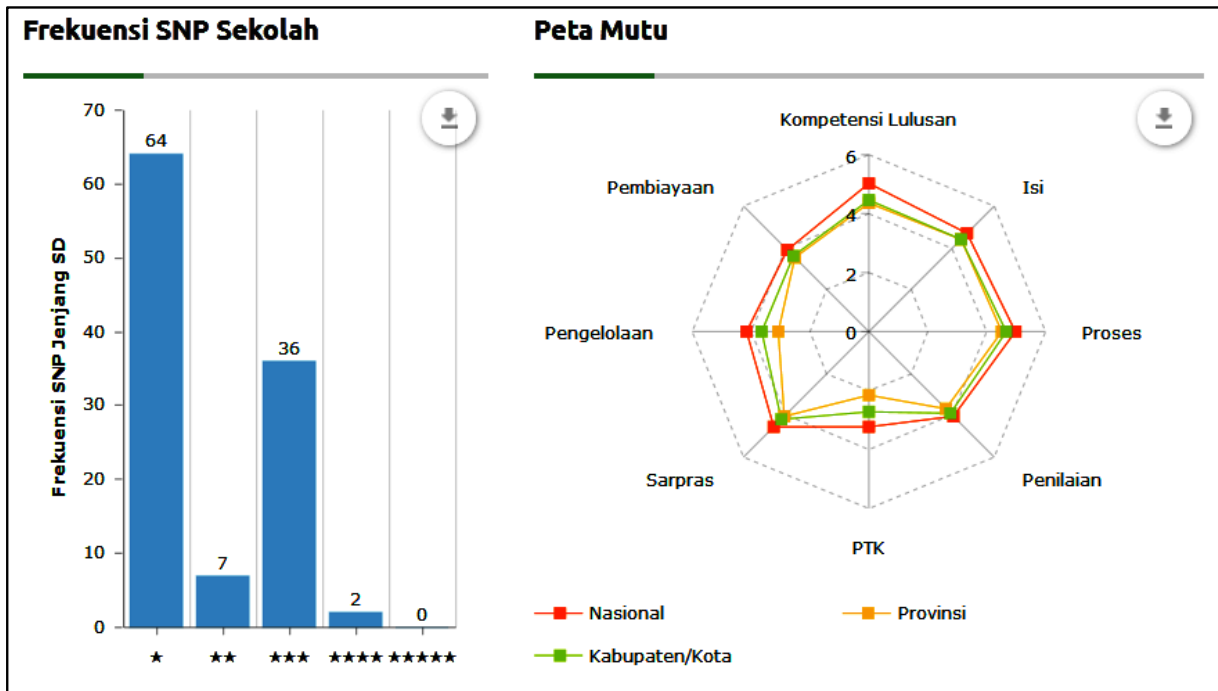
Jenjang SMK Kab. Kaimana



Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
		SUB INDIKATOR	
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.52	★★★★★
2.	Standar Isi	5.41	★★★★★
3.	Standar Proses	5.63	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.75	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.97	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.5	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.04	★★★
8.	Standar Pembiayaan	4.05	★★★

Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Manokwari

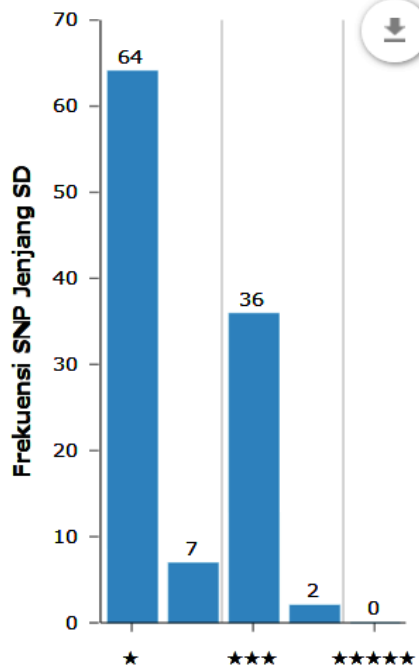


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
	STANDAR	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.44	★★★★
2.	Standar Isi	4.47	★★★★
3.	Standar Proses	4.65	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.9	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.73	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.19	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.62	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.66	★★

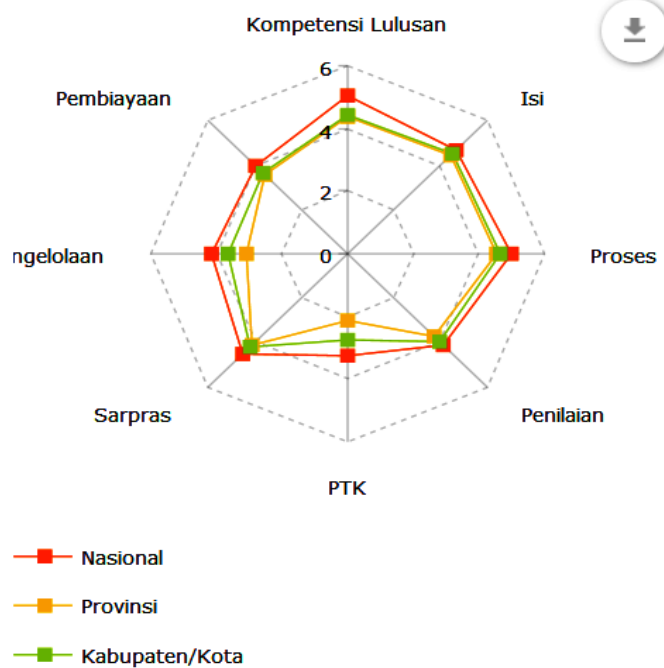
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Manokwari

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

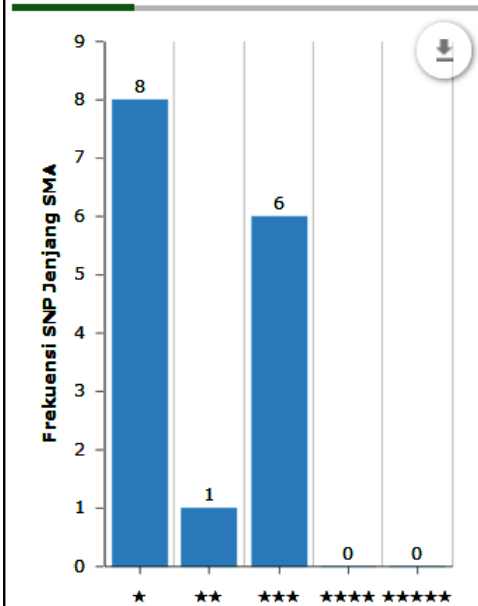
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.44	★★★★
2.	Standar Isi	4.47	★★★★
3.	Standar Proses	4.65	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.9	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.73	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.19	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.62	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.66	★★

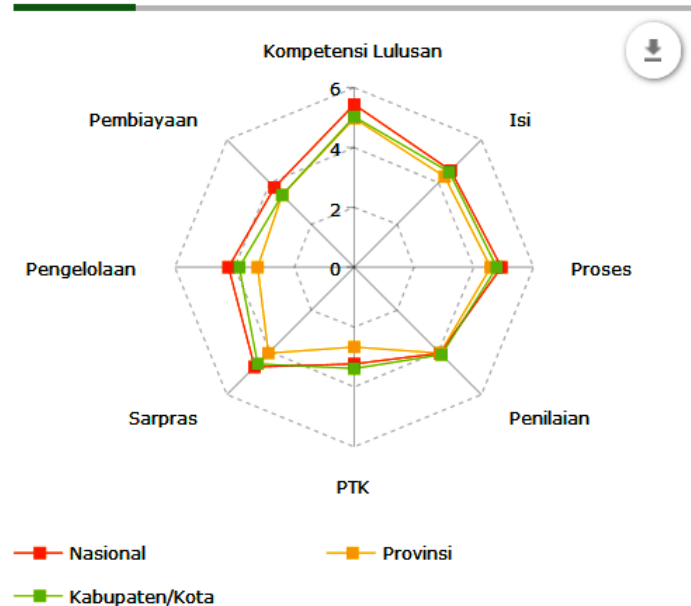
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Manokwari

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

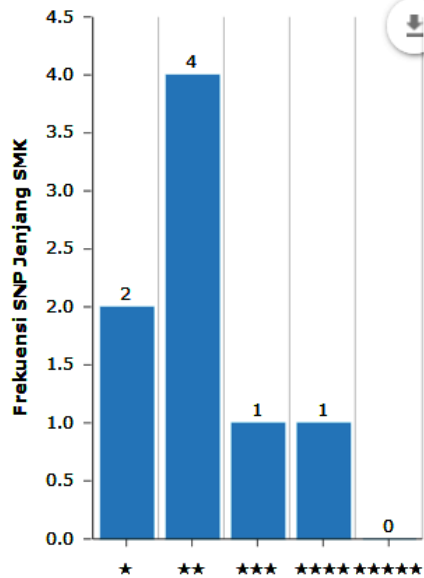
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5	★★★★
2.	Standar Isi	4.5	★★★★
3.	Standar Proses	4.77	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.15	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.4	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.57	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.86	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.42	★★

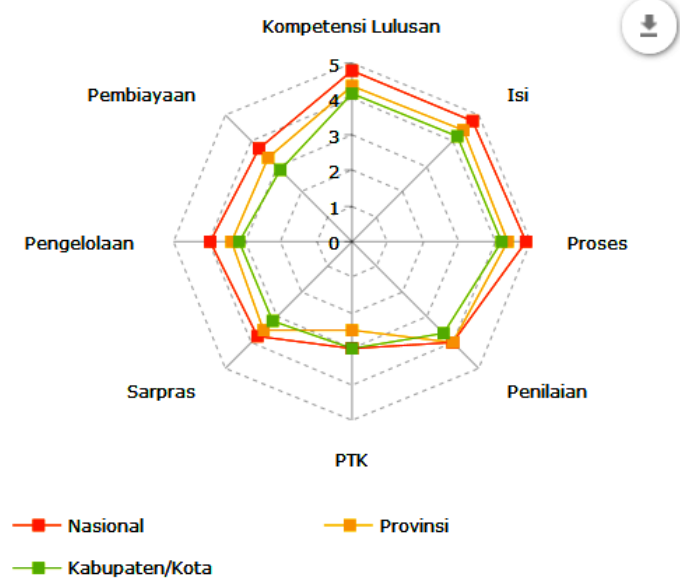
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Manokwari

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

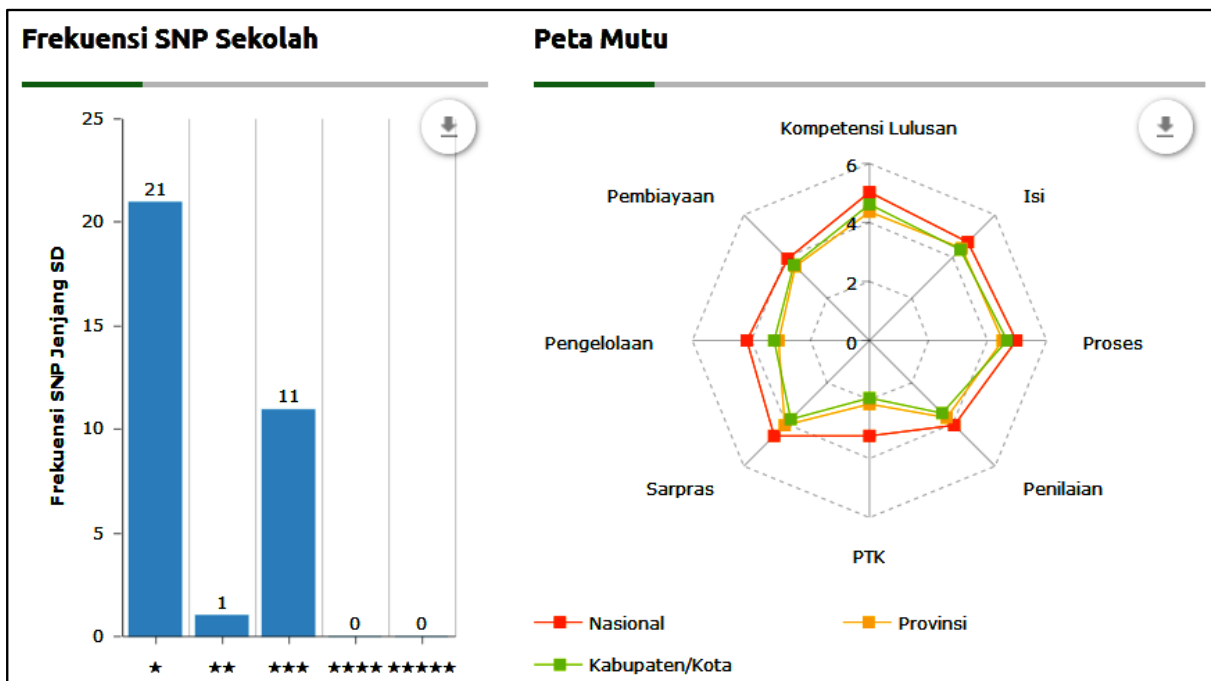
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.13	★★★
2.	Standar Isi	4.2	★★★
3.	Standar Proses	4.17	★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.62	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.97	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.13	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.15	★★
8.	Standar Pembiayaan	2.85	★★

Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Manokwari Selatan



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

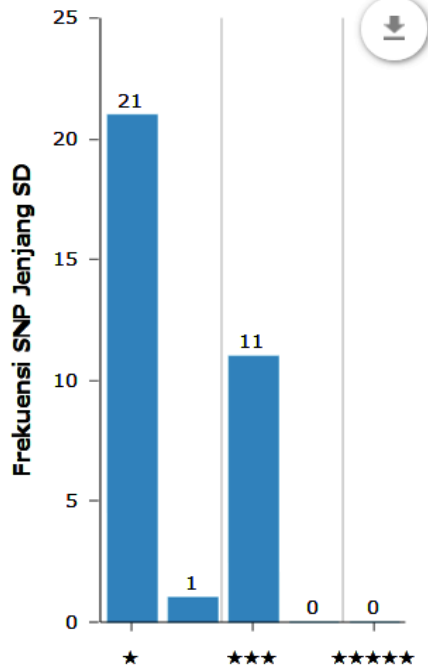
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.59	★★★
2.	Standar Isi	4.35	★★★
3.	Standar Proses	4.64	★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.51	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.97	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.73	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.23	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.62	★★

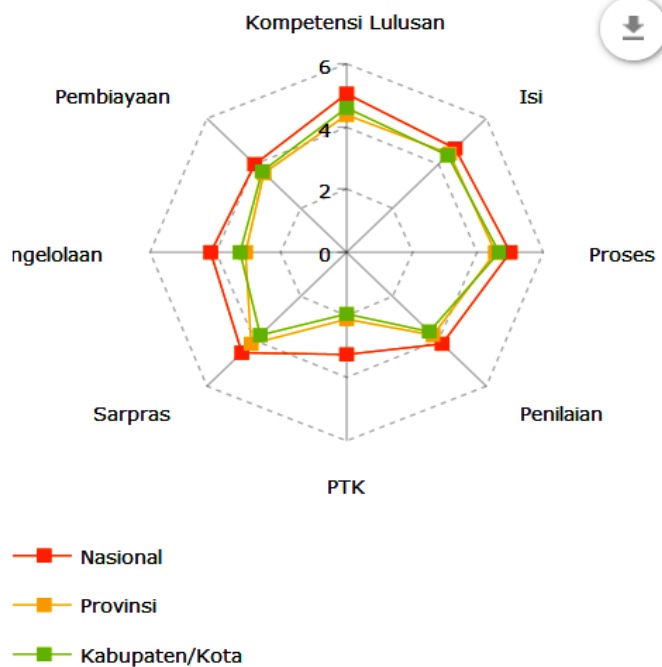
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Manokwari Selatan

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

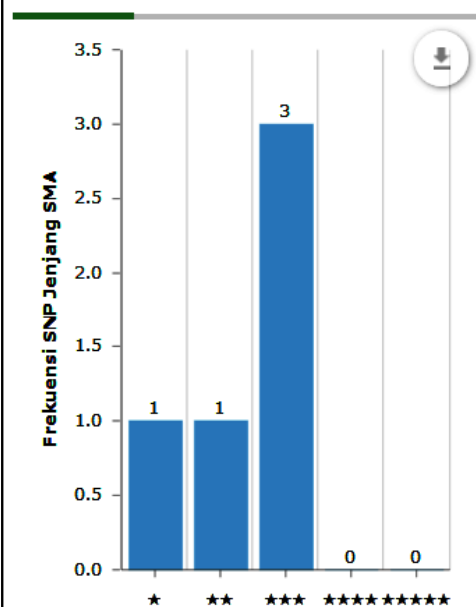
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.59	★★★★
2.	Standar Isi	4.35	★★★★
3.	Standar Proses	4.64	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.51	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.97	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.73	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.23	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.62	★★★

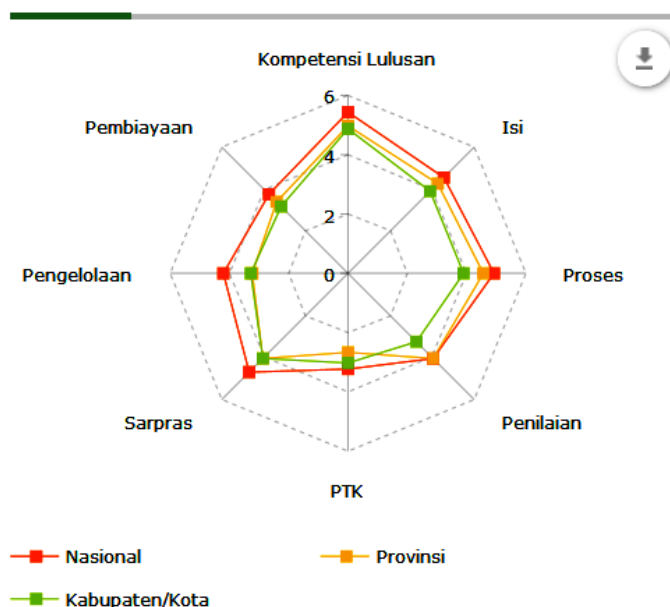
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Manokwari Selatan

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

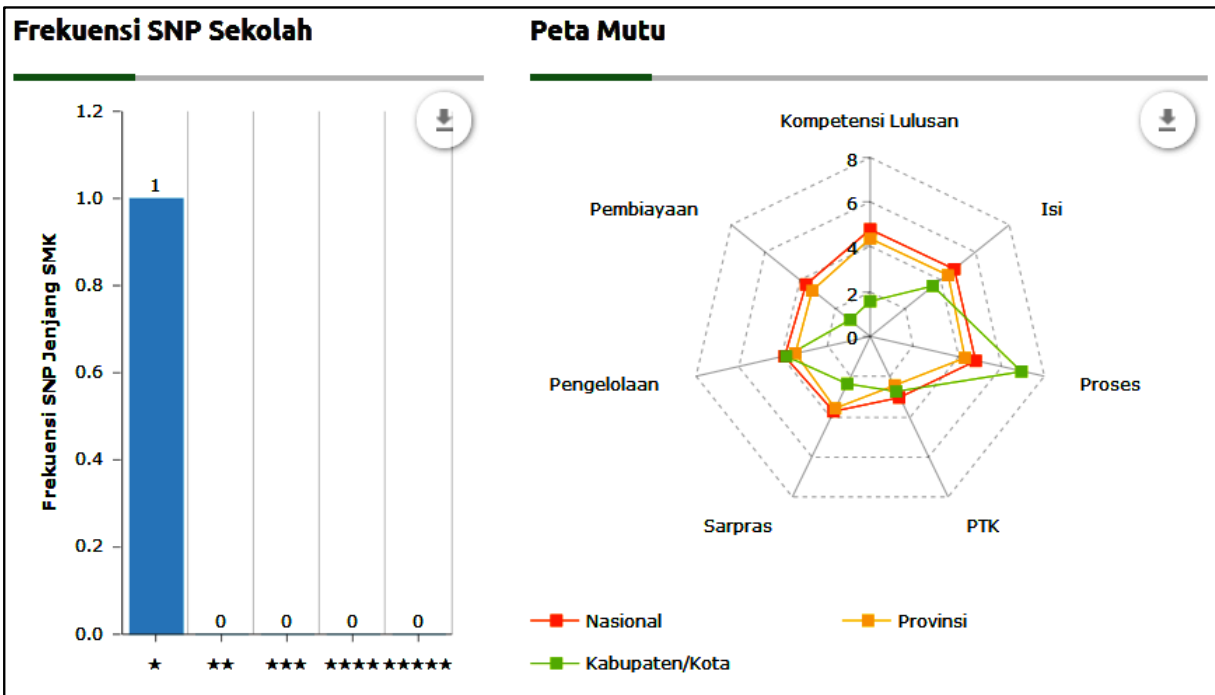
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.85	★★★★
2.	Standar Isi	3.88	★★★★
3.	Standar Proses	3.88	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.3	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.03	★★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.04	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.28	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.19	★★★

Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Manokwari Selatan

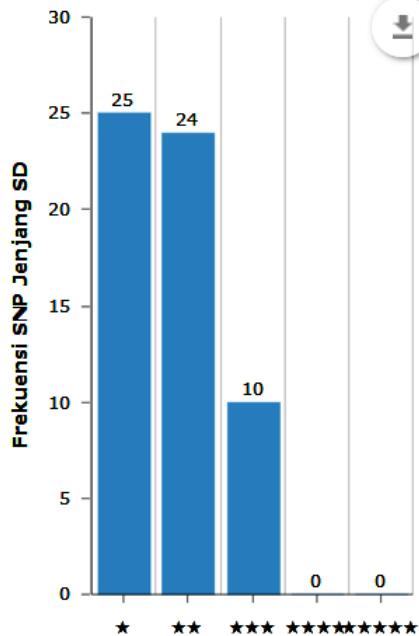


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
			SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1.6	★
2.	Standar Isi	3.59	★★
3.	Standar Proses	7	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	0	★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.76	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.36	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.86	★★★
8.	Standar Pembiayaan	1.17	★

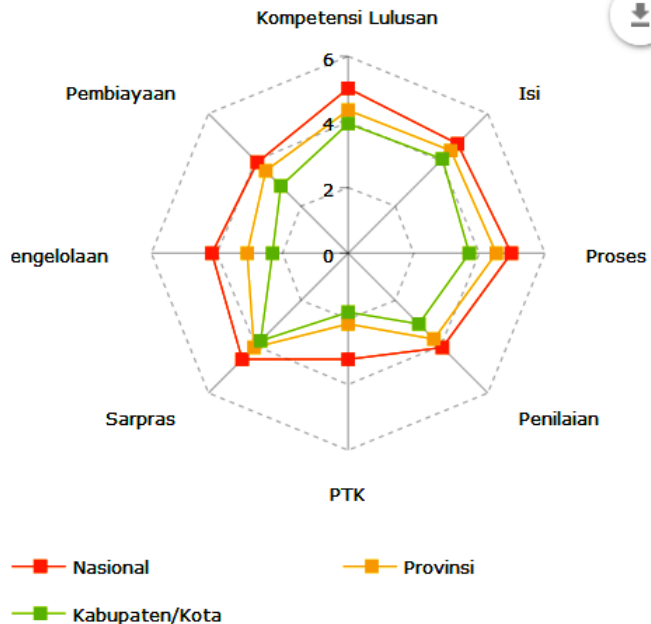
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Maybrat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

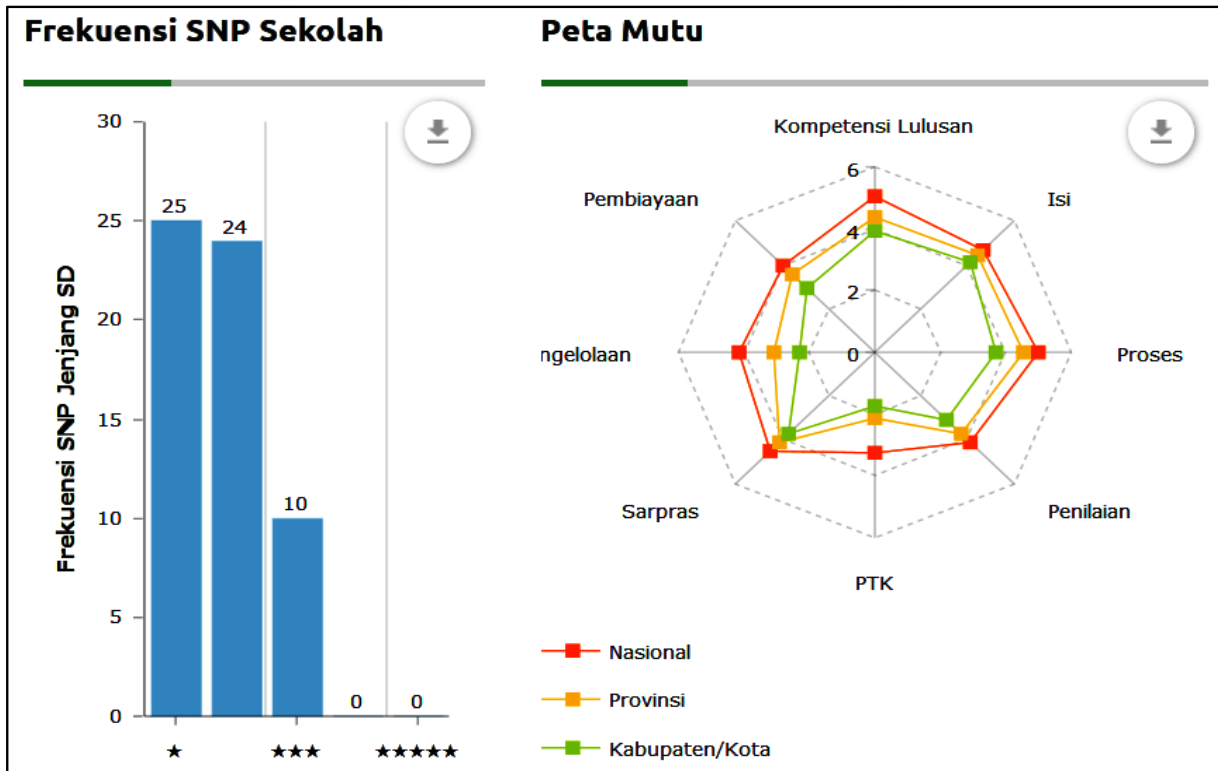
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.93	★★★★
2.	Standar Isi	4.07	★★★★
3.	Standar Proses	3.71	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.07	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.77	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.76	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.3	★★
8.	Standar Pembiayaan	2.92	★★

Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Maybrat

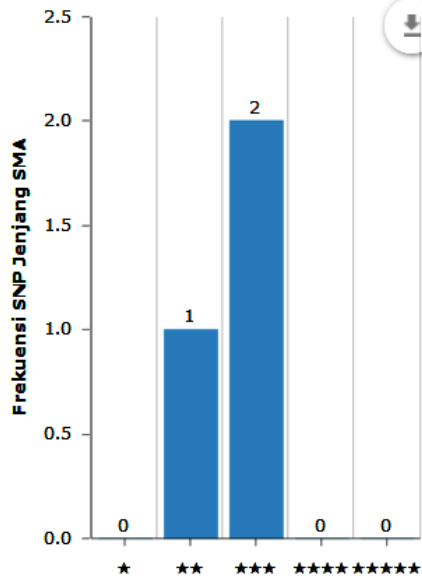


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
	STANDAR	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.93	★★★★
2.	Standar Isi	4.07	★★★★
3.	Standar Proses	3.71	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.07	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.77	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.76	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.3	★★
8.	Standar Pembiayaan	2.92	★★

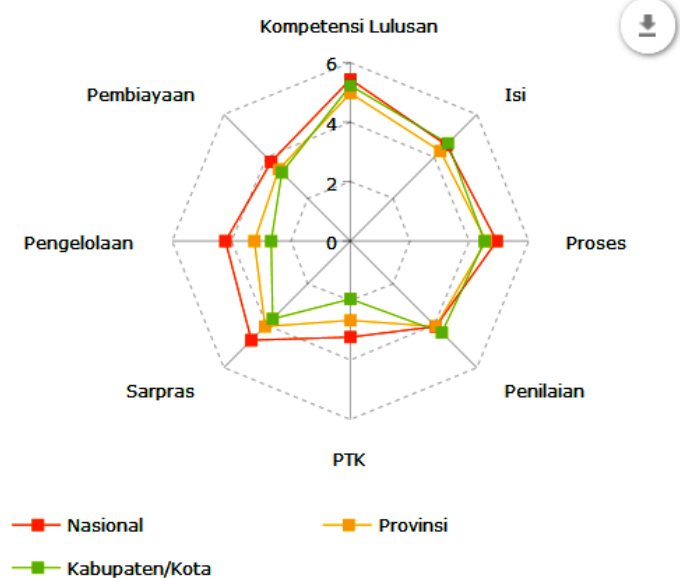
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Maybrat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

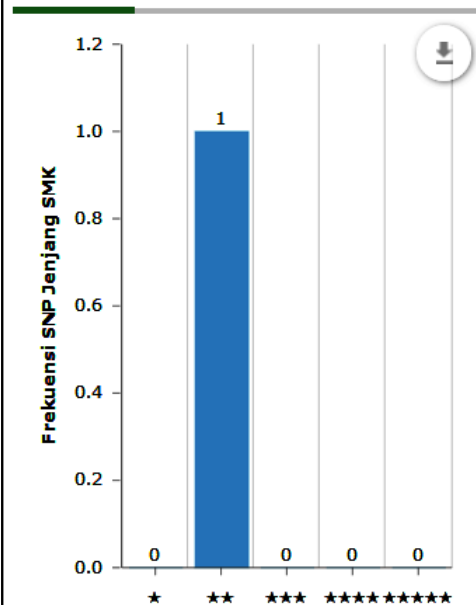
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.24	★★★★★
2.	Standar Isi	4.62	★★★★
3.	Standar Proses	4.5	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.37	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.96	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.71	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.67	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.28	★★

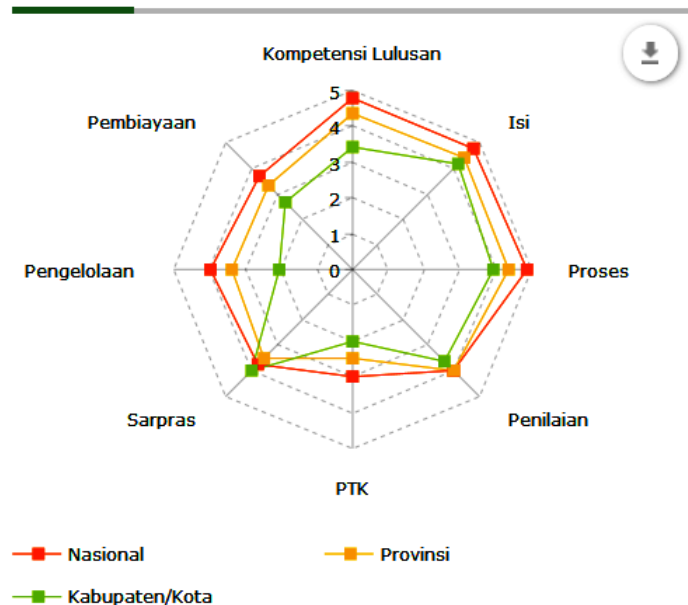
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Maybrat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

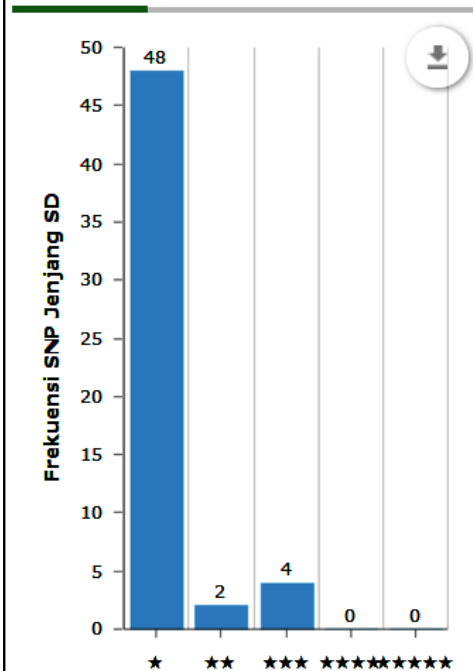
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.41	★★
2.	Standar Isi	4.15	★★★
3.	Standar Proses	3.93	★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.61	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.96	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.05	★★
8.	Standar Pembiayaan	2.67	★★

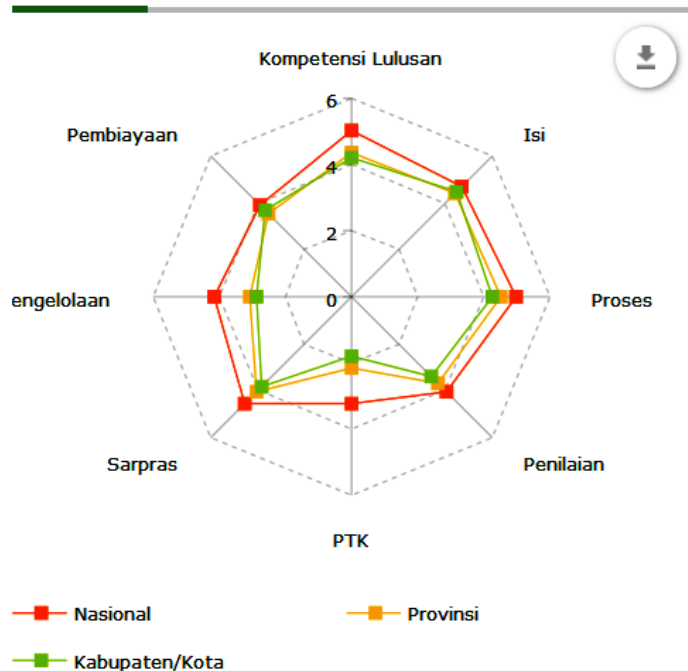
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Pegunungan Arfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

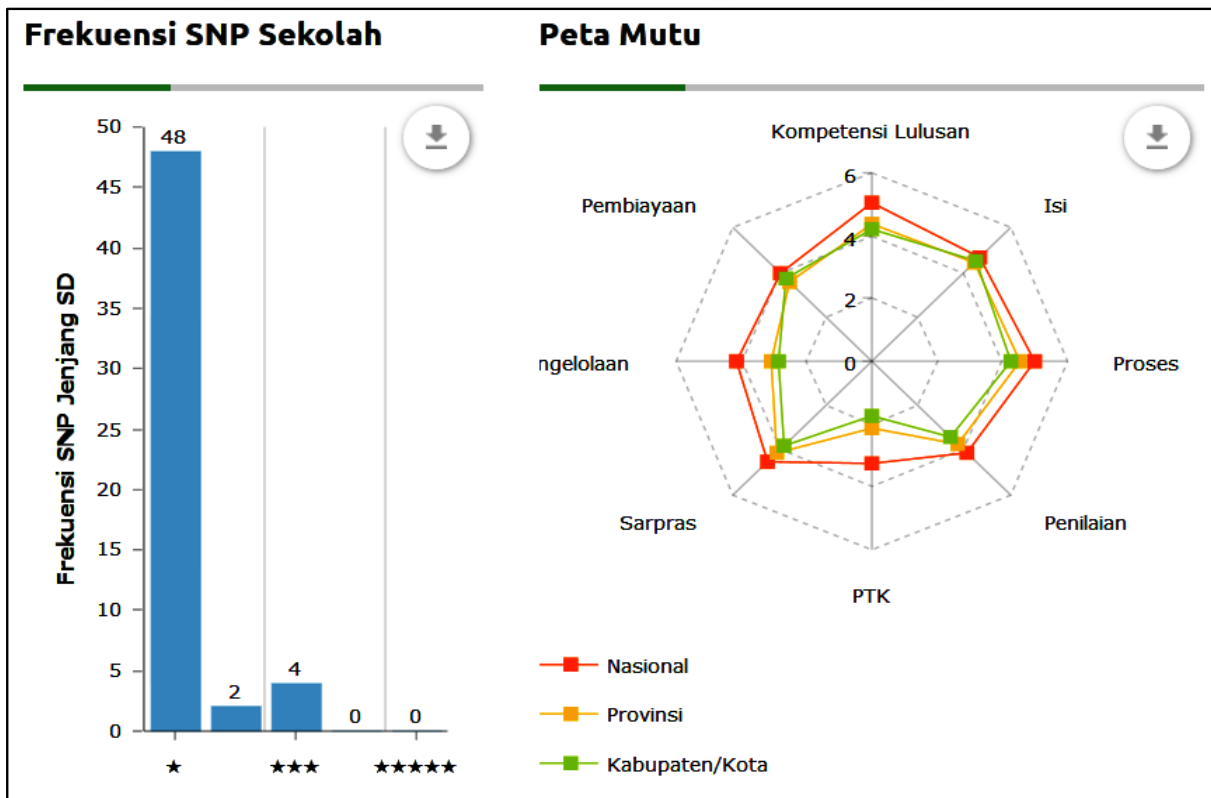
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.22	★★★★
2.	Standar Isi	4.53	★★★★
3.	Standar Proses	4.26	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.45	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.77	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.82	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.86	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.7	-

Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Pegunungan Arfak



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

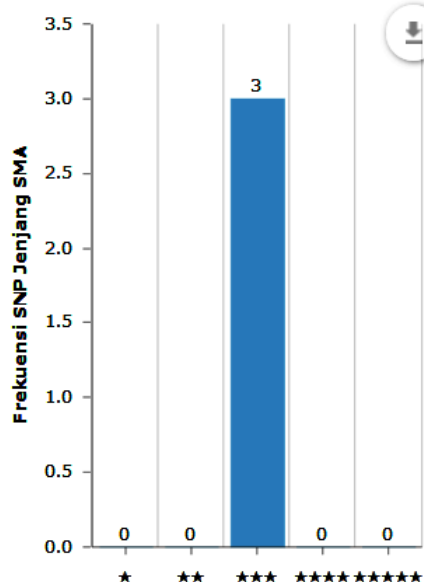
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.22	★★★★
2.	Standar Isi	4.53	★★★★
3.	Standar Proses	4.26	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.45	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.77	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.82	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.86	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.7	-

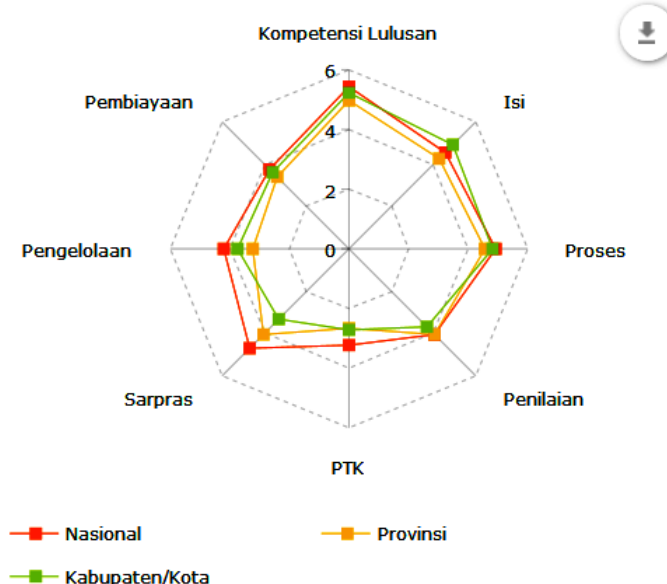
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Pegunungan Arfak

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

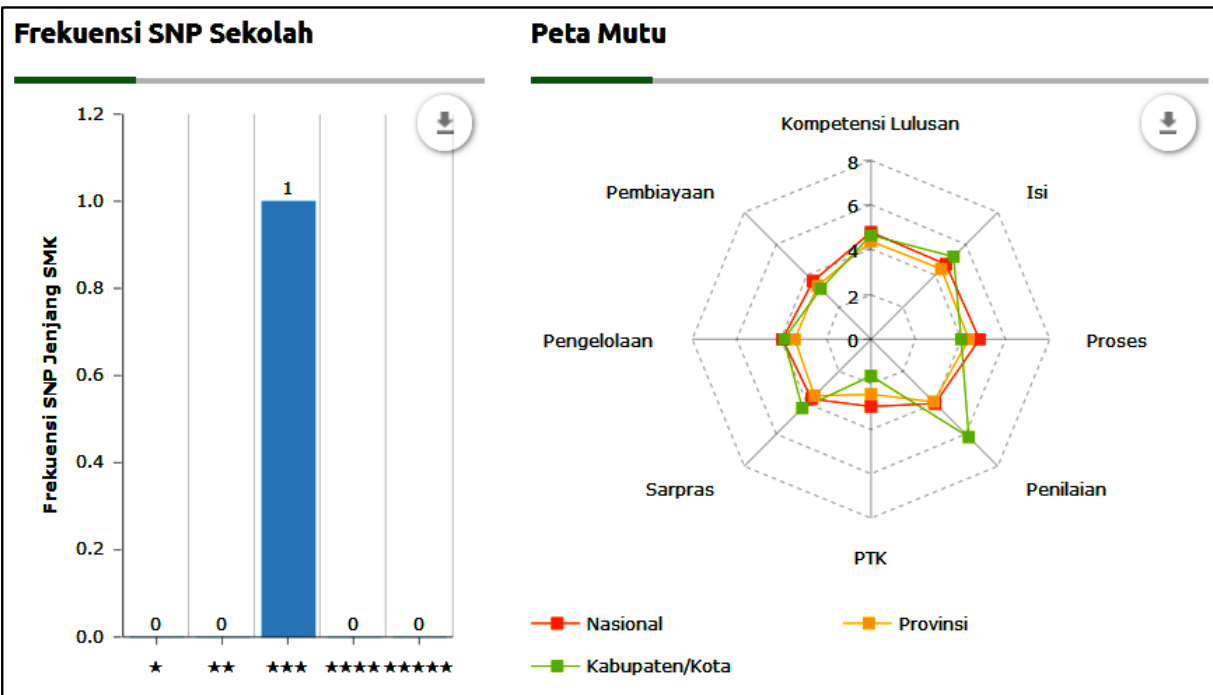
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.23	★★★★★
2.	Standar Isi	4.91	★★★★
3.	Standar Proses	4.8	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.67	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.7	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.33	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.73	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.66	★★

Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Pegunungan Arfak

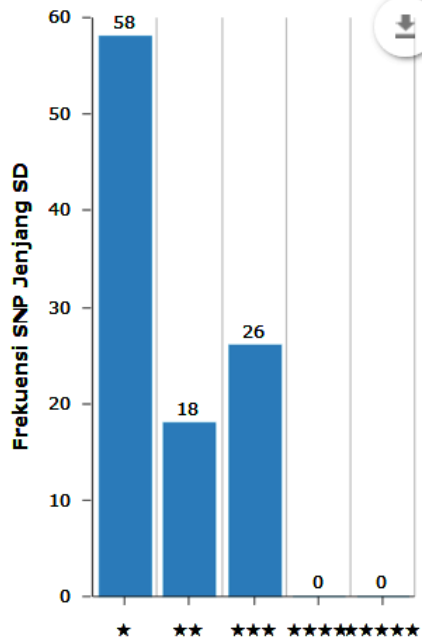


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.63	★★★
2.	Standar Isi	5.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.01	★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6.17	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.62	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.39	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.92	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.22	★★

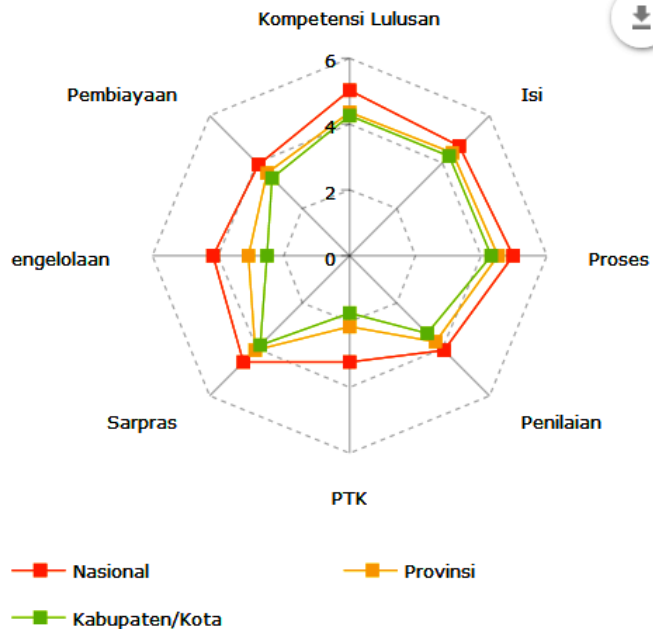
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Raja Ampat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

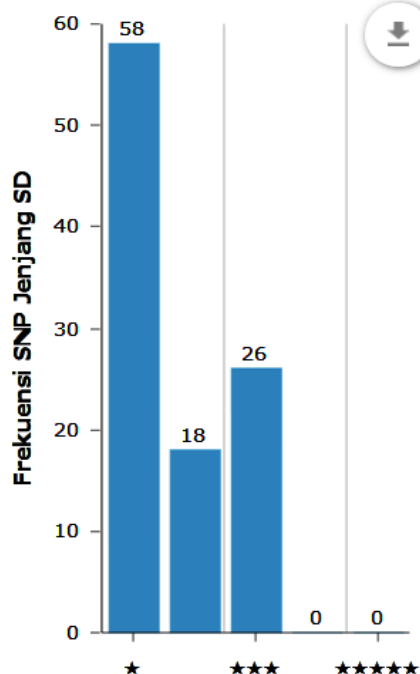
STANDAR INDIKATOR SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.24	★★★★
2.	Standar Isi	4.29	★★★★
3.	Standar Proses	4.3	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.31	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.76	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.85	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.52	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.34	★★

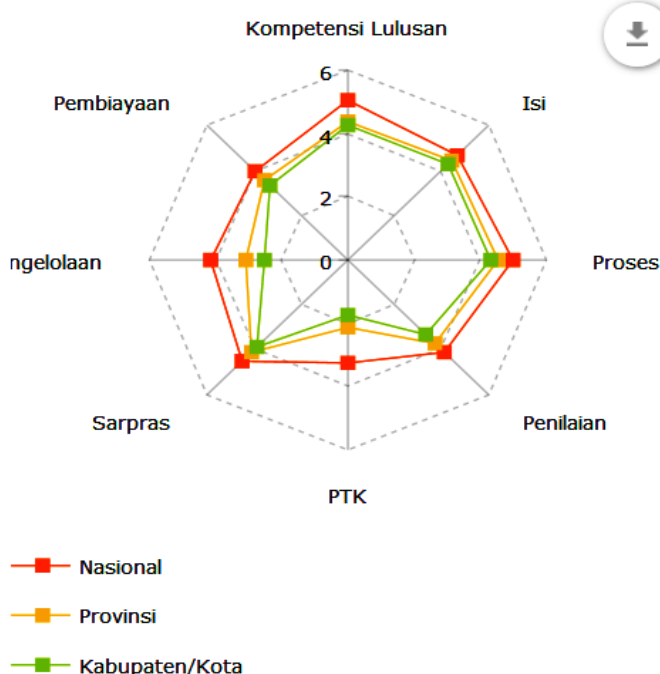
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Raja Ampat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

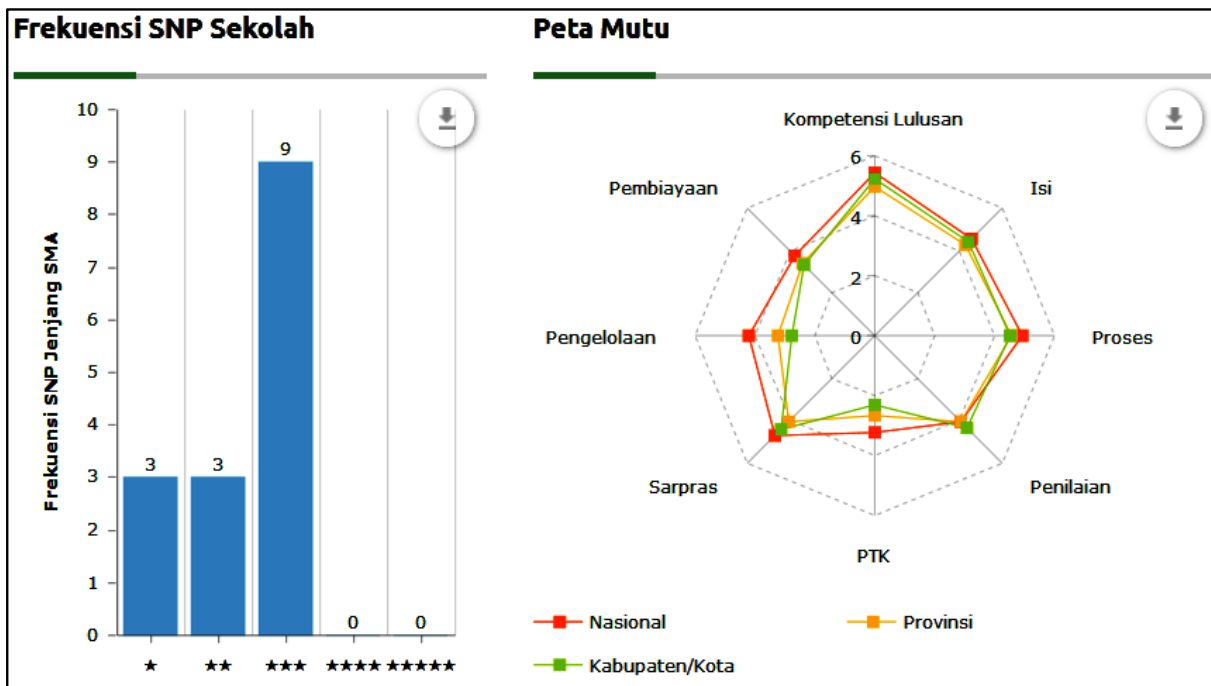
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.24	★★★★
2.	Standar Isi	4.29	★★★★
3.	Standar Proses	4.3	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.31	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.76	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.85	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.52	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.34	★★

Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Raja Ampat



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

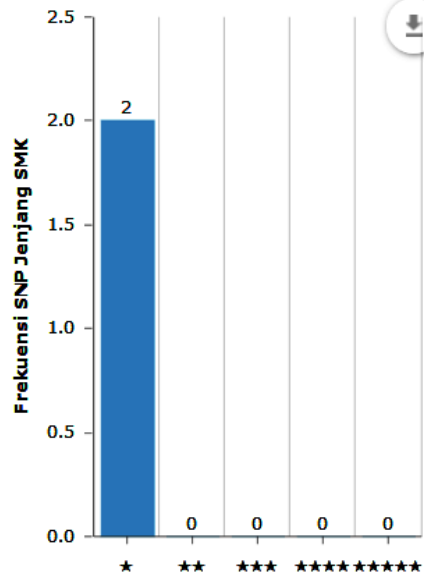
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.25	★★★★★
2.	Standar Isi	4.41	★★★★
3.	Standar Proses	4.52	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.35	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.33	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.47	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.78	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.32	★★

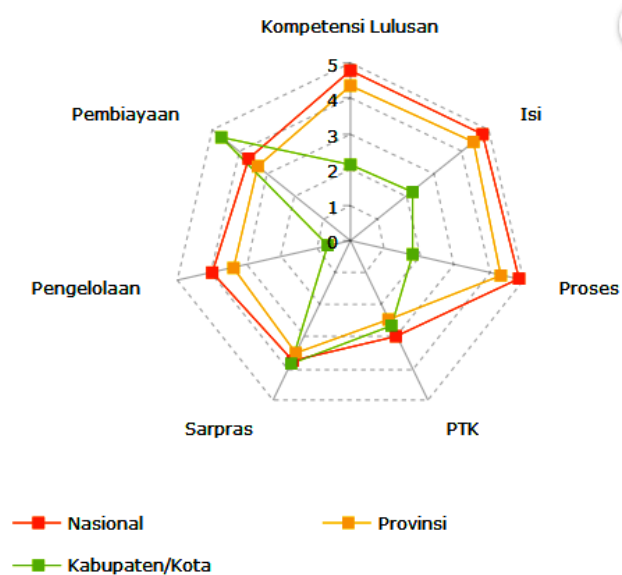
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Raja Ampat

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

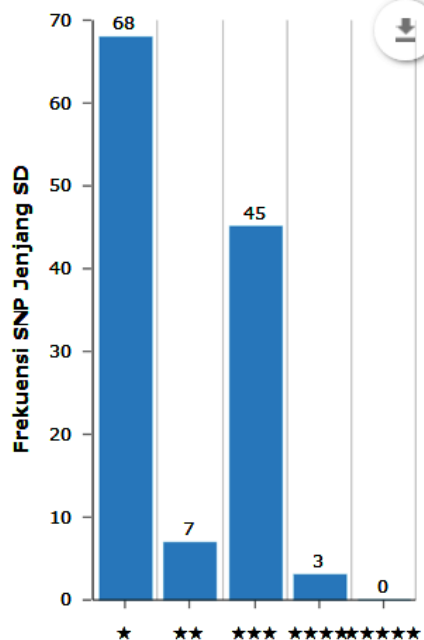
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	2.12	★★
2.	Standar Isi	2.24	★★
3.	Standar Proses	1.8	★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	0	★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.65	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.86	★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	0.65	★
8.	Standar Pembiayaan	4.67	★★★

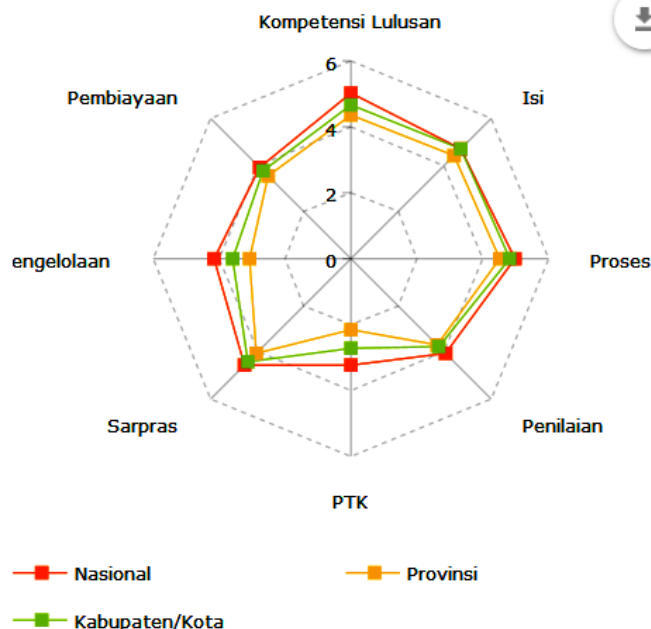
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

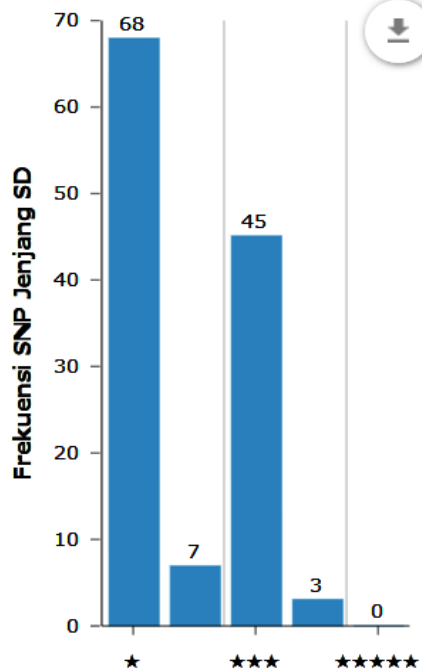
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.69	★★★★
2.	Standar Isi	4.7	★★★★
3.	Standar Proses	4.84	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.75	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.74	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.44	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.57	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.73	★★★★

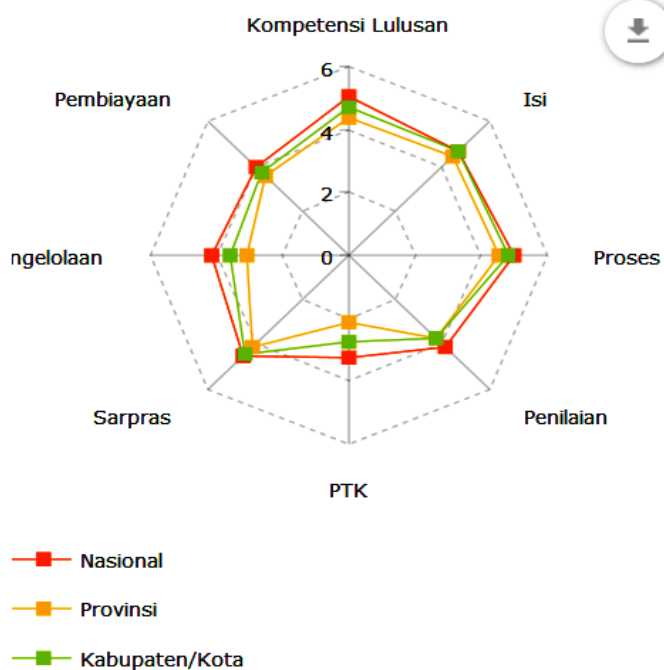
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

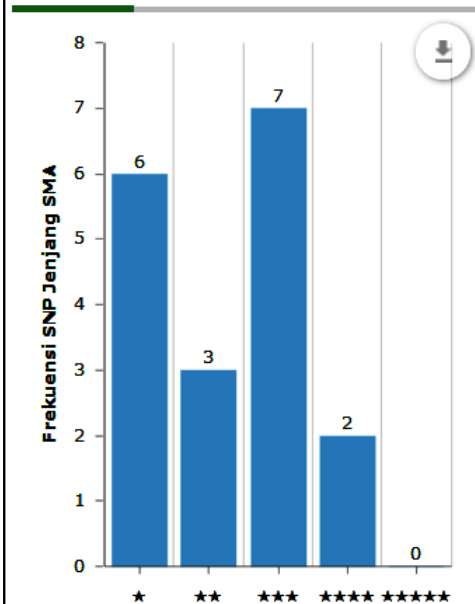
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.69	★★★★
2.	Standar Isi	4.7	★★★★
3.	Standar Proses	4.84	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.75	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.74	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.44	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.57	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.73	★★★★

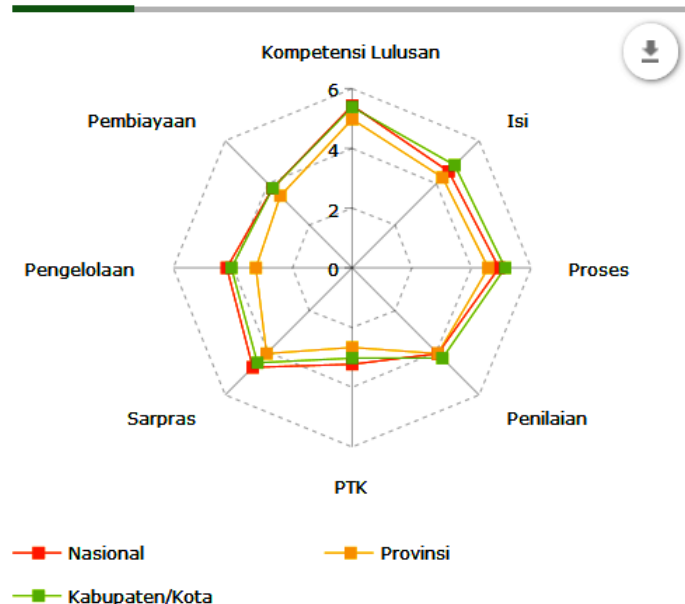
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

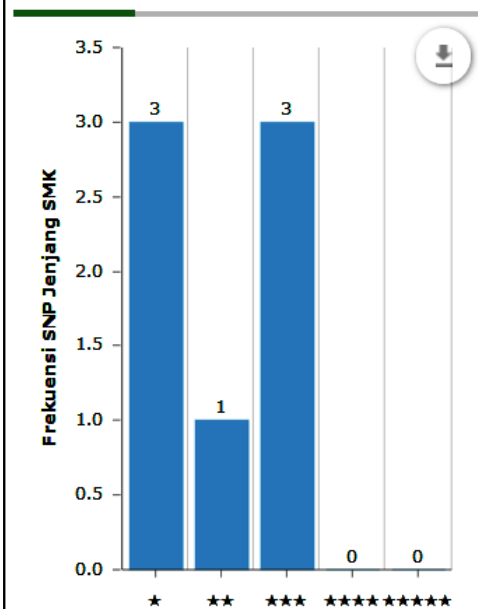
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.39	★★★★★
2.	Standar Isi	4.89	★★★★
3.	Standar Proses	5.11	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.32	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.04	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.5	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.03	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.76	★★★★

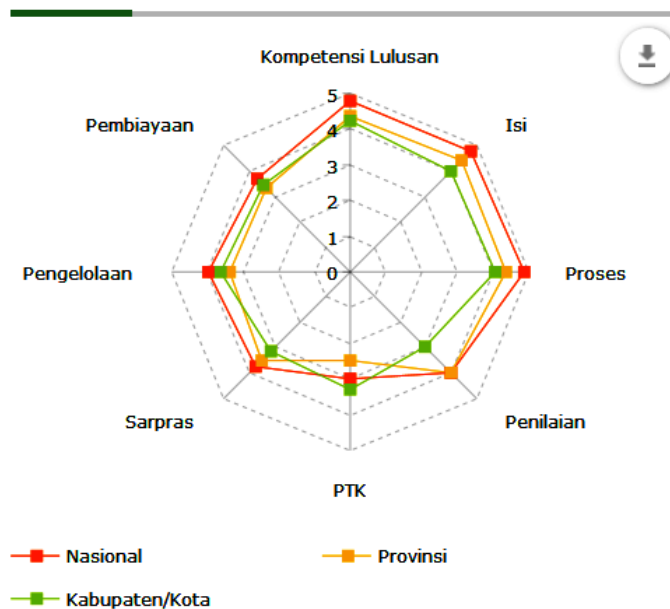
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

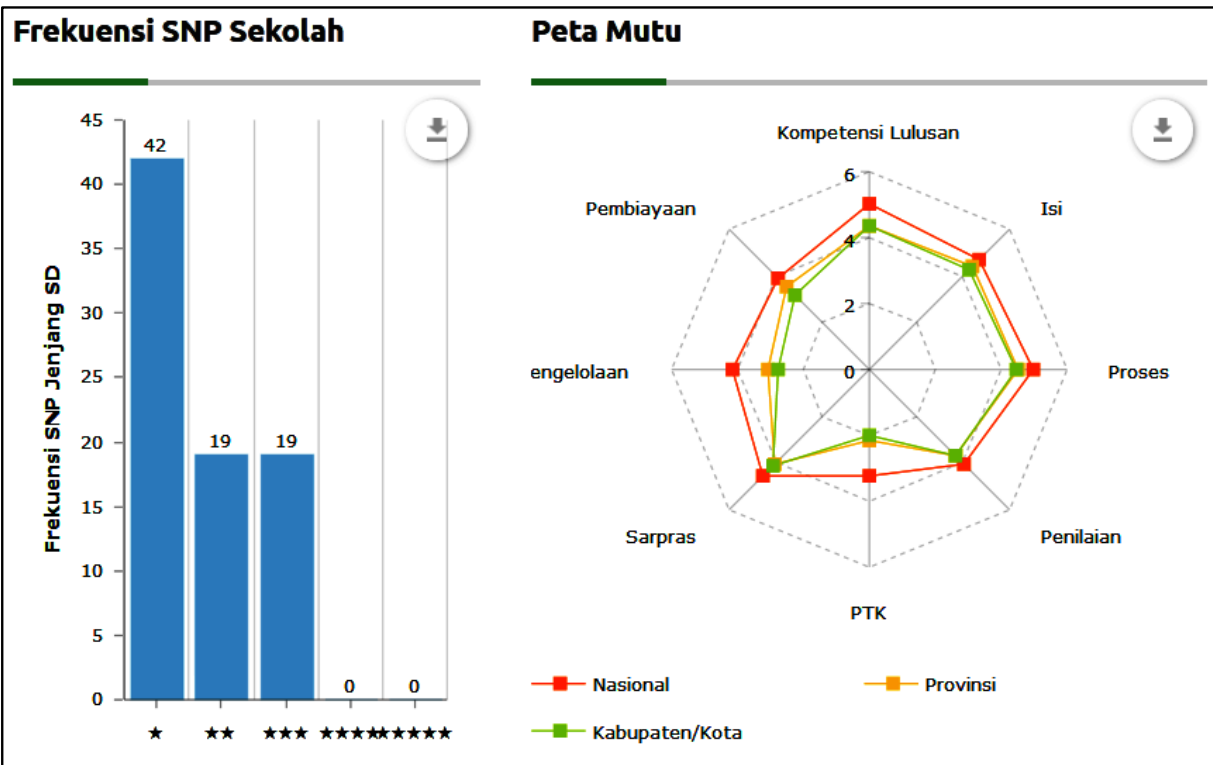
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.22	★★★★
2.	Standar Isi	4.03	★★★★
3.	Standar Proses	4.05	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	2.99	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.27	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.14	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.61	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.48	★★

Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Sorong Selatan

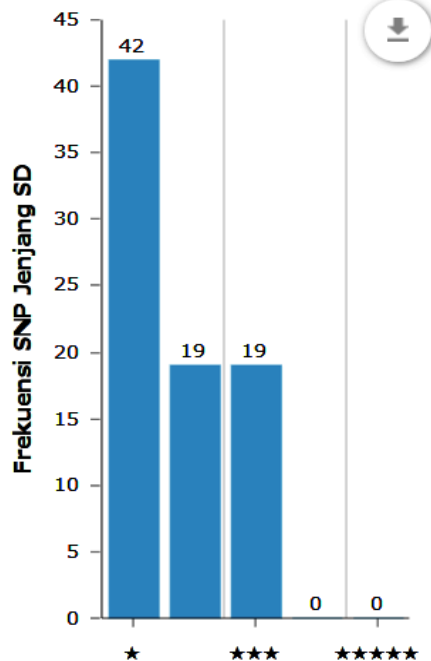


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
	STANDAR	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator		Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan		4.34 ★★★
2.	Standar Isi		4.24 ★★★
3.	Standar Proses		4.47 ★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan		3.69 ★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.99 ★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4.17 ★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan		2.76 ★★
8.	Standar Pembiayaan		3.24 ★★

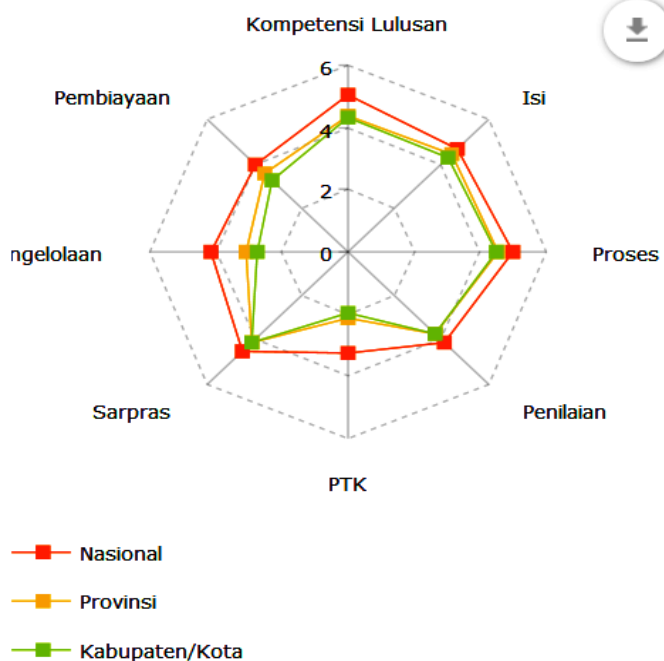
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Sorong Selatan

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

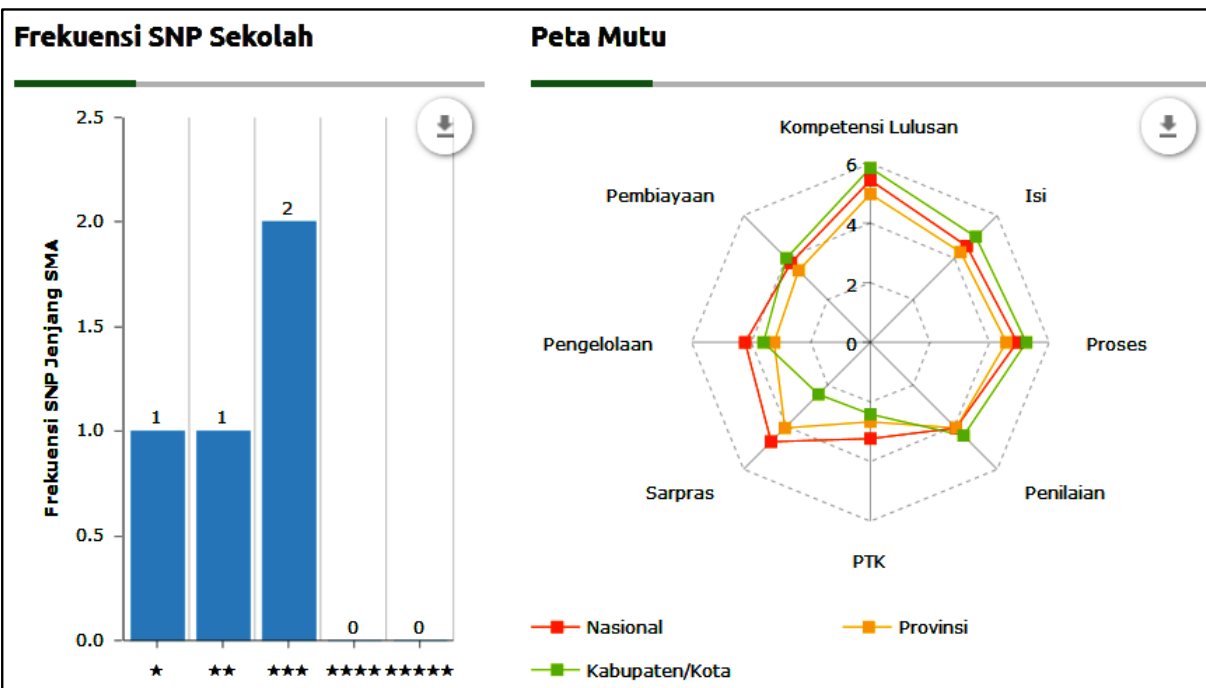
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.34	★★★★
2.	Standar Isi	4.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.47	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.69	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.99	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.17	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.76	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.24	★★

Raport Mutu

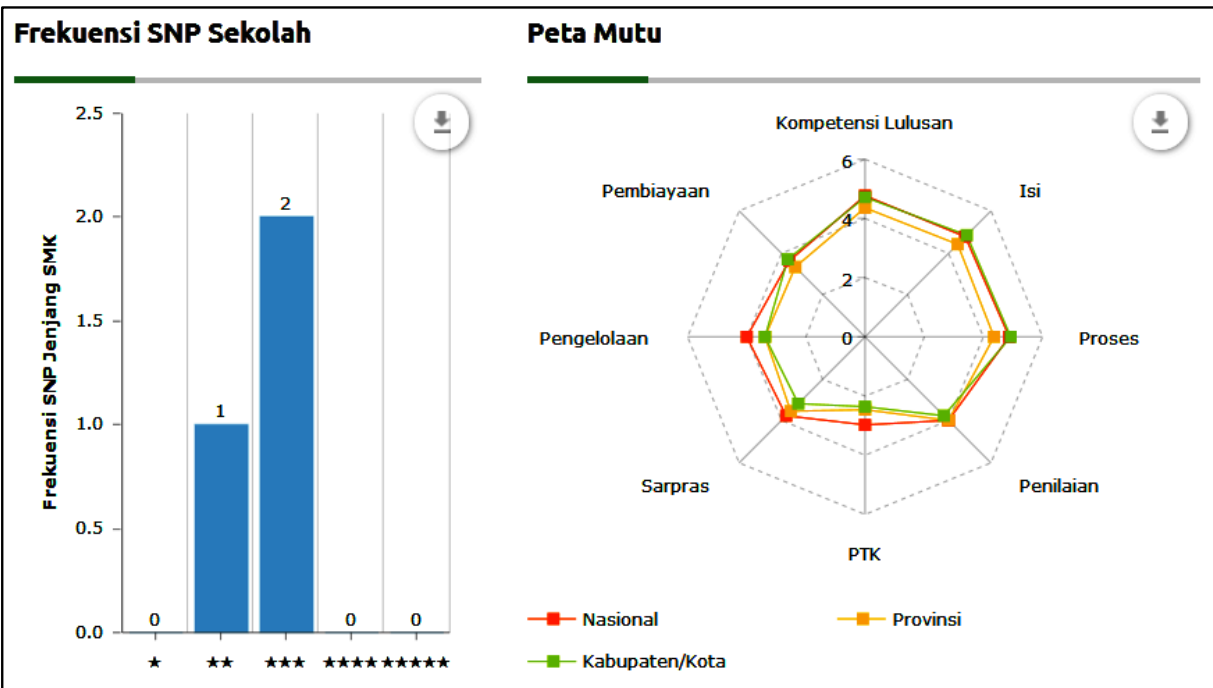
Jenjang SMA Kab. Sorong Selatan



Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
		SUB INDIKATOR	
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.84	★★★★★
2.	Standar Isi	5.01	★★★
3.	Standar Proses	5.22	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.47	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.41	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.47	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.58	★★
8.	Standar Pembiayaan	4.02	★★★

Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Sorong Selatan

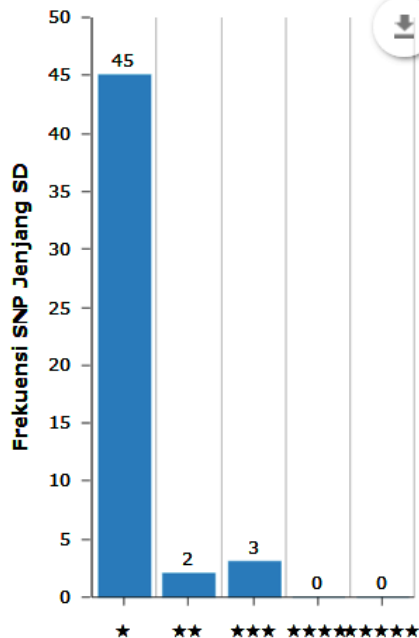


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
		SUB INDIKATOR	
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.72	★★★★
2.	Standar Isi	4.87	★★★★
3.	Standar Proses	4.92	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.78	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.35	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.2	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.4	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.71	★★★★

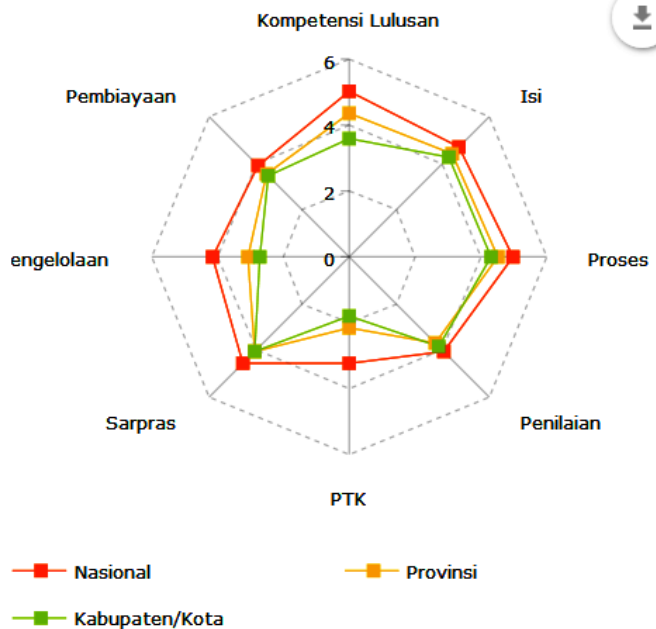
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Tambrau

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

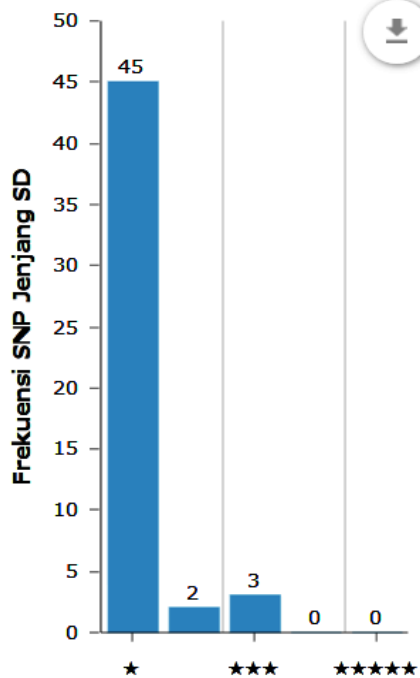
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.59	★★
2.	Standar Isi	4.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.31	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.82	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.79	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.09	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.74	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.49	★★

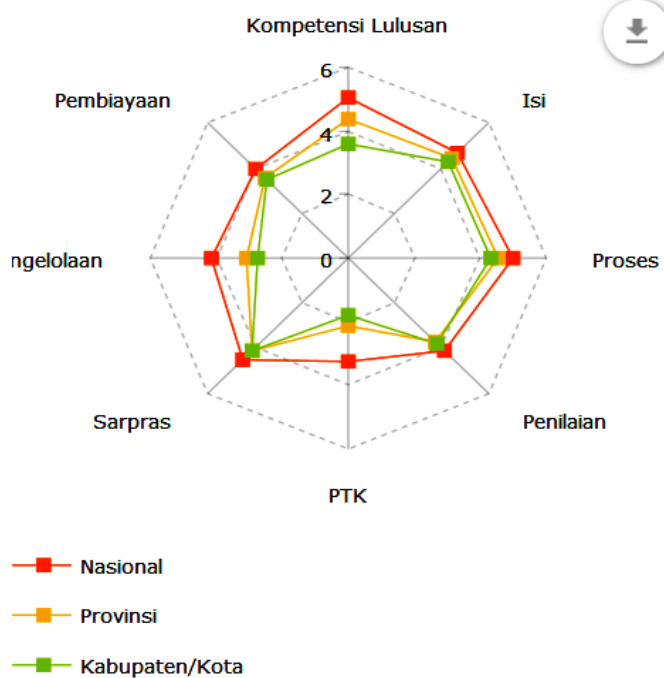
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Tambrau

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

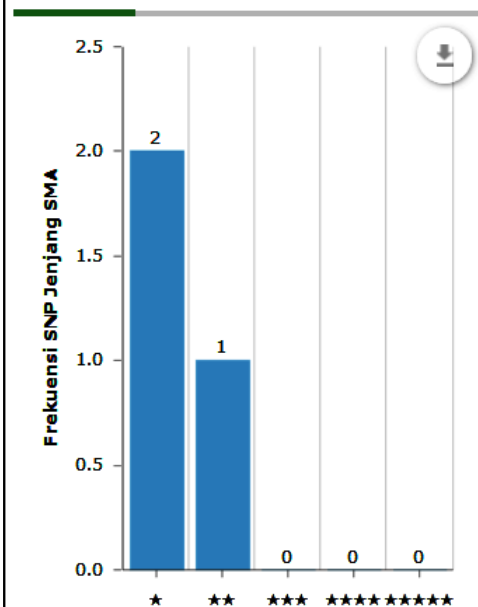
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.59	★★
2.	Standar Isi	4.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.31	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.82	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.79	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.09	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.74	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.49	★★

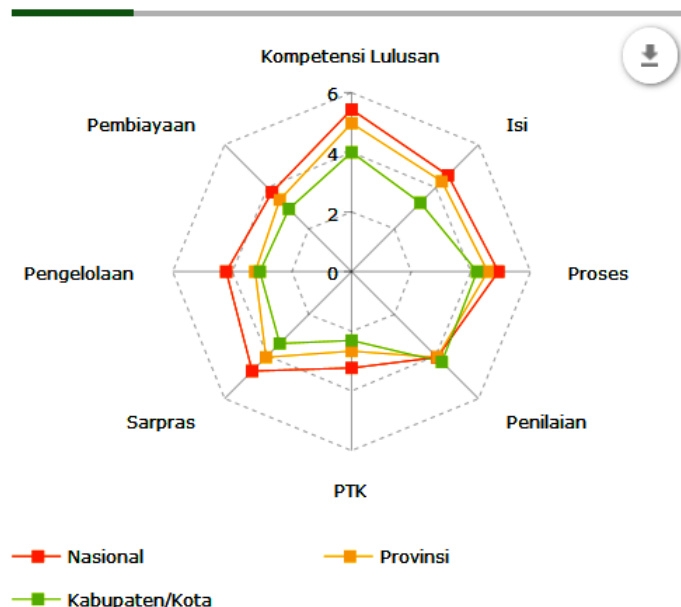
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Tambrau

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

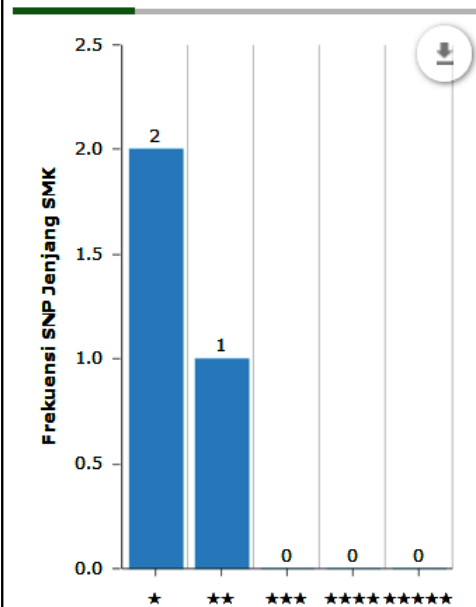
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.01	★★★★
2.	Standar Isi	3.26	★★
3.	Standar Proses	4.19	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.23	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.31	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.45	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.05	★★
8.	Standar Pembiayaan	2.98	★★

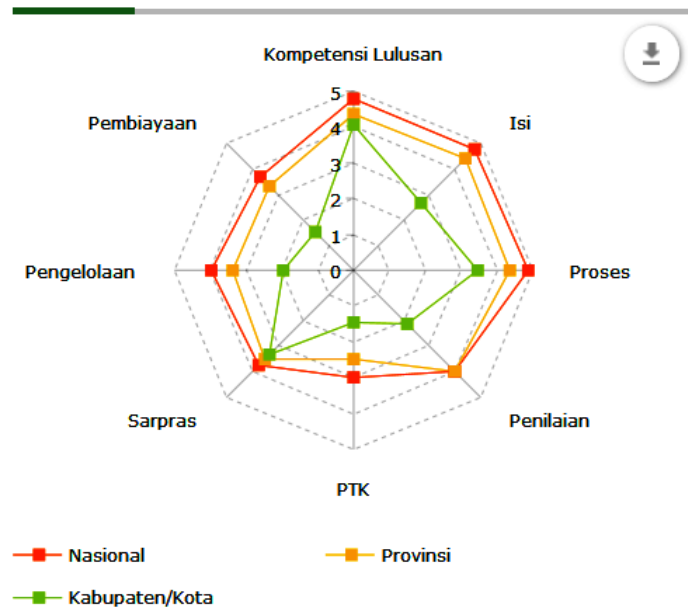
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Tambora

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

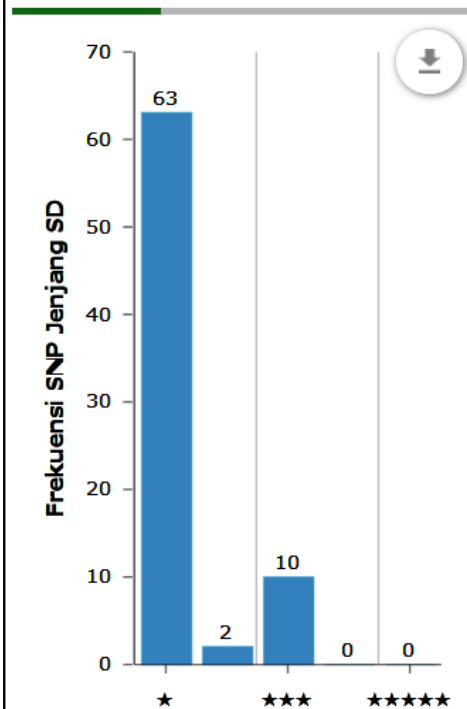
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.08	★★★★
2.	Standar Isi	2.69	★★
3.	Standar Proses	3.47	★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	2.1	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.47	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.34	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	1.98	★
8.	Standar Pembiayaan	1.55	★

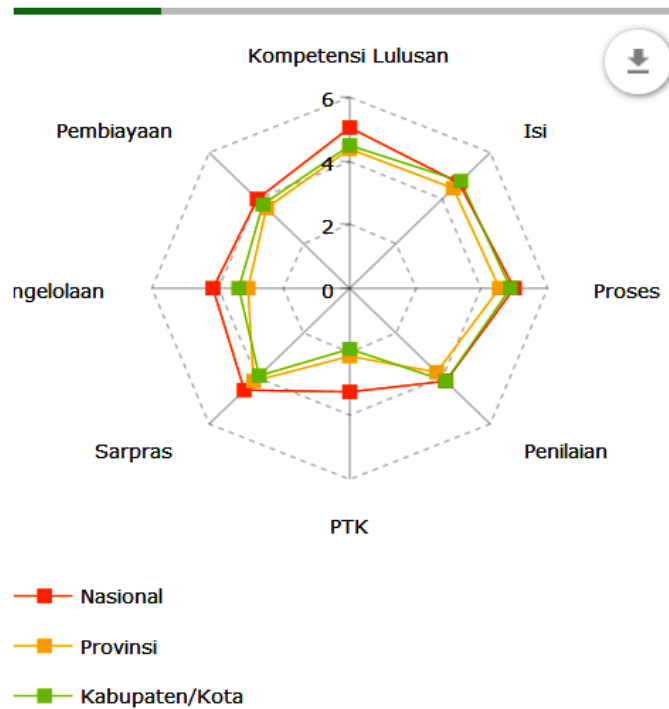
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Teluk Bintuni

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

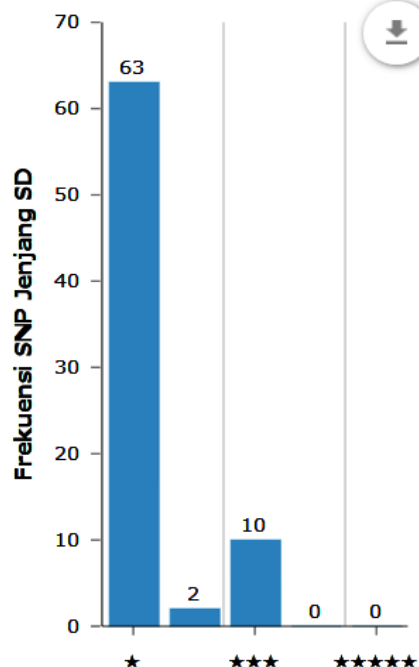
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.51	★★★★
2.	Standar Isi	4.77	★★★★
3.	Standar Proses	4.9	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.16	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.89	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.86	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.38	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.73	★★★★

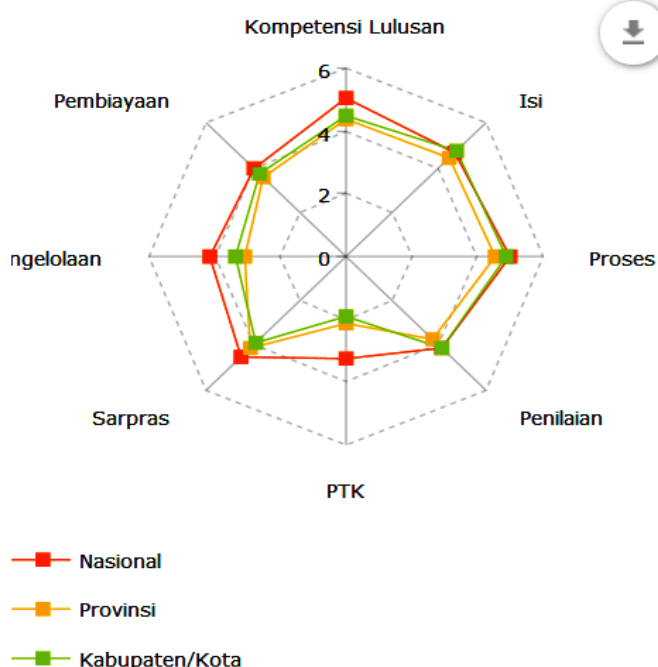
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Teluk Bintuni

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

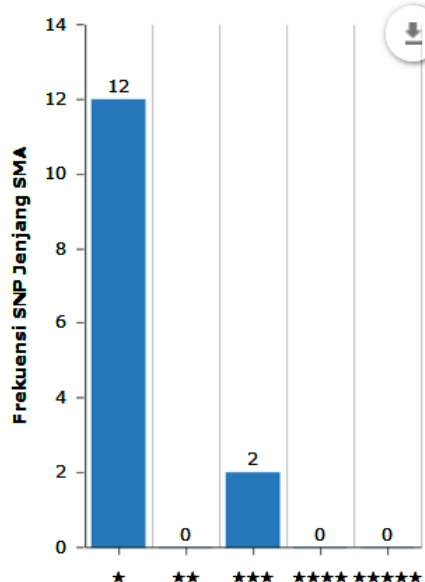
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.51	★★★★
2.	Standar Isi	4.77	★★★★
3.	Standar Proses	4.9	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.16	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.89	★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.86	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.38	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.73	★★★★

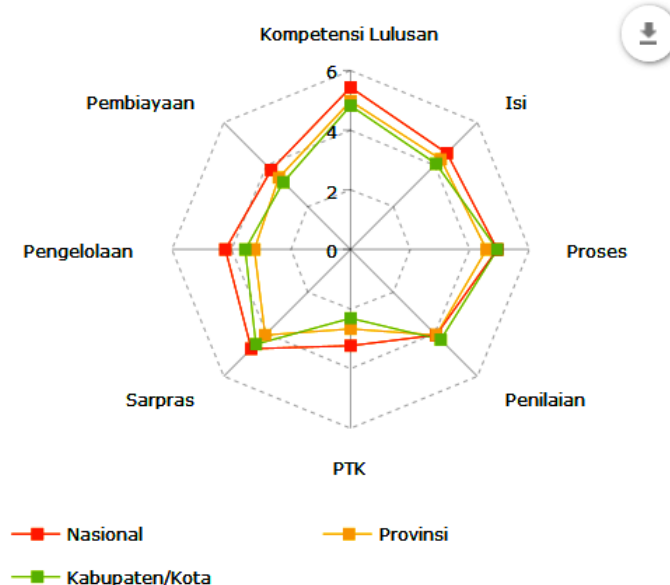
Raport Mutu

Jenjang SMA Kab. Teluk Bintuni

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

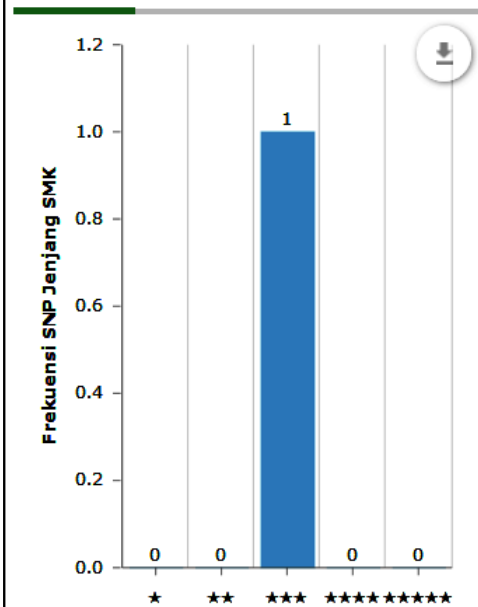
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.84	★★★★
2.	Standar Isi	4.05	★★★★
3.	Standar Proses	4.94	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.26	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.31	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.51	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.52	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.19	★★

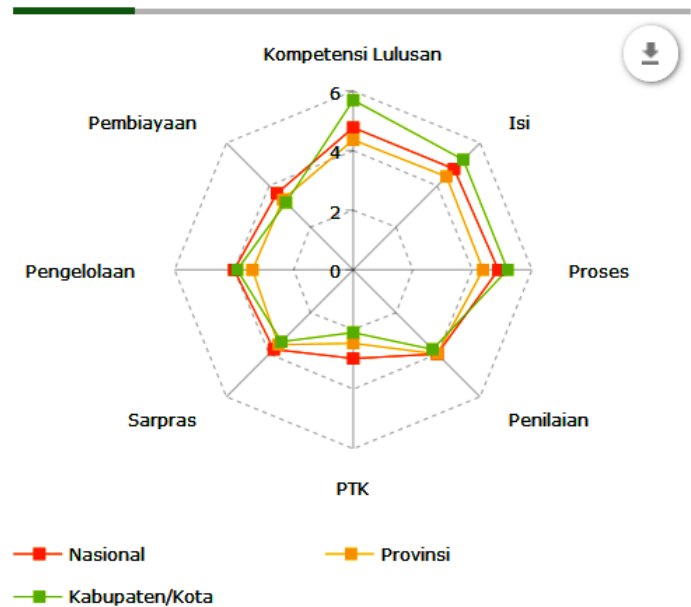
Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Teluk Bintuni

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

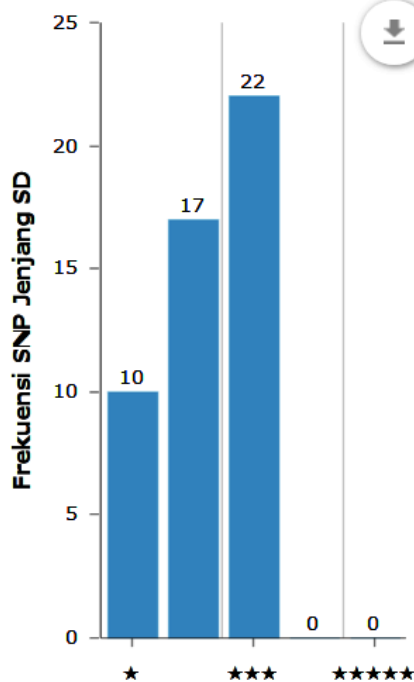
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.68	★★★★★
2.	Standar Isi	5.23	★★★★★
3.	Standar Proses	5.16	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.77	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.1	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.42	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.89	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.21	★★

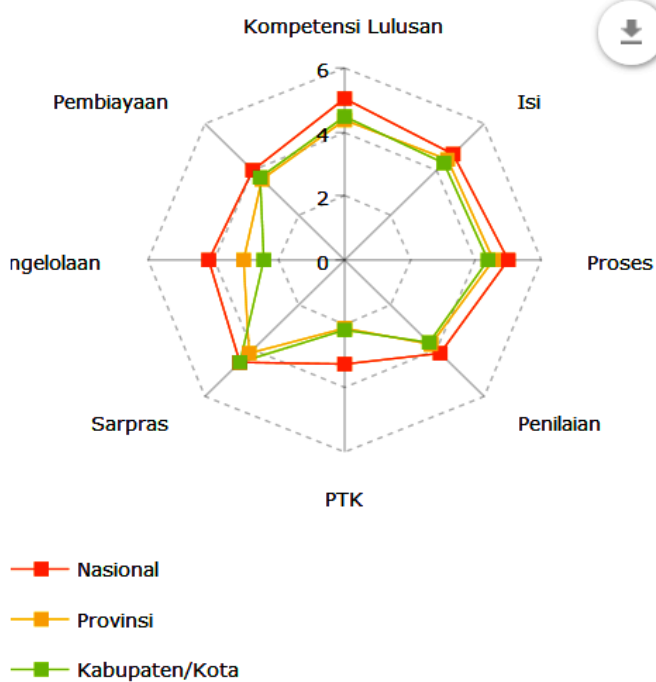
Raport Mutu

Jenjang SD Kab. Teluk Wondama

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

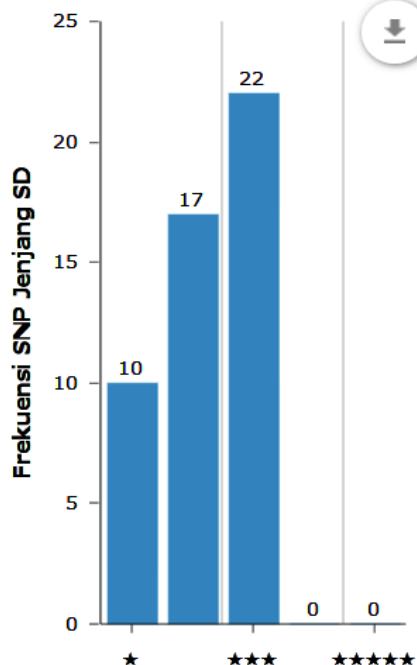
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.49	★★★★
2.	Standar Isi	4.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.4	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.63	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.17	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.51	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.49	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.66	★★

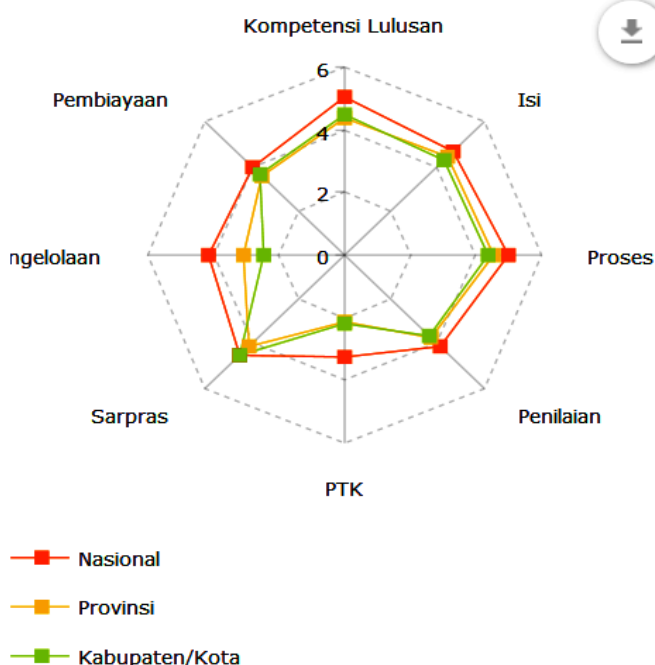
Raport Mutu

Jenjang SMP Kab. Teluk Wondama

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

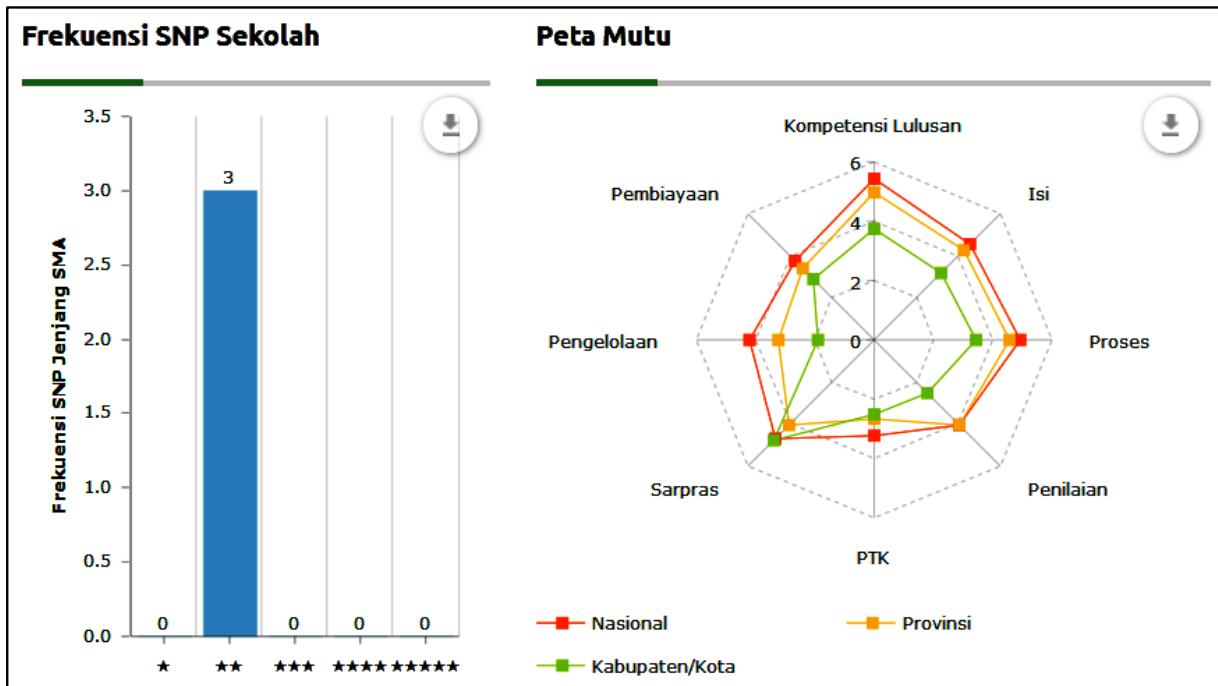
INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.49	★★★★
2.	Standar Isi	4.24	★★★★
3.	Standar Proses	4.4	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.63	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.17	★★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.51	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.49	★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.66	★★★

Raport Mutu

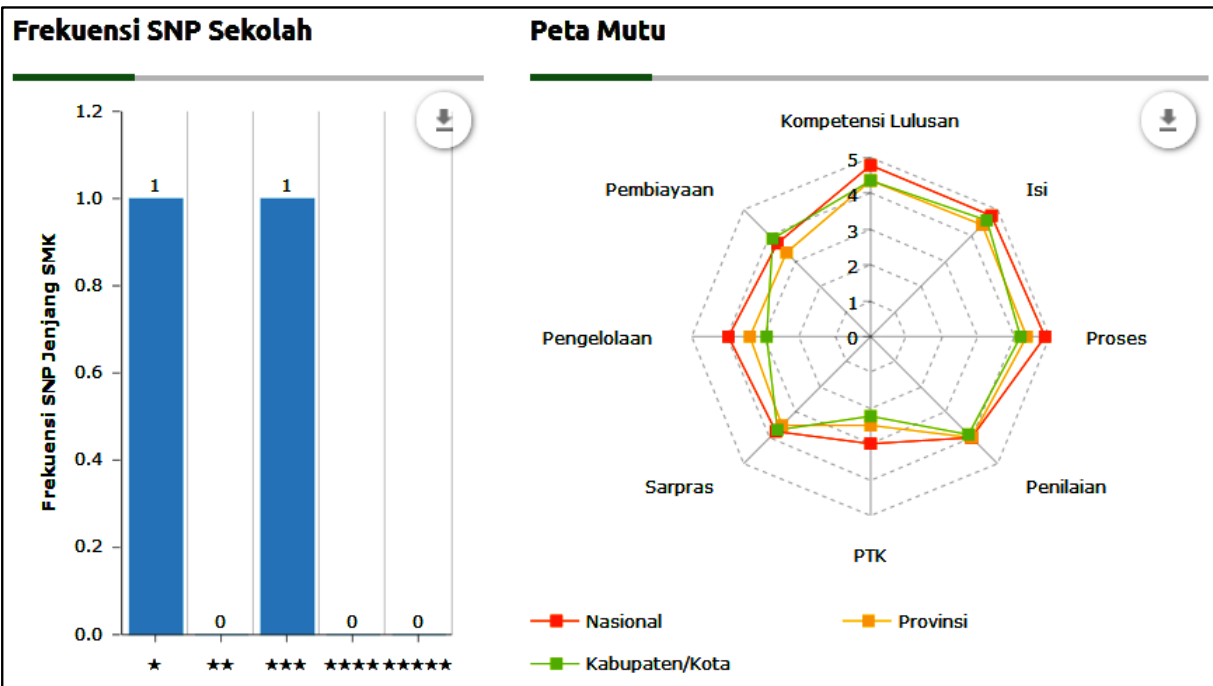
Jenjang SMA Kab. Teluk Wondama



Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
		SUB INDIKATOR	
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.73	★★★★
2.	Standar Isi	3.17	★★★
3.	Standar Proses	3.45	★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	2.58	★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.53	★★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.78	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	1.9	★
8.	Standar Pembiayaan	2.87	★★★

Raport Mutu

Jenjang SMK Kab. Teluk Wondama

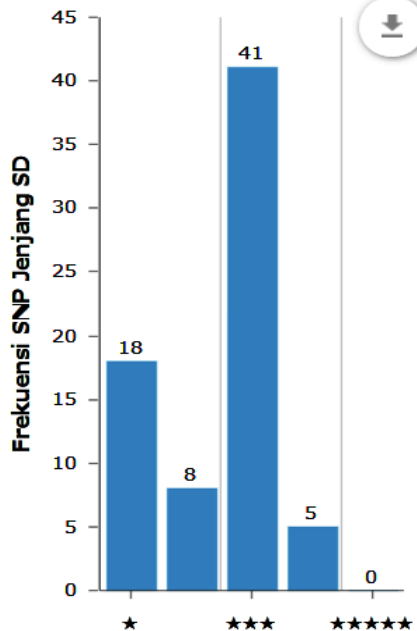


Standar, Indikator Dan Sub Indikator			
		STANDAR	INDIKATOR
			SUB INDIKATOR
Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.37	★★★★
2.	Standar Isi	4.63	★★★★
3.	Standar Proses	4.19	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.84	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.22	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.69	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.89	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.84	★★★★

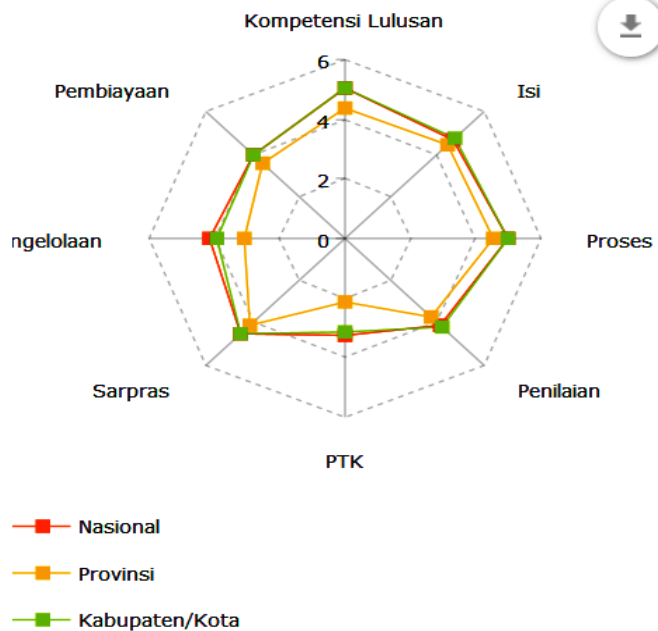
Raport Mutu

Jenjang SD Kota Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

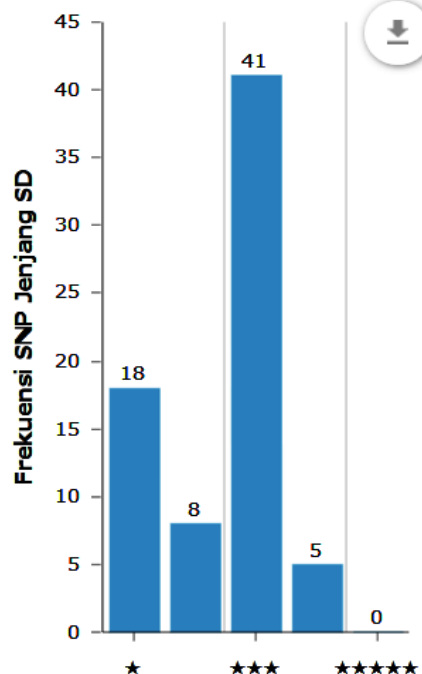
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.07	★★★★★
2.	Standar Isi	4.78	★★★★
3.	Standar Proses	4.98	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.19	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.14	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.48	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.9	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.9	★★★★

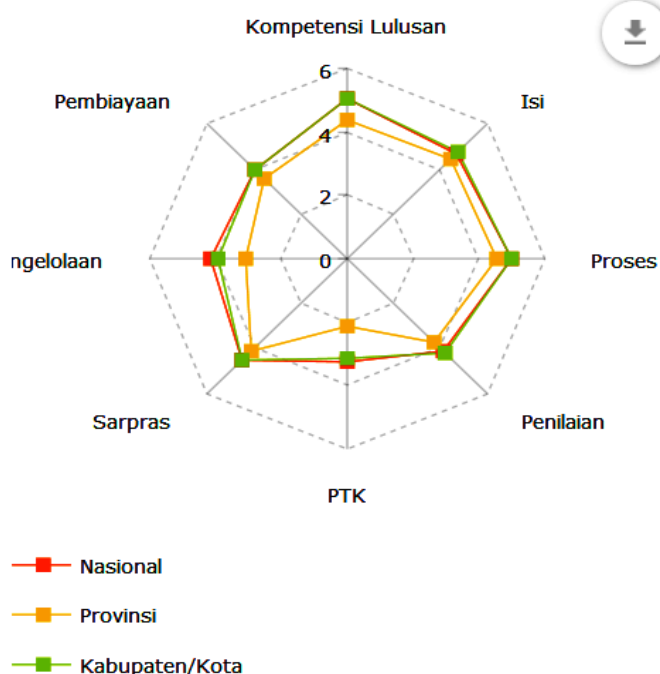
Raport Mutu

Jenjang SMP Kota Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

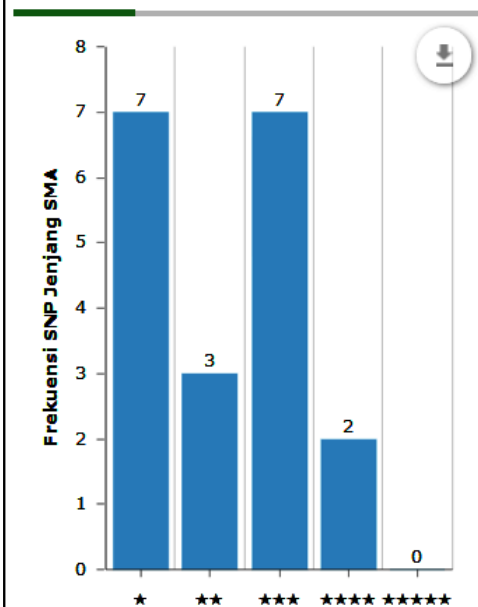
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.07	★★★★★
2.	Standar Isi	4.78	★★★★
3.	Standar Proses	4.98	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.19	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.14	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.48	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.9	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	3.9	★★★★

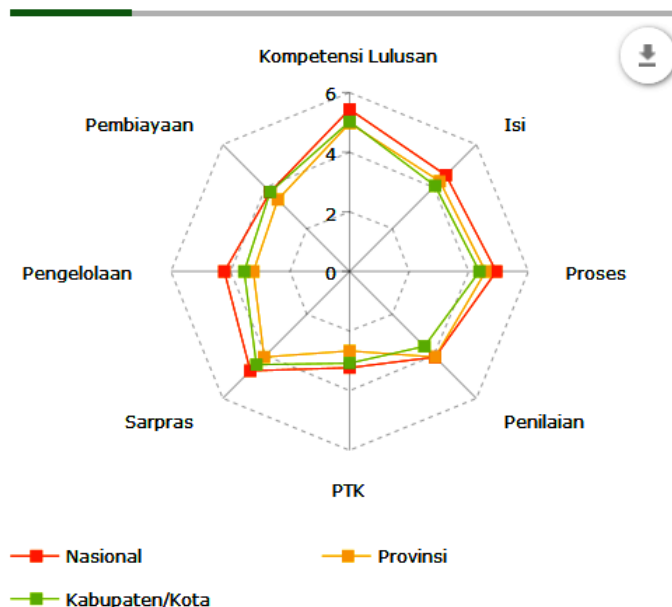
Raport Mutu

Jenjang SMA Kota Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

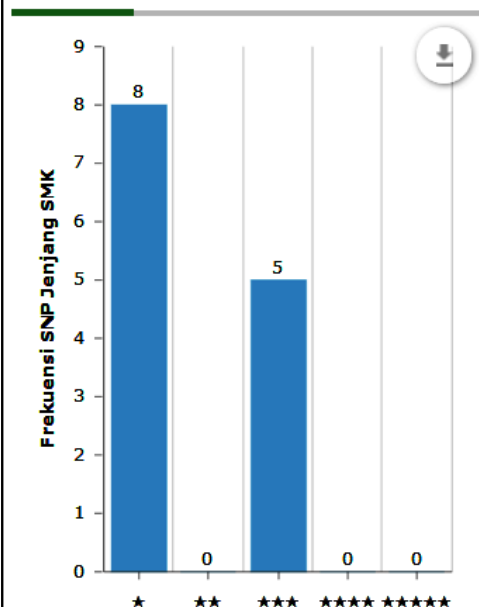
SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.05	★★★★
2.	Standar Isi	4.03	★★★★
3.	Standar Proses	4.37	★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.61	★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.07	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.39	★★★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.52	★★
8.	Standar Pembiayaan	3.75	★★★★

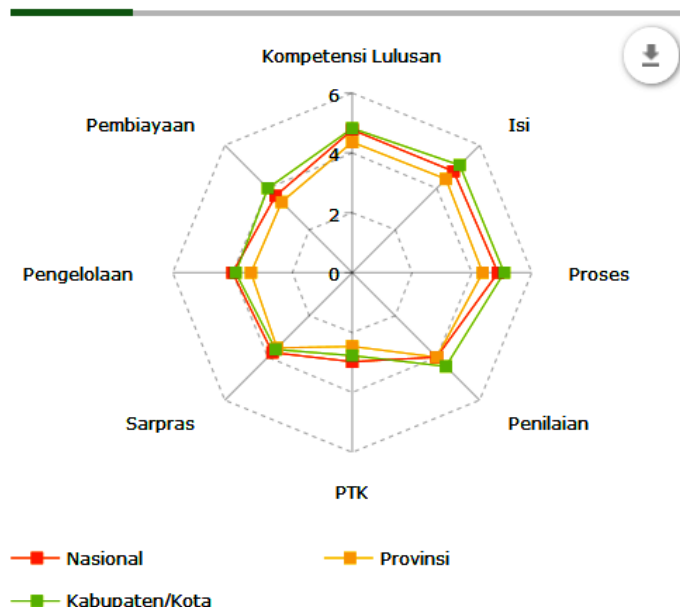
Raport Mutu

Jenjang SMK Kota Sorong

Frekuensi SNP Sekolah



Peta Mutu



Standar, Indikator Dan Sub Indikator

STANDAR

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Kode	Standar / Indikator / Sub Indikator	Capaian	Kelompok
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4.84	★★★★
2.	Standar Isi	5.09	★★★★★
3.	Standar Proses	5.1	★★★★★
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.43	★★★★
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.78	★★
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.66	★★
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.9	★★★★
8.	Standar Pembiayaan	4.02	★★★★